



**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
**(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**2018**



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR                   TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* serta guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim yang terkait program pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), perlu adanya penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994).
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kepulauan Riau;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja OPD selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 selanjutnya

disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pencapaian target TPB/SDGs untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

10. Aktor pembangunan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Filantropi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Kepala Barenlitbang adalah Kepala OPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah untuk:
  - a. memberi arah dan pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD terutama yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan SDGs; dan
  - c. acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lintas Urusan, Antar Wilayah, dan Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) RAD TPB/SDGs berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi:
  - a. tanpa kemiskinan;
  - b. tanpa kelaparan;
  - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
  - d. pendidikan berkualitas;
  - e. kesetaraan gender;
  - f. air bersih dan sanitasi layak;

- g. energi bersih dan terjangkau;
- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. berkurangnya kesenjangan;
- k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
- l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. penanganan perubahan iklim;
- n. ekosistem lautan;
- o. ekosistem daratan;
- p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

#### Pasal 4

Tujuan penetapan RAD TPB/SDGs adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan arah kebijakan umum, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target TPB/SDGs selama 5 (lima) tahun ke depan agar target capaian TPB/SDGs yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. penyusunan RKPD dan Renstra OPD; dan
- c. penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 5

- (1) RAD TPB/SDGs Tahun 2016-2021 memuat Dokumen Renaksi TPB/SDGs berisi Ringkasan Eksekutif, Keselarasan SDGs terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, SDGs menyempurnakan MDGs, Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Pembiayaan SDGs, metodologi dan sistematika penyusunan RAD TPB/SDGs, kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs, target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan daftar pustaka yang disebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Matriks renaksi TPB/SDGs terdiri atas Matriks I Program/Kegiatan Pemerintah, Matriks II Program/Kegiatan Non Pemerintah dan Matriks I Kabupaten/Kota disebutkan dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RAD TPB/SDGs Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian target TPB/SDGs hingga tahun 2021.

#### BAB IV SISTEMATIKA Pasal 6

Dokumen renaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Kondisi Pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs;
- c. BAB III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
- d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. BAB V Penutup.
- f. Daftar Pustaka

#### Pasal 7

RAD TPB/SDGs dilaksanakan oleh OPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah

#### Pasal 8

Kepala Barenlitbang melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RAD TPB/SDGs sesuai dengan ketentuan perundangan.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGS.
- (2) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam RAD TPB/SDGs ini.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SGGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VI PENUTUP Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka RAD TPB/SDGs menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan



sampai tahun 2021.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T.S ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran I: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

RENCANA AKSI DAERAH  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang kita kenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah 17 Tujuan dengan 169 target dan 240 indikator yang terukur yang merupakan hasil kesepakatan bersama yang di formulasikan melalui forum PBB sebagai agenda dunia dalam mewujutkan pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir tahun 2015. TPB/SDGs dicanangkan bersama oleh lebih dari 190 negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal yaitu melalui pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan menekankan akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, tentunya pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas yang dikenal dengan istilah “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang tertinggal”. Tujuan tersebutlah yang membuat agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif, dengan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Media sehingga menjadikan TPB sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

Pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memuat 17 Tujuan 92 Target dan 209 Indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019). Pada Perpres dimaksud secara jelas juga memandatkan daerah untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 757 Tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 ini memuat 17 (tujuh belas) Tujuan, 81 (delapan puluh satu) Target, dan 166 (seratus enam puluh enam) Indikator.

## KONDISI SAAT INI

Ringkasan Target dan Indikator masing-masing Tujuan dalam RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut:



### **Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun.**

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami penurunan sebesar 0,99%, yaitu dari 6,83% pada tahun 2012 menjadi 5,84% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional yaitu sebesar 9,82%. Posisi tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau di wilayah Sumatera lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyebaran kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 bulan maret, diketahui rata-rata sebesar 6,06% dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Lingga yaitu sebesar 13,84%, sementara tingkat kemiskinan tertinggi kedua berada di Kota Tanjungpinang sebesar 9,29% sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna.



### **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.**

Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering dan musim ombak besar. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas yang hasilnya tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2. Ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98%), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26%), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen) dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84%). Berdasarkan laporan rutin, persentase balita gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan dari 3,77% menjadi 2,16%. Angka kasus gizi kurang yang dilaporkan jauh lebih rendah dikarenakan data penimbangan balita (D/S) masih dibawah 60%. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Gizi kurang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 sebesar 17,7% lebih rendah berbanding angka nasional sebesar 17,8%. Berdasarkan hasil survei PSG, terlihat bahwa kasus gizi kurang banyak ditemukan di Kabupaten Karimun dan Natuna



### **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau 24 hari sejak terminasi kehamilan. Bila dibandingkan dengan AKI Nasional (346 per 100.000 KH), AKI Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih rendah. Salah satu faktornya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan jangkauan akses pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 35 per 1000 KH (BPS). Kematian bayi disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum, sepsis, dan icterus. Prevalensi epidemi penyakit menular di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka fluktuatif. Prevalensi HIV AIDS dalam kurun waktu

tahun 2011-2016 meningkat dari 0,19% menjadi 0,35%, untuk angka kejadian malaria mengalami penurunan yang signifikan dari 1,99/1000 penduduk menjadi 0,35/1000 penduduk. Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kepulauan Riau juga menjadi perhatian khusus. Diketahui hingga tahun 2016 jumlah dokter yang bertugas adalah sebanyak 947 orang dengan rincian 790 dokter tetap, 57 dokter PTT dan 100 dokter internship.



#### **Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang TK/RA, dan SMA/MA/SMK Paket C menunjukkan kondisi yang belum mencapai angka 100%. APK jenjang TK/RA baru mencapai 78,00%, sedangkan APK SMA/MA/SMK Paket C sebesar 85,17%. Sementara itu APK jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2016 telah mencapai angka diatas 100%. Untuk Angka partisipasi murni di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2016 masih dibawah 100% yaitu berturut-turut sebesar 97,38%, 95,16%, dan 74,59%. Indikator jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan DIV yang telah memperoleh sertifikasi sudah cukup baik dengan persentase 76%.



#### **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 93,22. Diantara Provinsi lain di wilayah Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Sumatera Barat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan menjadi 62,15. Capaian IDG Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau adalah 70,33 untuk kota Tanjungpinang dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 40,75. Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB semua cara di tahun 2015 sebesar 47,05. Jenis metode kontrasepsi terbesar adalah 56,18% sedangkan yang terendah adalah metode menyusui alami yaitu 0,11%. Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah ASFR dalam satu tahun. ASFR tertinggi pada kelompok usia 25-39 tahun sedangkan TFR sebesar 2,312 pada tahun 2015.



#### **Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2011-2016 menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,96% menjadi 89,23%. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dari 71,80% menjadi 73,01%. Selain itu ketersediaan air baku juga menjadi kebutuhan utama penduduk. Persentase tersedianya air baku juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 36,09% pada tahun 2011 menjadi 60,60% pada tahun 2015.



#### **Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi hasil tambang cukup berlimpah. Potensi terbesar yang teridentifikasi adalah bauksit dan timah yang diperkirakan masing-masing mencapai 200.000 ton dan 3.515.000.000 ton, dengan rencana

kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.899 Ha. Berkaitan dengan energi, Rasio elektrifikasi tahun 2016 mencapai 89,14%. Selain itu, rasio ketersediaan daya listrik juga menjadi poin positif yang terus menunjukkan peningkatan, dari semula tahun 2011 baru mencapai 55,38% dan 2016 menjadi 74,90%. Hal tersebut terus mendapat perhatian dari pemerintah dalam rangka mewujudkan rasio ketersediaan daya listrik 100%.



### **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ADHB dan ADHK tahun 2012-2016 masing-masing 145 Triliun menjadi 217 Triliun Rupiah dan 128 Triliun menjadi 163 Triliun. Sejalan dengan hal tersebut turut meningkatkan PDRB per kapita dari tahun 2012 sebesar Rp 49.644 menjadi Rp 106.785 pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam kurun tahun 2012-2016, trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 sebesar 7,63% menjadi 6,03 pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 6,18%, selanjutnya Kabupaten Bintan 5,96% dan Kota Batam 5,45% dengan pertumbuhan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas 2,91%. Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016 tercatat sebanyak 1.920.232 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,64% dibanding kunjungan wisman selama Tahun 2012 yang mencapai 1.767.439 orang. Kontribusi jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terhadap jumlah seluruh wisman yang berkunjung ke Indonesia selama Tahun 2016 adalah 16.7 %.



### **Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi**

Untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana transportasi baik udara, laut dan darat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan wilayah di Kepulauan Riau dimana kondisi wilayahnya merupakan kepulauan. Pada kondisi jalan, Dilihat dari panjangnya, terjadi peningkatan panjang jalan dari 679,49 km pada tahun 2011 menjadi 890,1 km pada tahun 2015. Sementara Kondisi jalan baik di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2011-2016 menunjukan perkembangan yang fluktuaktif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 69,44% menjadi 73,50%. Untuk sarana transportasi laut, jumlah pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. Kp 414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebanyak 132 unit, dengan perincian sebanyak 15 pelabuhan terdapat di Kota Batam, 36 pelabuhan di Kabupaten Bintan, 12 pelabuhan di Kabupaten Karimun, 4 pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 11 pelabuhan di Kabupaten Lingga, 18 pelabuhan di Kabupaten Natuna dan 28 pelabuhan di Kota Tanjungpinang. Sementara untuk mendukung lalulintas perhubungan udara, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 6 bandar udara.



### **Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara**

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2012–2016

stabil yaitu sebesar 0,35 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang.



### **Kota dan Permukiman Berkelanjutan**

Hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk di perkotaan. ). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa); Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman serta penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh.



### **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.**

*Sustainable Consumption and Production* (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan. Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi), (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, (3) kriteria ekolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan, (4) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (5) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (green banking), serta (6) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi.



### **Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan**

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mencakup penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota; penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur; pembinaan PPNS provinsi; penanggulangan bencana provinsi; dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Berkaitan dengan penanggulangan bencana, persentase Kabupaten/Kota yang tanggap bencana di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari 14,24% pada tahun 2011 menjadi 57,14% pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2011-2016 Persentase kejadian bencana kab/ kota yang tertangani dengan baik sebesar 100%.



### **Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan**

Sebagai provinsi dengan wilayah kepulauan, potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Potensi yang paling menonjol adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat dari tahun 2011 sebanyak 208.756 ton, menjadi sejumlah 375.441,66 ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap sejumlah 303.411,28 Ton atau penurunan sekitar 19,18% dari tahun 2015, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium beberapa jenis alat tangkap yang dominan dipergunakan nelayan di Kepulauan Riau. Hasil analisis untuk tiap kabupaten/kota berdasarkan

pendekatan dataproduksi aktual dengan potensi stok menurut DKP RI 2010 terdapat daerah dengan tingkat pemanfaatan yang perlu di moratorium akibat kelebihan potensi lestarynya seperti Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.



### **Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan**

Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6/06/1986, Keputusan Menteri No. 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 dan hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat GIS seluas 847.255,47 ha. Kawasan hutan tersebut terbagi atas hutan konservasi seluas 2.401,56 ha, hutan lindung seluas 35.967,25 ha, hutan produksi terbatas seluas 354.926,73 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 453.959,93 ha. Sampai tahun 2016 tercatat hutan yang mengalami kerusakan sebesar 0,2% dari luasan yang ada. Sektor kehutanan juga merupakan sumberdaya yang berperan dalam perekonomian daerah dimana memberikan kontribusi sebesar 0,1% terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau.



### **Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh**

Kondisi masyarakat yang inklusif dan damai merupakan dambaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut tentunya merupakan hasil kerjasama antara semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi yang tercatat 4.885 kasus pada tahun 2016 maka upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan. Sebanyak 24 kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan dengan 2 kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari 65,61% menjadi 70,26%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengembangkan 8 aplikasi e-Government sampai pada tahun 2015. Walaupun demikian Capaian nilai keterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah Provinsi Kepri masih rendah yaitu 59,5%. Untuk itu perlu adanya usaha perbaikan ke depan melalui pengelolaan data dan pelayanan informasi serta meningkatkan peran dan fungsi PPID pada setiap OPD.



### **Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global**

Untuk mendukung jaringan komunikasi yang baik, jumlah unit jaringan komunikasi juga harus mencukupi. Capaian indikator persentase SKPD memiliki akses layanan internet (terhubung jaringan LAN-WLAN) pada tahun 2015 baru mencapai 86%. Berkaitan penyebaran informasi, jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi, baru 100 media yang terdaftar sampai pada tahun 2015. Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik baru 4 saluran sampai pada tahun 2015.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan, 240 indikator, dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Pertemuan ini dihadiri oleh 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya, yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai dengan tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB).

Mulai Tahun 2016 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan Millenium ( MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Pada tanggal 4 Juli tahun 2017, Pemerintah telah mengeluarkan sebuah Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan(TPB/SDG's) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu : Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPb/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Adapun 17 point penting didalam SDGs secara garis besar adalah terciptanya dunia dengan : 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi, dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13) penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem lautan;15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Secara keseluruhan terdapat beberapa fokus SDGs yang



sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) diantaranya pembangunan manusia, kesejahteraan dan pendidikan, ekonomi berkelanjutan, akses energi yang terjangkau, dan perubahan iklim.

Dalam rangka mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan menyatukan kesamaan program dan kegiatan OPD yang terkait SDGs, diperlukan perencanaan yang matang dan terarah dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, koordinasi lintas OPD terkait juga lintas Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengintegrasikan tujuan yang menjadi prioritas SDG's ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun secara komprehensif agar memudahkan penjabarannya kedalam dokumen perencanaan tahunan, dan memudahkan dalam proses evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau bisa efektif, efisien, tepat sasaran dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 yaitu: **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Sebagai Bunda Tanah Melayu**

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

### **2. Sejahtera**

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

### **3. Berakhlak Mulia**

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

### **4. Ramah Lingkungan**

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

### **5. Unggul di Bidang Maritim**

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicitakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka merespon kesepakatan global dan memenuhi amanat Presiden Republik Indonesia, serta mencapai visi misi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2017 telah menyusun sebuah dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDG's dilanjutkan dengan melakukan penyempurnaan RAD TPB/SDG's pada Tahun 2018. Rencana Aksi Daerah TPB/SDG's merupakan dokumen yang didalamnya terdapat dokumen rencana kerja selama lima tahun untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan para stakeholder baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDG's.

Sejalan dengan penyusunan dokumen RAD TPB/SDG's pada tahun 2017 tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 757 Tahun 2017 Tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut dibuat dalam upaya untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam program pembangunan daerah melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perkembangan pencapaian target dan percepatan pelaksanaan dari indikator TPB/SDGs.

Di tingkat global pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD tahun 2016-2021, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya, serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-

prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Sustainable Development Goals**

Tujuan SDGs	
1)	Tanpa Kemiskinan
2)	Tanpa Kelaparan
3)	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4)	Pendidikan Berkualitas
5)	Kesetaraan Gender
6)	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7)	Energi Bersih dan Terjangkau
8)	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9)	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10)	Berkurangnya Kesenjangan
11)	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13)	Penanganan Perubahan Iklim
14)	Ekosistem Lautan
15)	Ekosistem Daratan
16)	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17)	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan kepentingan-kepentingan nasional dan daerah yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun RPJMD 2016-2021. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2016-2021, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan,

pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sinergi antara Nawa Cita, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dan TPB/SDGs ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2 Sinergi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 dengan TPB/SDGs**

VISI	MISI	SDG's
<p><b>Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim</b></p>	<p><b>Misi RPJMD 1 :</b>            Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai – nilai Agama, dengan sasaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.</li> <li>b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama.</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dengan sasaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>	
	<p><b>Misi RPJMD 2 :</b>            Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta</p>	<p>G9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur</p> <p>G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p>

VISI	MISI	SDG's
	<p>meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.</p> <p>1. Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik</p> <p>b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi</p> <p>b. Meningkatnya akses pelayanan air bersih.</p> <p>c. Berkurangnya kawasan kumuh.</p> <p>d. Meningkatnya rasio elektrifikasi.</p>	<p>G7 Energi Bersih dan Terjangkau</p>
	<p><b>Misi RPJMD 3 :</b></p> <p>Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pendidikan</p> <p>b. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.</p>	<p>G4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>G10 Berkurangnya Kesenjangan</p>
	<p><b>Misi RPJMD 4 :</b></p> <p>Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan</p>	<p>G1 Tanpa Kemiskinan</p> <p>G2 Tanpa Kelaparan</p>

VISI	MISI	SDG's
	<p>kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.</li> <li>b. Angka kemiskinan menurun.</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan, dengan sasaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</li> </ol> </li> </ol>	<p>G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>G5 Kesetaraan Gender</p>
	<p><b>Misi RPJMD 5 :</b> Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman, dengan sasaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan</li> <li>b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan</li> </ol>	<p>G2 Tanpa Kelaparan</p> <p>G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p> <p>G14 Ekosistem Lautan</p>



VISI	MISI	SDG's
	<p>pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran.</p>	
	<p><b>Misi RPJMD 6 :</b> Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>1. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM.</p>	<p>G1 Tanpa Kemiskinan</p> <p>G2 Tanpa Kelaparan</p> <p>G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan</p>
	<p><b>Misi RPJMD 7 :</b> Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.</p> <p>1. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal</p> <p>b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan</p>	<p>G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p>
	<p><b>Misi RPJMD 8 :</b> <b>Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran:</p> <p>a. Berkurangnya</p>	<p>G17 Kemitraan untuk mencapai Tujuan</p>

VISI	MISI	SDG's
	kerusakan, lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan.	
	<p><b>Misi RPJMD 9 :</b>  Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, dengan sasaran:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.</p> <p>b. Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.</p>	G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

## 1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Mengacu kepada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang telah memandatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun, Provinsi Kepulauan Riau segera mengambil langkah-langkah dan strategi untuk segera dapat memenuhi mandat tersebut. Komitmen Provinsi Kepulauan Riau didalam pelaksanaan pencapaian tujuan TPB/SDGs diwujudkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 757 tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau.

Tim Koordinasi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat, Kelompok Kerja (POKJA), dan Tim Pembantu Tenaga Entry/Pelaksana. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi

Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak sebagai Pengarah yang bertugas memberikan arahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Provinsi Kepulauan Riau, serta menyampaikan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai Koordinator Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan Sekretaris Daerah oleh Gubernur Kepulauan Riau, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bertindak sebagai Ketua Pelaksana (*leading sector*). Beberapa OPD terlibat didalam Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pembantu Tenaga Entry dalam usaha pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau.

Didalam Pelaksanaannya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau juga telah membentuk sebuah Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana fungsinya adalah sebagai wadah untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi serta menyiapkan laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada tim pelaksana. Rencana Aksi daerah sendiri akan menjadi dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di Provinsi Kepulauan Riau, yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan dan kondisi pencapaian TPB/SDGs. Didalam Pengoptimalannya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan akan melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, parlemen, ormas dan media, filantropi dan Bisnis, pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan para pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu *No One Left Behind*.

### **1.3 Pembiayaan SDGs**

Sebagai Provinsi yang berkomitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sejak tahun 2017 Kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs baik di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, dari segi Penerimaan Daerah telah dioptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah, retribusi, dll. Ini adalah wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai indikator-indikator yang terdapat pada Goal yang ke-17.

Dari sisi Filantropis dan Pelaku Usaha, sudah ada beberapa Badan Usaha yang memberikan dana dalam bentuk CSR (Corporated Social Responsibility).

Ada salah satu skema pembiayaan yang dikenal dengan nama KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), namun di Provinsi Kepulauan Riau baru pada tahapan sosialisasi. Diharapkan kedepannya akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

#### **1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

Sesuai dengan mandat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat Provinsi akan disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan RAD akan melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi.

Didalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Langkah Pertama : Menetapkan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja yang dituangkan kedalam sebuah Surat Keputusan Gubernur Nomor 757 tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau. Kelompok Kerja terdiri dari 4(empat)pilar, yaitu Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola;
- Langkah Kedua : Melakukan Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs melibatkan seluruh instansi Pemerintah yang terlibat;
- Langkah Ketiga : Melakukan Rapat bersama lembaga non pemerintah. Diharapkan lembaga non pemerintah melakukan keterlibatan aktif didalam penyusunan RAD TPB/SDGs. Lembaga Non Pemerintah yang dimaksud adalah Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat, Akademisi serta media;

- Langkah Keempat : Masing-masing pokja (Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola) menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan cara menyelenggarakan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian I yang merupakan matriks utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan non pemerintah.
- Langkah Kelima : Melakukan Rapat Verifikasi indikator pencapaian Tujuan dan arah kebijakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Langkah Keenam : Melakukan penyusunan Renaksi dan mengesahkan Renaksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

### 1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terdiri atas lima bagian, yaitu :

**Bab pertama** berisi tentang pendahuluan, menjelaskan keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD, bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini juga menjabarkan partisipasi platform dan pembagian pokja berdasarkan pilar serta langkah langkah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pembiayaan TPB/SDGs dan proses penyusunan RAD TPB/SDGs juga menjadi salah satu bagian penting yang dibahas pada bab pertama ini.

**Bab kedua** menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau untuk beberapa indikator utama dari setiap tujuan. Bab ini memberikan gambaran mengenai data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2021.

**Bab ketiga** merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat pada RPJMD 2016-2021 yang selaras dengan Tujuan TPB/SDGs. Berdasar pada arah dan kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan bagi Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Pemerintah (Renja). Untuk program-program yang dijalankan oleh lembaga nonpemerintah juga dijabarkan pada bab ini.

**Bab keempat** menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta tanggungjawab masing-masing platform serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2016-2021. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assesment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau .

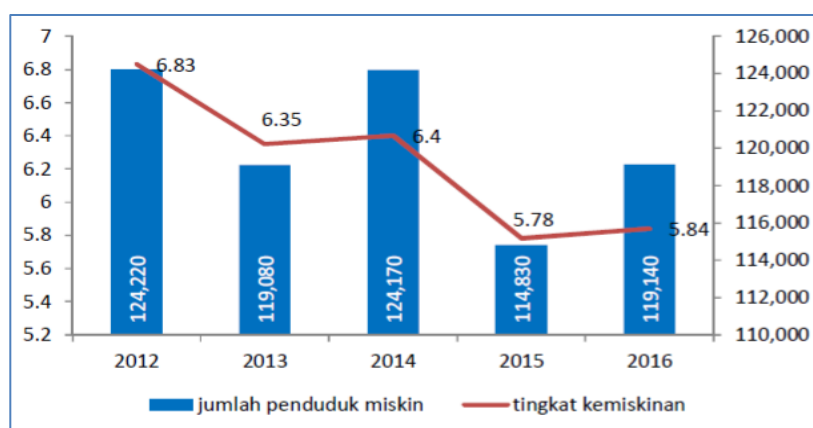
**Bab kelima** merupakan bab penutup yang berisi tentang kaidah, upaya, proses serta kaji ulang pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bagi pada Organisasi Perangkat Daerah maupun pada lembaga nonpemerintah lainnya yang terlibat.

## BAB II

### KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

#### 2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

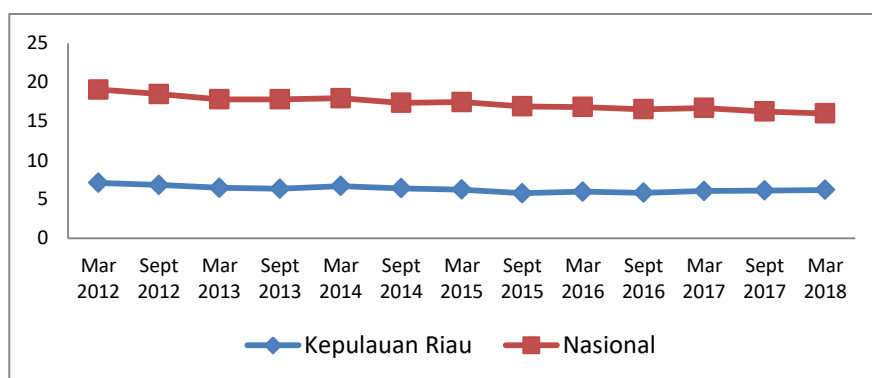
**Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.** Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2012-2016), yaitu dari sebesar 6,83% pada tahun 2012 menjadi 5,84% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,99%. Gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (September)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

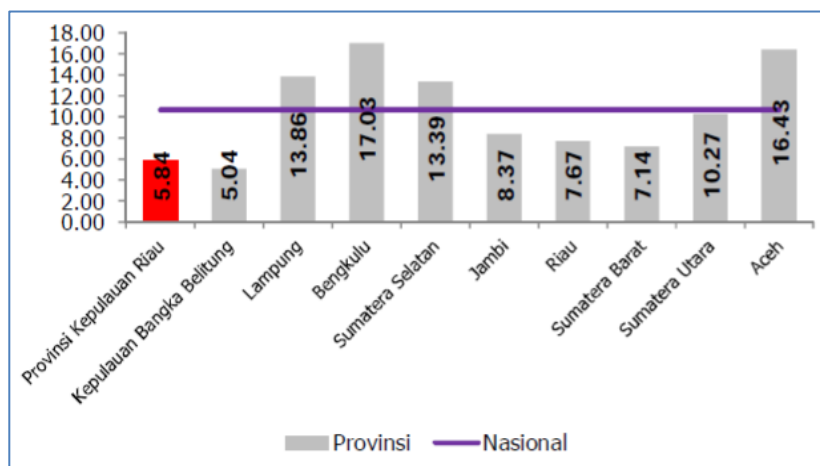
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 (Maret) sebesar 6,2%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,82%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya. Gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2018**

Sumber: Susenas BPS, 2018

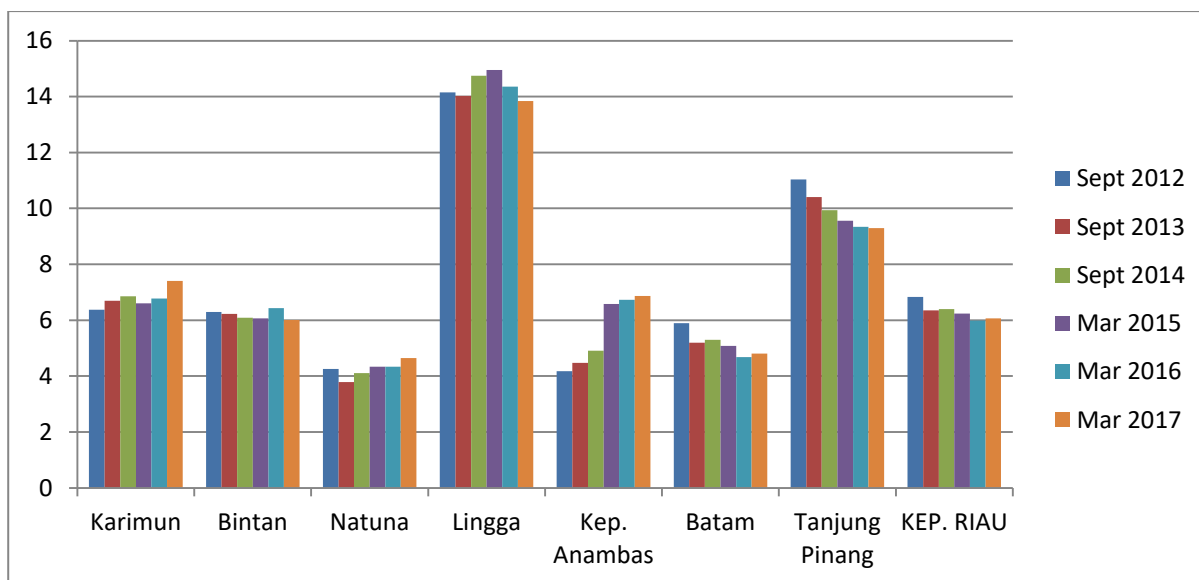
Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2016 (September)**

Sumber: Susenas BPS, 2017

Penyebaran kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 bulan maret, diketahui tertinggi di Kabupaten Lingga sebesar 13,84%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,06%. Sementara itu tingkat kemiskinan tertinggi kedua berada di Kota Tanjungpinang sebesar 9,29%, sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.



**Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau**

Sumber: Susenas BPS, 2017

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 396.889 jiwa (20,12%) penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah. Jumlah terbanyak di Kota

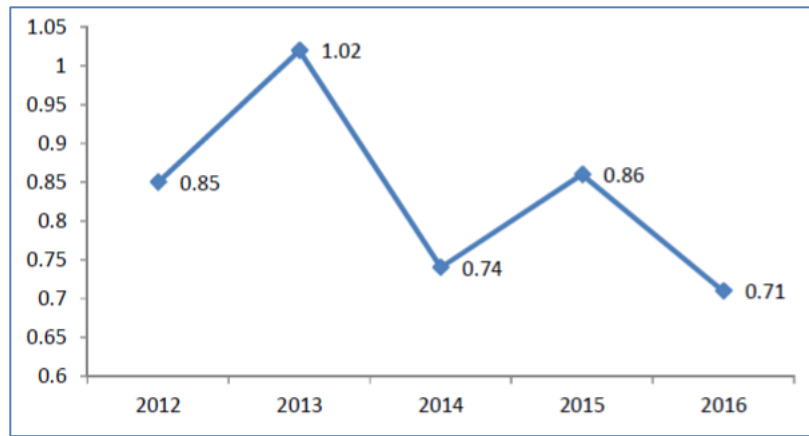


Batam, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah
1	Kabupaten Bintan	36.288
2	Kabupaten Karimun	55.123
3	Kabupaten Natuna	15.872
4	Kota Batam	211.670
5	Kota Tanjungpinang	40.710
6	Kabupaten Lingga	28.570
7	Kabupaten Kep. Anambas	8.656
	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	396.889
	Jumlah Penduduk Kep. Riau	1.973.043
	Persentase Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	20,12%

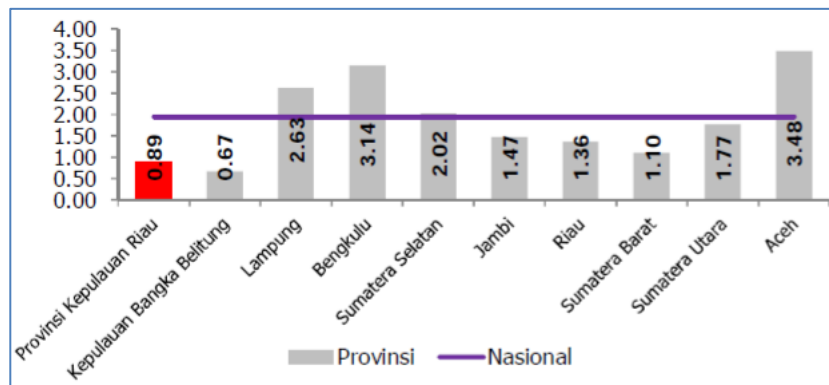
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang sangat rendah, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dekat dengan garis kemiskinan. P1 Provinsi Kepulauan Riau menurun dari 0,85 pada tahun 2012 menjadi 0,71 pada tahun 2016. Dengan menurunnya P1 di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan setiap tahunnya semakin menurun. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.5.



**Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (September)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau terendah kedua setelah Bangka Belitung. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.6.

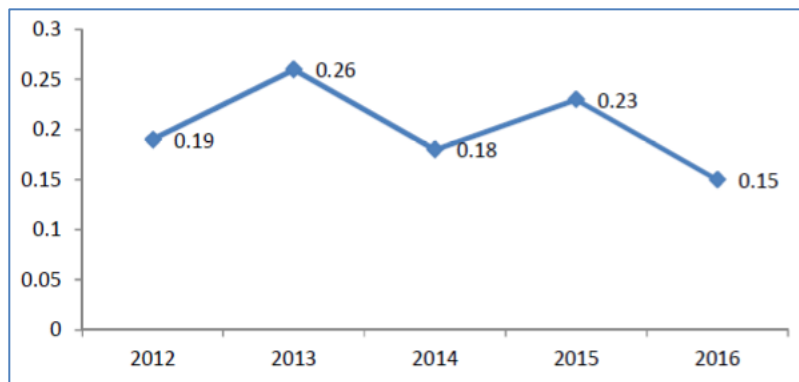


**Gambar 2.6 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (Maret)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

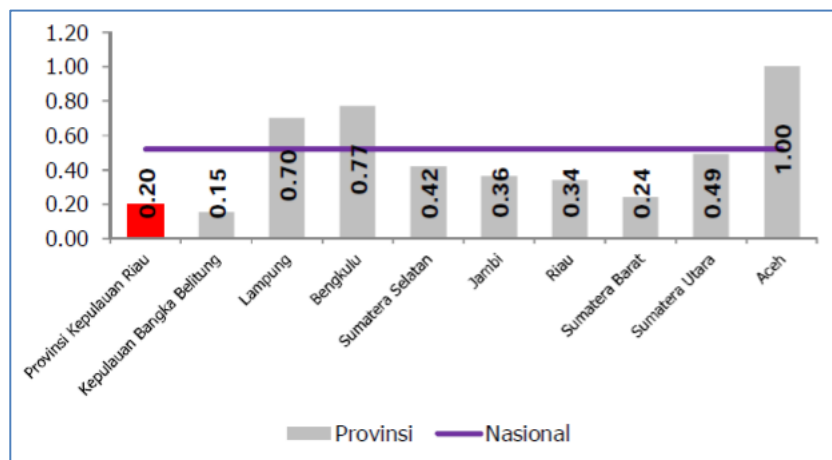
Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2012-2016 indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dari sebesar 0,19 pada tahun 2012 menjadi 0,15 pada tahun 2016, yang menunjukkan ada pergeseran penurunan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif rendah.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.7.



**Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2012 – 2016 (September)**  
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera berada pada posisi ke-3 terendah setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat. Perbandingan indeks keparahan kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.8.



**Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (Maret)**  
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Dengan melihat tren penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian serius karena tren P1 dan P2 walaupun menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir (2012-2016) akan tetapi kinerja tahunannya tidak konsisten. Kondisi P1 dan P2 menunjukkan kinerja yang fluktuatif sehingga akan berpengaruh besar terhadap kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016, kedua indeks P1 dan P2 angka di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin daerah perkotaan relatif mendekati garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin daerah perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding daerah perkotaan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan.

## **2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan Kerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama ini terkait pengadaan, penyimpanan, perawatan dan penyaluran beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah kekurangan pangan, kerawanan pangan baik transien maupun kronis, pasca bencana, terjadinya gejolak harga dan/atau keadaan darurat sebanyak 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah provinsi juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

**Ketersediaan pangan** di Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat rumah tangga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2016, khususnya ketersediaan energi per kapita. Ketersediaan energi perkapita meningkat dari sebesar 2.234 Kkal/Kap/Hr pada tahun 2011 menjadi sebesar 2.427 Kkal/Kap/Hr pada tahun 2016. Ketersediaan protein perkapita juga cenderung meningkat dari sebesar 75,52 Gram/Kap/Hr pada tahun 2011 menjadi sebesar 114.36 Gram/Kap/Hr pada tahun 2016. Angka ketersediaan energi dan protein telah melebihi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VIII tahun 2004, yaitu untuk ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hr, dan ketersediaan protein sebesar 57 gram/kap/hr.

**Tingkat kerawanan pangan** berdasarkan konsumsi kalori sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain penyediaan pangan, harga pangan, pendapatan keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, serta pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Tingkat pendapatan yang rendah di bawah harga pangan, akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan pada tingkat perseorangan di keluarga akan berkurang dan secara bertahap akan mengarah pada timbulnya kasus gizi buruk, yang akan menciptakan kualitas sumberdaya yang lemah (lost generation).

**Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi.** Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering dan musim ombak besar. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas yang hasilnya tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2. Ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98%), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26%), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen) dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84%).

Berdasarkan laporan rutin, **persentase balita gizi kurang** di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011–2015 mengalami penurunan dari 3,77% menjadi 2,16%. Angka kasus gizi kurang yang dilaporkan jauh lebih rendah dikarenakan data penimbangan balita (D/S) masih dibawah 60%. Oleh karena itu, dimulai akhir tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI telah melakukan Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di 34 Provinsi. Hasil survei menunjukkan angka kasus balita gizi kurang lebih tinggi dari angka pelaporan rutin, hasil PSG Gizi kurang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 sebesar 17,7% lebih rendah berbanding angka nasional sebesar 17,8%. Berdasarkan hasil survei PSG, terlihat bahwa kasus gizi kurang banyak ditemukan di Kabupaten Karimun dan Natuna. Secara rinci dijabarkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Balita Gizi Kurang per Kota/Kabupaten Tahun 2011-2016 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	*2016 (PSG)
1	Karimun	13,13	8,01	5,93	6,53	5,32	22,1
2	Bintan	1,92	2,37	3,29	2,37	2,58	14,8
3	Natuna	11,25	21,77	12,59	5,58	7,43	18,8
4	Lingga	8,28	4,12	4,92	4,32	4,32	17,6
5	Kota Batam	2,84	2,50	1,30	1,73	1,59	17,8
6	Kota Tanjungpinang	5,03	0,76	0,30	3,49	4,06	16,7
7	Kep. Anambas	6,71	10,04	10,04	7,72	3,53	16,2

(Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau (2011-2015) dan Survei PSG 2016)

Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah. Dilihat persebarannya, persentase gizi kurang tertinggi berada di Kabupaten Natuna, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Angka kecukupan gizi** yang harus dicapai penduduk Indonesia umumnya dan penduduk Provinsi Kepulauan Riau khususnya adalah yang sesuai dengan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) ke VIII (2004). Angka kebutuhan energi (kalori) rata-rata yang harus dicapai penduduk Indonesia pada tingkat konsumsi sebesar 2.000 kkal/orang/hari, sedangkan angka kecukupan protein rata-rata sebesar 52 gram/orang/hari. Rata-rata konsumsi kalori perkapita di Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 2212,5 kkal/kapita/hari, berada di atas standar WNPG ke VIII tahun 2004. Rata-rata konsumsi protein perkapita perhari juga sudah memenuhi syarat yang ditetapkan WNPG yaitu sebesar 70,6 per gram/kapita/hari. Dilihat dari keragaman Konsumsi pangan, skor PPH provinsi kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari 89,6 pada tahun 2011 menjadi 85,5 pada tahun 2016. Tentunya penganekaragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman perlu terus ditingkatkan.

### **2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

**Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, tenggelam dan lain-lain. Angka Kematian Ibu dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011 – 2016 fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 121 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 120 per 100.000 kelahiran hidup.

Bila dibandingkan dengan AKI Nasional (346 per 100.000 KH), AKI Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih rendah. Salah satu faktor pendukung kematian ibu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan akibat keadaan geografis. Kematian ibu dikarenakan oleh pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran. Berikut ini distribusi jumlah kematian berdasarkan kabupaten/kota, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	7	7	7	13	5	6
2	Bintan	6	10	5	4	6	4
3	Natuna	2	5	7	2	1	1
4	Lingga	5	7	4	2	1	5
5	Kota Batam	25	22	20	39	43	29
6	Kota Tanjungpinang	8	5	8	11	7	0
7	Kep. Anambas	2	1	2	1	2	4
	Jumlah	55	57	53	72	65	49

(Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau)

**Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). AKB Provinsi Kepulauan Riau bersumber data penghitungan Survei melalui SDKI dan Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan SDKI Tahun 2012, AKB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 35 per 1000 KH, berbeda dengan hasil pelaporan rutin yang berkisar <20 per 1000 KH. AKB yang relatif kecil disebabkan karena pelaporan AKB baru pada tingkat pelayanan kesehatan dan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Sehingga, penghitungan AKB disepakati menggunakan AKB bersumber data BPS melalui SDKI yaitu 35 per 1000 KH. Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan conginital, dan Icterus.

Dilihat per kabupaten/kota, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kota Batam, selanjutnya Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang. Secara rinci jumlah kematian bayi per kabupaten/kota terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4 Jumlah Kasus Kematian Bayi berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	63	77	76	104	80	57
2	Bintan	50	34	23	7	32	26
3	Natuna	12	9	16	17	24	18
4	Lingga	25	25	25	2	23	25
5	Kota Batam	122	106	44	303	228	138
6	Kota Tanjungpinang	44	36	40	40	38	49
7	Kep. Anambas	25	10	17	17	21	13
	Jumlah	341	297	241	490	446	326

(Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau)

**Mengakhiri epidemi penyakit menular.** Prevalensi HIV AIDs pada penduduk dalam kurun waktu tahun 2011-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 0,19% menjadi 0,35%. Persentase ODHA yang mengakses ART (Anti-Retroviral Treatment) selama

2011-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 29% menjadi 57,3%. Sementara itu Angka Kejadian Malaria dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan yang signifikan (dari 1,99/1.000 penduduk menjadi 0,37/1.000 penduduk). Pengendalian penyakit malaria dilakukan untuk mencapai target tujuan 6 MDG's 2015 dan pada tahun 2017, Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam daerah target eliminasi malaria. Adapun untuk Angka Kejadian Kusta pada tahun 2016 sebesar 1,83 per 100.000 penduduk, dan Angka Kejadian Filariasis sebesar 5 per 100.000 penduduk. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2011 - 2016, capaiannya meningkat dari 17% menjadi sebesar 72,5%.

Faktor yang sangat mempengaruhi kinerja layanan kesehatan adalah sumberdaya tenaga kesehatan. Keadaan geografis Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) mengakibatkan Pemerintah Kepulauan Riau kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau maka Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada.

Pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK tidak dapat menggunakan standard nasional yang berdasarkan rasio, karena meskipun dengan jumlah penduduk yang kecil, namun penyebaran tempat tinggal penduduk mengakibatkan jauhnya rentang kendali pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui sistem kontrak dokter/dokter gigi, PTT, dan bidan PTT, selain perekrutan melalui CPNS dan PTT dari Pusat. Dokter/dokter gigi PTT ditempatkan di setiap puskesmas/puskesmas pembantu dan Bidan desa ditempatkan di puskesmas pembantu/polindes.

Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kepulauan Riau ditargetkan melalui indikator sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatkan persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dan Meningkatkan persentase RS pemerintah Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang. Berdasarkan data Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Profil Kabupaten/Kota, diketahui bahwa jumlah dokter yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 adalah sebanyak 947 orang dengan rincian 790 dokter tetap, 57 dokter PTT dan 100 dokter internship. Distribusi dokter menurut Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel 2.5 berikut ini.



**Tabel 2.5 Tenaga Medis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Dr spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1	Karimun	39	66	15
2	Bintan	13	96	25
3	Natuna	8	24	8
4	Lingga	4	23	11
5	Kota Batam	199	392	62
6	Kota Tanjungpinang	72	147	40
7	Kep. Anambas	2	42	6
	Jumlah	337	790	167

(Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau)

#### **2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang TK/RA, dan SMA/MA/SMK Paket C menunjukkan kondisi yang belum mencapai angka 100%. APK jenjang TK/RA baru mencapai 78,00%, sedangkan APK SMA/MA/SMK Paket C sebesar 85,17%. Sementara itu APK jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2016 telah mencapai angka diatas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa APK jenjang TK/RA, dan SMA/MA/SMK Paket C perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai angka 100%. Secara rinci Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Angka Partisipasi Kasar Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	APK TK/RA (3-6 Tahun)	%	42	46,40	29,10	76,02	76,12	78,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,78	105,12	107,10	108,36	112,74	107,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B	%	96,75	99,11	100,03	100,62	97,07	101,30
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C	%	63,50	64,00	75,10	81,79	82,23	85,17

**Angka partisipasi murni** di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2016 masih dibawah 100% yaitu berturut-turut sebesar 97,38%, 95,16%, dan 74,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa APM jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/MA/SMK perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai angka 100%. Secara rinci Angka partisipasi murni di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7 Perkembangan Kinerja Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	85,14	90,16	93,57	99,08	98,60	97,38
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	79,07	81,79	93,00	96,72	94,35	95,16
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	61,49	61,78	62,00	67,61	71,58	74,59

**Mutu pendidik dan tenaga kependidikan** terlihat dari indikator jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan DIV atau yang telah memperoleh sertifikasi. Rasio guru terhadap kelas dan rasio guru terhadap murid sudah cukup baik. Bahkan ada kecenderungan sudah kelebihan guru. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kelembagaan adalah persentase sekolah semua jenjang terakreditasi minimal B. Kualitas kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan belum optimal. Banyak manajemen di tingkat satuan pendidikan belum sesuai dengan harapan yaitu terakreditasi minimal B. Perkembangan capaian indikator pendidikan secara rinci terlihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

**Tabel 2.8 Perkembangan Kinerja Mutu Pendidik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan	%	55	67	67	86	80	76,00
2	Rasio guru/murid SD/MI	%	1:16	1:18	1:18	1:17	1:18	1:16
3	Rasio guru/murid SMP/MTs	%	1:15	1:20	1:18	1:20	1:15	1:15
4	Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	%	1:10	1:11	1:11	1:14	1:12	1:20

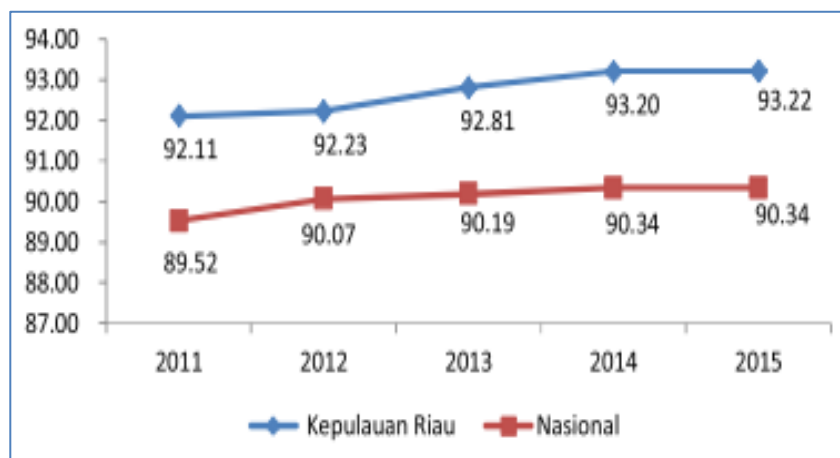
(Sumber: Dinas Pendidikan)

## **2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang

antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan agama.

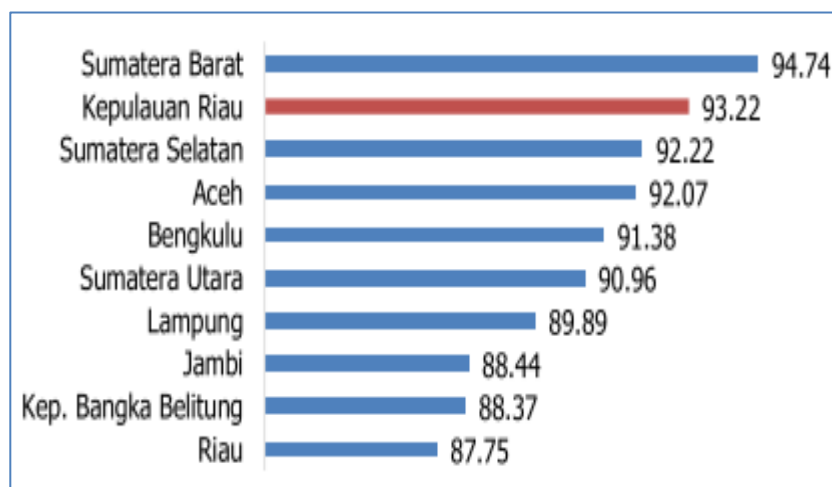
Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 93,22. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Perkembangan IPG dapat dilihat pada Gambar 2.9.



**Gambar 2.9 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2011-2015**

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

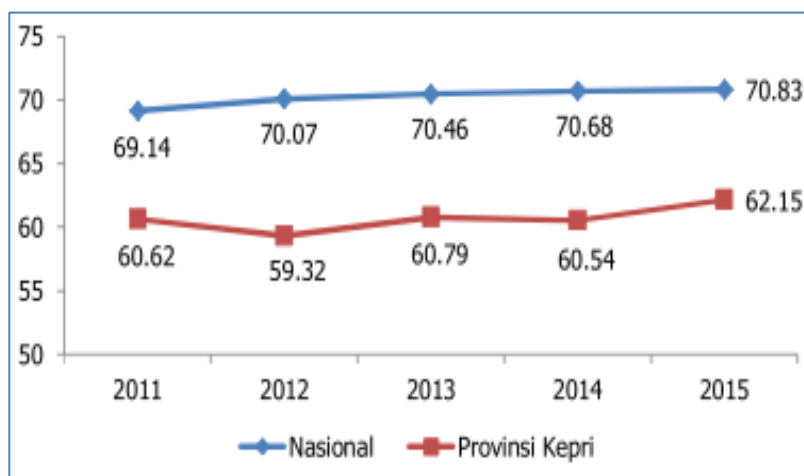
Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 93,22 diantara provinsi lain di wilayah Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 2.10 berikut ini.



**Gambar 2.10 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2015**

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

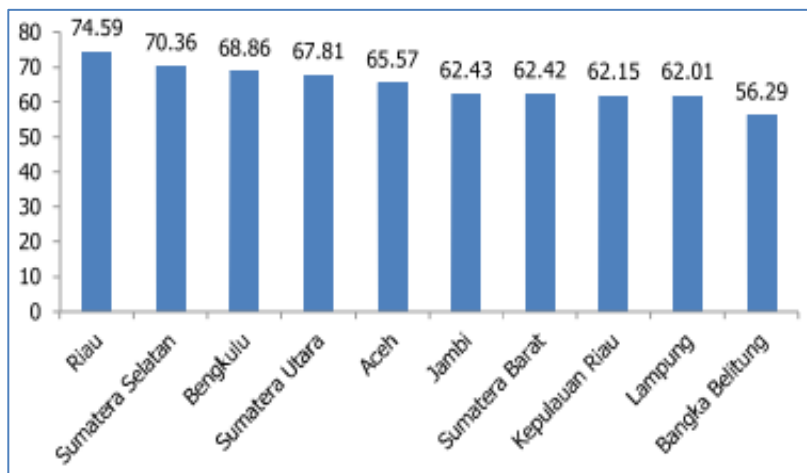
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 60,62 pada tahun 2011 menjadi 62,15 pada tahun 2015, seperti terlihat pada Gambar 2.11 berikut ini.



**Gambar 2.11 Perbandingan IDG di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2011-2015**

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 62,15 apabila dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera lebih rendah dari Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan Sumatera Barat. Data perbandingan IPG Kepulauan Riau lebih dengan provinsi lain dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut.



**Gambar 2.12 Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau Dengan Provinsi Lain Di Wilayah Sumatera Tahun 2015**

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Dilihat capaian IDG per kabupaten/kota, terlihat bahwa Kota Tanjungpinang memiliki nilai IDG tertinggi sebesar 70,33, sedangkan capaian IDG terendah di Kabupaten Lingga sebesar 40,75. Peringkat selanjutnya

setelah Kota Tanjungpinang yaitu Kabupaten Bintan. Perincian capaian indikator pembentuk IDG tercantum pada Tabel 2.9 berikut ini.

**Tabel 2.9 Capaian Indikator Pembentuk IDG Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Indeks Pemberdayaan Gender
1	Karimun	10,00	43,19	24,64	55,55
2	Bintan	20,00	46,02	23,63	65,44
3	Natuna	10,00	39,39	23,53	52,85
4	Lingga	0,01	48,00	22,32	40,75
5	Kep. Anambas	10,00	49,47	25,67	56,96
6	Kota Batam	8,00	47,86	28,19	57,83
7	Kota Tanjungpinang	26,67	42,82	26,02	70,33
	Provinsi Kepulauan Riau	13,33	46,41	27,12	62,15

(Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016)

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disetiap Kabupaten/Kota terdapat indikasi semakin menurun sebesar 23 %, penurunan terbesar terjadi di Kota Batam. Sementara di Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas terjadi peningkatan antara Tahun 2014 ke Tahun 2015 dan memerlukan perhatian yang dari setiap pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, persentase perempuan dan anak korban perdagangan orang yang ditangani sebesar 100%. Begitu pula dengan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan capaiannya juga mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Secara rinci kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.10 dibawah ini.

**Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	% Anggaran Responsif Gender dlm belanja langsung APBD Provinsi	%	6,9	8,1	4,9	6	7	4,68
2	% Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen)	%	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	15,6
3	% KDRT	%	0,95	2	2	2	2	0,045

4	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase perempuan dan anak korban perdagangan orang yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak	%	25	32,5	37,5	45	62,5	70
7	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak	Dokumen	0	0	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah provinsi pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** mencakup: pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera. Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama ini belum ada perangkat daerah yang menanganinya. Penanganan dilakukan oleh instansi pusat yaitu BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan dukungan dalam pelaksanaan program KB.

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Peserta KB Aktif di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 283.702 orang, sedangkan peserta KB baru sebanyak 48.829 orang. Sementara itu Unmet Need KB pada tahun 2015 capaiannya sebesar 11,91%, menunjukkan bahwa ada pasangan usia subur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi. Dalam rangka mengurangi unmetneed tentunya perlu ada peningkatan pelayanan KB guna pengendalian pertumbuhan penduduk.

**PUS Peserta KB semua cara** di tahun 2015 sebesar 47,05 %, sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 52,21%. Jumlah PUS yang tidak ber KB di Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi. Paling tinggi di Kota Batam sebesar 60,06% dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 26,84%. Unmetneed KB tahun 2015 sebesar 24,05%, ini dibagi atas unmetneed spacing sebesar 7,36% dan unmetneed limiting sebesar 16,69%. Sementara itu total permintaan berKB sebesar 70,16%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini.

**Tabel 2.11 Persentase Unmetneed, Peserta KB Aktif (CPR) dan Total Permintaan ber-KB Tahun 2015**

No.	Kabupaten/ Kota	Unmetneed			CPR	
		Penjarangan (spacing)	Pembatasan (limiting)	Total Unmetneed	Semua Cara	Cara Modern
1	Karimun	2,38	18,97	21,35	60,83	60,12
2	Bintan	5,80	16,52	22,32	54,44	53,70
3	Natuna	1,78	9,53	11,31	66,69	66,0
4	Lingga	2,83	6,48	9,31	73,16	72,84
5	Kep. Anambas	1,34	4,51	5,85	69,43	68,35
6	Kota Batam	9,38	17,12	26,50	39,94	39,02
7	Kota Tanjungpinang	5,99	21,59	27,58	49,79	47,89
	Provinsi Kepulauan Riau	7,36	16,69	24,05	47,05	46,11

(Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015)

Pemakaian alat kontrasepsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, penggunaan metode kontrasepsi suntikan adalah yang paling diminati. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya persentase PUS berKB yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 56,18%, sedangkan yang terendah adalah metode menyusui alami yaitu sebanyak 0,11%. Sementara itu PUS berKB yang menggunakan metode MKJP sebanyak 15,90%. Persentase pemakaian kontrasepsi tahun 2015 sebesar 46,11%.

**Age Specific Fertility Rate (ASFR)** adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah ASFR, dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan. ASFR tertinggi terjadi pada kelompok usia 25-39 tahun sedangkan TFR di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 2,312. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau TFR tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. TFR pada masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

## **2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Meskipun telah banyak dilakukan kegiatan peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2011-2015.

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2011-2016 menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,96% menjadi 89,23%. Cakupan air minum tentunya perlu ditingkatkan, karena air minum merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk. Sanitasi mencakup air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak bagi penduduk perlu ada peningkatan. Cakupan pelayanan sanitasi layak sebesar 73,01% pada tahun 2015, menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 71,80%. Secara rinci kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12 Capaian Kinerja Aksesibilitas Air Minum dan Sanitasi Layak Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	63,96	64,78	65,50	67,10	88,50	89,23
2	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah domestik, drainase, persampahan) (%)	%	71,80	69,20	71,35	71,50	63,48	65,21

(Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman)

## **2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern**

**Sumber daya mineral** merupakan potensi bahan tambang yang terdapat di alam dan mempunyai sifat tidak terbarukan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi hasil tambang cukup berlimpah. Misalnya saja seperti sumber daya alam mineral yang meliputi bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Kabupaten Natuna, bahan alian B (vital) seperti timah (di Kab. Karimun dan Lingga), bauksit (di Kab. Bintan, Karimun, Lingga, Tanjungpinang), dan pasir besi (di Kab. Lingga, dan Natuna), bahan galian golongan C seperti granit (Kab. Karimun, Bintan, Natuna, Lingga) , pasir dan kuarsa (Kab. Karimun dan Natuna), serta masih banyak lagi bahan tambang lainnya seperti Granulit, Diorit, Andesit, Kaolin, dan lain sebagainya. Potensi terbesar dari beberapa jenis barang tambang yang teridentifikasi adalah Bauksit dan Timah yang masing-masing diperkirakan mencapai 200.000 ton



dan 3.515.000.000 ton. Adapun rencana kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.899 Ha.

Sektor pertambangan dan penggalan, meliputi segala macam kegiatan penambangan baik mineral logam maupun non logam yang ada di Provinsi Kepulauan Riau selain dari Migas. Berdasarkan data dari Provinsi Kepulauan Dalam Angka 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, bahwa sektor ini menyumbang rata-rata sebesar 2,12% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau dari besaran PDRB atas dasar harga berlaku dengan menghilangkan sektor migas dalam jangka tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tetapi dari capaian indikator kinerja, sektor ini terus menunjukkan penurunan. Hal ini dikarenakan penambangan utamanya bauksit dan timah masih berbasis di daratan, sedangkan luas wilayah darat hanya 2% dari total wilayah Kepulauan Riau. Dari tahun ke tahun terjadi pengurangan areal pertambangan yang berproduksi, hal ini menyebabkan penurunan kontribusi terhadap PDRB.

**Berkaitan dengan energi, Rasio Elektrifikasi tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 89,14%.** Rasio ketersediaan daya listrik yang menunjukkan perbandingan antara daya listrik yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan pada tahun 2016 sebesar 74,90%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2011 yang baru mencapai 55,38%. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rangka meningkatkan rasio ketersediaan daya listrik menjadi 100%. Produksi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya pembangunan Pembangkit Listrik menggunakan Potensi Energi Terbarukan.

**Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB*	%	1,19	2,72	2,40	2,20	2,09	2,09
2	Jumlah Pertambangan Tanpa Izin	Lokasi	5	5	5	5	6	6
3	Kontribusi Sektor Migas terhadap PDRB*	%	6,52	14,20	13,88	13,09	12,44	12,4
4	Rasio Elektrifikasi**	%	74	71	79	77	83,72	89,14

(Sumber: BPS Provinsi Kepri dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral)

## 2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010. Pada tahun 2016 tercatat PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 216.579.898,65 juta rupiah.

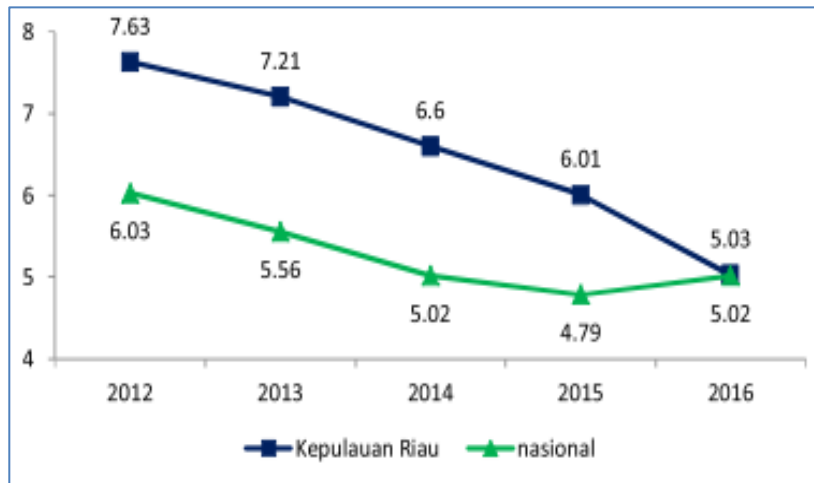
Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 PDRB ADHB dan ADHK menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)**

No.	PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	144.840.792,12	163.261.571,34	180.879.982,55	199.538.590,65	216.579.898,65
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	128.034.968,02	137.263.851,23	146.325.234,58	155.112.884,16	162.922.503,76

(Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017)

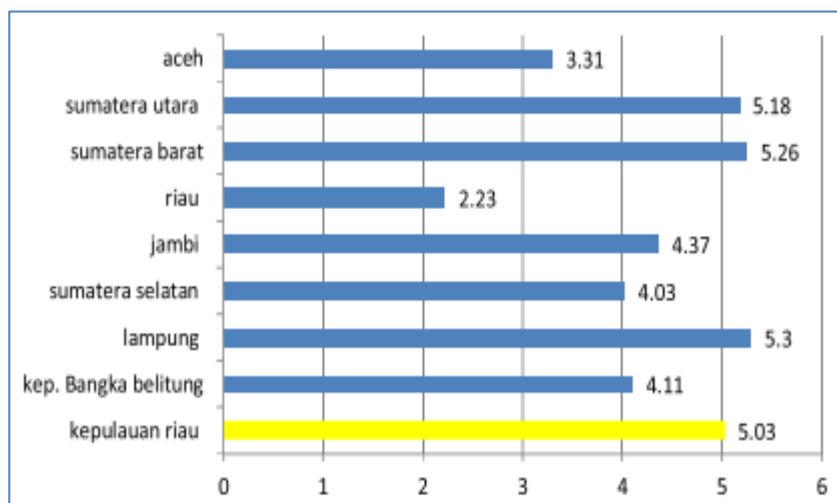
**Pertumbuhan ekonomi** memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,63% terus menurun menjadi 5,03% pada tahun 2016. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Secara lengkap perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada Gambar 2.13.



**Gambar 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2012-2016 (%)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat Tahun 2017

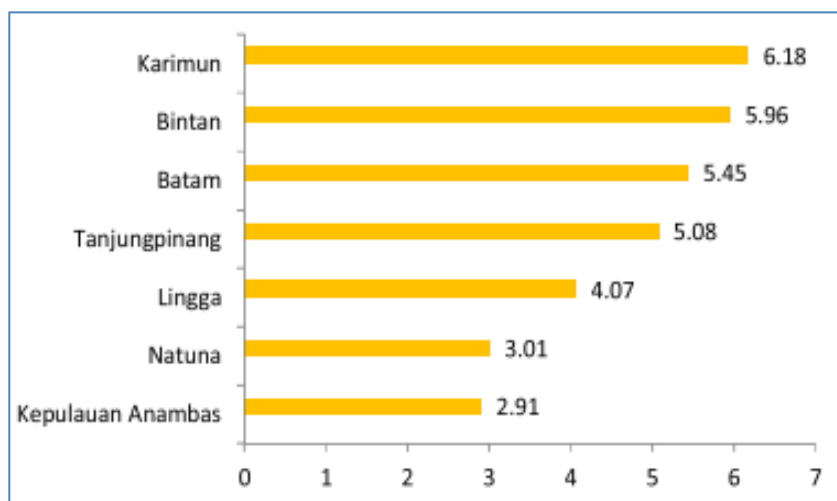
Dibandingkan dengan provinsi lain di Wilayah Sumatera, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi keempat setelah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung. Perbandingan pertumbuhan ekonomi diantara provinsi di wilayah Sumatera, terlihat pada Gambar 2.14.



**Gambar 2.14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (%)**

Sumber: BPS Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2017

**Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota** di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 6,18%, selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 5,96% dan Kota Batam sebesar 5,45%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,91%, seperti terlihat pada Gambar 2.15.



**Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (%)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

**PDRB per kapita** secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 106.785 ribu atau. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 49.644 ribu. Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Tabel 2.15.

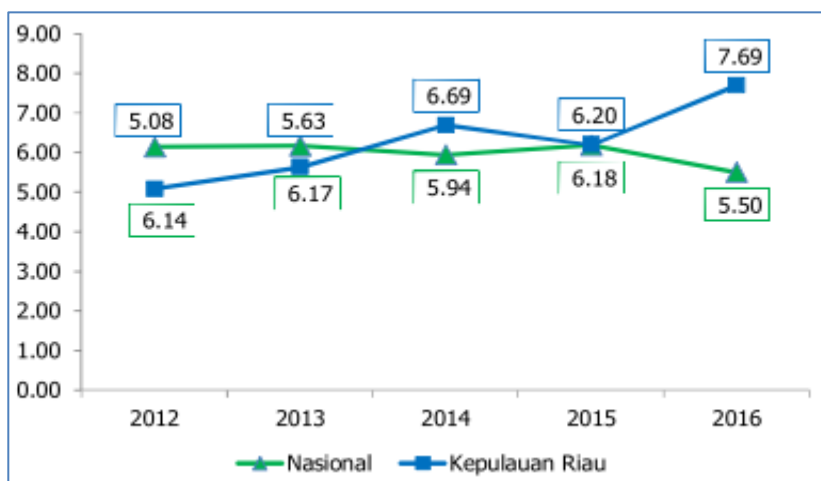
**Tabel 2.15 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016**

No.	PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	49.644	87.630	95.400	103.030	106.785

(BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017)

Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting karena awal keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peningkatan kualitas calon tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 mencapai 931.435 orang, meningkat 39.447 orang dari tahun 2015 sebanyak 836.670 orang. Dari angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sebanyak 859.813 orang dan penganggur sebanyak 71.622 orang. Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 6,14% menjadi 7,69%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,50%.



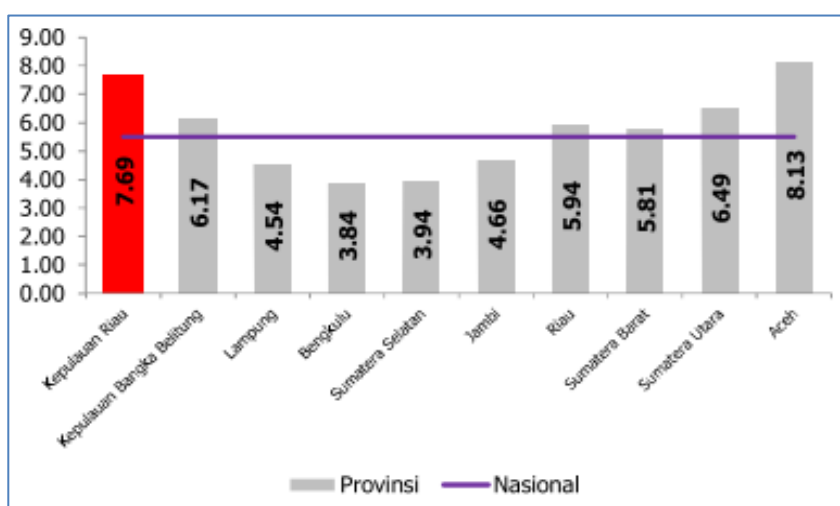
**Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2016**

Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase penduduk angkatan kerja yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 92,31%, menurun dari tahun 2015 sebesar 93,80%, seperti terlihat pada Tabel 2.16 berikut ini.

**Tabel 2.16 Perkembangan Kinerja Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2016**

No.	Uraian	2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	836.670	93,80	859.813	92,31
2	Pengangguran Terbuka	55.318	6,20	71.622	7,69
	Jumlah Angkatan Kerja	891.988		931.435	

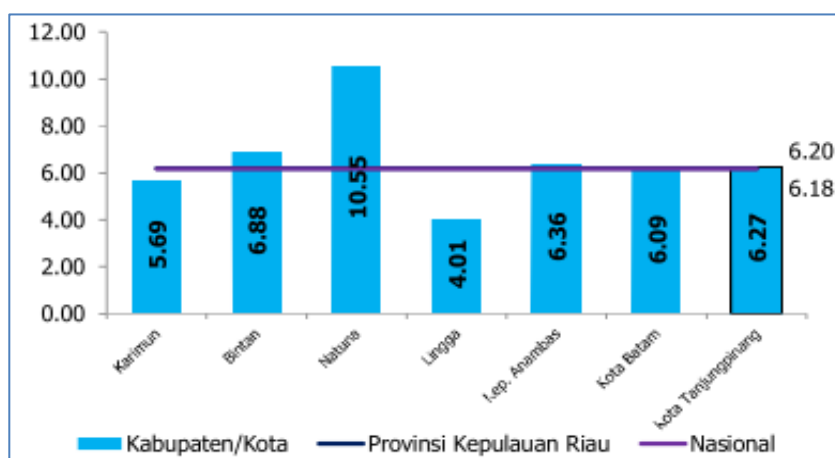
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 mencapai 9,03%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,14%. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi, seperti terlihat pada Gambar 2.17.



**Gambar 2.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (%)**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Dilihat per kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 tertinggi di Kabupaten Natuna, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga, seperti terlihat pada Gambar 2.18.



**Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015**  
 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

**Arahan Kepariwisata** Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari : Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

**Wisatawan Mancanegara** yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016 tercatat sebanyak 1.920.232 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,64% dibanding kunjungan wisman selama Tahun 2012 yang mencapai 1.767.439 orang. Kontribusi jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terhadap jumlah seluruh wisman yang berkunjung ke Indonesia selama Tahun 2016 adalah 16.7 %. Menurunnya jumlah kunjungan wisman selama Tahun 2016 disebabkan turunnya jumlah kunjungan wisman di pintu masuk Kota Batam, yaitu turun sebesar 7,4 % dan Kabupaten Karimun turun sebesar 7,8% Sementara jumlah kunjungan wisman di pintu masuk Kabupaten Bintan naik sebesar 0,5% dan Kota Tanjungpinang naik sebesar 2,2%.

## 2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Kondisi jalan baik di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 69,44% menjadi 71,97% sementara pada tahun 2016 kondisi jalan baik meningkat menjadi 73,50%. Dilihat dari panjangnya, terjadi peningkatan panjang jalan dari 679,49 km pada tahun 2011 menjadi 890,1 km pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No 1.863 Tahun 2016). Secara rinci terlihat pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17 Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2016**

No.	Kabupaten/Kota	2015		2016	
		Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)
1	Karimun	131,60	143,72	133,10	143,72
2	Bintan	100,89	162,77	107,44	139,10
3	Natuna	88,39	143,32	96,97	143,33
4	Lingga	130,83	206,72	133,83	236,72
5	Kota Batam	101,45	112,35	101,45	112,35
6	Kota Tanjungpinang	58,05	70,23	57,93	70,23
7	Kep. Anambas	25,90	51,00	28,16	51,00
	<b>Jumlah</b>	<b>635,31</b>	<b>890,11</b>	<b>658,88</b>	<b>896,45</b>
	<b>Persen Kondisi Baik</b>	<b>71,37%</b>		<b>73,50%</b>	

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan)

Sesuai dengan status jalan provinsi yang baru jumlah jembatan yang akan ditangani oleh Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 161 unit dengan total panjang 4.145,70 meter, sedangkan kondisi baik jembatan ditahun 2016 sepanjang 3.261,23 meter atau 78,67%. Secara rinci terlihat pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18 Jumlah Jembatan dan Kondisi Jembatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Sat	Panjang (Meter)	Kondisi Baik		Kondisi Sedang dan Buruk (%)		
					Panjang (m)	%	Perlu Pemeliharaan (Cat, Pembersihan)	Pergantian Elemen	Pergantian Jembatan (Kondisi Kritis/Pergantian)
1	Karimun	24	Unit	396,20	346,68	87,5	12,50	0,00	0,00
2	Bintan	9	Unit	105,10	35,03	33,3	44,44	22,22	0,00
3	Natuna	26	Unit	445,00	290,94	65,3	11,54	7,69	15,38
4	Lingga	53	Unit	660,70	498,63	75,4	13,21	7,55	3,77
5	Kota Batam	33	Unit	325,40	365,67	94,8	5,12	0,00	0,00
	Jembatan Baru	1	Unit	60,00					
6	Kota Tanjungpinang	5	Unit	725,30	1.597,61	82,9	17,02	0,00	0,00
	Jembatan Baru	1	Unit	1.200,00					
7	Kep. Anambas	9	Unit	228,00	126,68	55,5	22,22	22,22	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>161</b>	<b>Unit</b>	<b>4.145,70</b>	<b>3.261,23</b>	<b>78,6</b>	<b>9,38</b>	<b>8,18</b>	<b>3,77</b>

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan)

Untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana transportasi baik udara, laut dan darat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan wilayah di Kepulauan Riau dimana kondisi wilayahnya merupakan kepulauan. Ketersediaan fasilitas jasa pelayanan di bidang transportasi udara di Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat penting mengingat wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau disamping kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat seiring perkembangan daerah, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang membutuhkan efisiensi waktu.

Untuk mendukung lalulintas perhubungan udara, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 6 bandar udara. Bandar Udara Hang Nadim di Kota Batam sebagai Bandar Udara Pengumpul (hub) dengan skala pelayanan sekunder. Penggunaannya sebagai Bandar Udara Internasional. Ukuran landasan pacu (run way) Bandar Udara Hang Nadim yang ada saat ini adalah 4.025 x 45 meter dan dapat didarati pesawat berbadan lebar sedang jenis Boeing 737-900 atau sekelasnya. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke). Penggunaannya sebagai bandar udara Internasional. Bandar Udara Ranai di Natuna sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke). Penggunaannya sebagai bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (run way) Bandar Udara Ranai yang ada saat ini adalah 2.550 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737-200 atau sekelasnya. Bandar udara Raja Haji Abdullah di Tanjung Balai Karimun sebagai bandar udara pengumpan (spoke). Penggunaannya sebagai bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (run way) Bandar Udara Raja Haji Abdullah yang ada saat ini adalah 1.300 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis ATR 50 atau sekelasnya. Untuk peningkatan fasilitas sisi udara



jangka panjang ukuran landasan akan dikembangkan menjadi 1600 x 30 meter yang akan didarati pesawat jenis ATR 72 atau sekelasnya. Bandar Udara Dabo di Kabupaten Lingga sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke). Penggunaannya sebagai Bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (run way) Bandar Udara Dabo yang ada saat ini adalah 1.300 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis ATR 50 atau sekelasnya. Untuk peningkatan fasilitas sisi udara jangka panjang ukuran landasan akan dikembangkan menjadi 1800 x 45 meter yang akan didarati pesawat jenis ATR 72 atau sekelasnya. Adapun Bandara Matak Kepulauan Anambas difungsikan sebagai Pengumpan (P), dengan penggunaannya sebagai bandara Domestik/Khusus.

**Tabel 2.19 Data Bandar Udara Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016**

No.	Nama Bandara Udara	Kabupaten/Kota	Penggunaan Bandara	Hirarki
1	Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun	Domestik	Pengumpan (P)
2	Matak	Kep. Anambas	Domestik/Khusus	Pengumpan (P)
3	Ranai	Natuna	Domestik	Pengumpul Tersier (PT)
4	Dabo	Lingga (Singkep)	Domestik	Pengumpan (P)
5	Hang Nadim	Kota Batam	Internasional	Pengumpul Sekunder (PS)
6	Raja Haji Fisabilillah	Kota Tanjungpinang	Internasional	Pengumpan (P)

**Jumlah pelabuhan** di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. Kp 414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebanyak 132 unit, dengan rincian sebanyak 15 pelabuhan terdapat di Kota Batam, 36 pelabuhan di Kabupaten Bintan, 12 pelabuhan di Kabupaten Karimun, 4 pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 11 pelabuhan di Kabupaten Lingga, 18 pelabuhan di Kabupaten Natuna dan 28 pelabuhan di Kota Tanjungpinang.

**Keberadaan lalulintas penyeberangan** juga tidak kalah pentingnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 lintasan penyeberangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan menteri perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989, KM 25 Tahun 1991 dan SK 3027 Tahun 2011, yaitu lintas penyeberangan Telaga Punggur-Tanjung Uban (PP), Karimun-Mengkapan (PP), Tanjungpinang-Karimun (PP), Tanjungpinang - Dabo (PP), Dabo-Telaga Pungkur (PP) dan Telaga Punggur-Karimun (PP). Untuk Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Telaga Punggur, Tanjung Uban, Parit Rempak, Dompok, Jagoh dan Selat Belia dengan status beroperasi. Penyelenggaraannya dilakukan oleh PT. ASDP untuk Telaga Punggur dan Tanjung Uban, sedangkan untuk Parit Rempak, Dompok, Jagoh, Penarik dan

Selat Belia dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten.

Untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta angkutan komoditas/barang dari daerah terpencil dan terisoir ke daerah lain atau sebaliknya, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan 3 (tiga) unit kapal Perintis KM. Gunung Bintang dengan ukuran GRT 990, kapasitas penumpang 350 orang dan barang 300 ton, dan KM. Sabuk Nusantara 30 dan 39 dengan ukuran GRT 1.200, kapasitas penumpang 400 orang dan barang 50 ton yang berpangkalan di Tanjungpinang dan Kijang.

Berkaitan dengan perhubungan darat, **jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi menunjukkan peningkatan** dari sebanyak 1.985 unit pada tahun 2011 menjadi 2.412 unit pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, terjadi peningkatan sarana seperti rambu-rambu lalu lintas, Marka jalan, APILL, Guard rail, Paku marka jalan, Delineator, RPPJ, Warning light, ZOSS, Cermin tikungan dan ATCS. Tentunya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditingkatkan dengan memperhitungkan kebutuhan prioritas guna pemerataan pembangunan wilayah.

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki posisi yang cukup penting dalam perekonomian daerah. Kewenangan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, mencakup: Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberian Izin KSP/USP, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pengembangan UKM.

Kinerja berkaitan dengan Pembinaan dan Pemberdayaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dapat dilihat dari persentase koperasi aktif. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat (menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI nomor:23/per/M.KUKM/IX/2015). Capaian persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi dari sebesar 74,26% pada tahun 2011 menjadi 49,00% pada tahun 2015, dan jumlah koperasi yang dibina pada kisaran 410 hingga 470 koperasi.

Kinerja berkaitan dengan Pemberdayaan dan Pengembangan UKM dapat dilihat dari jumlah UKM dan jumlah UKM yang dibina. Jumlah Usaha kecil

dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dari sebanyak 61.771 unit pada tahun 2011 menjadi sejumlah 70.738 unit pada tahun 2013 kemudian menurun menjadi 58.379 unit pada tahun 2016. Peningkatan paling pesat terutama pada kelompok usaha skala mikro dan kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha kecil cukup berperan penting dalam perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kendala utama yang paling dirasakan oleh pengelola Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak berkisar pada bidang permodalan, manajerial usaha, jejaring pemasaran dan inovasi pengembangan produk. Jumlah UKM yang dibina menunjukkan peningkatan dari sebesar 500 orang pada tahun 2011 menjadi 1.276 orang pada tahun 2016.

Secara rinci pencapaian kinerja indicator urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.20 dibawah ini.

**Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

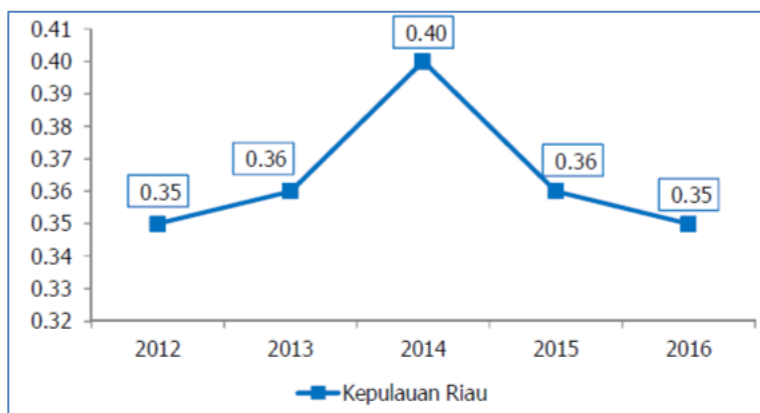
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	1.946	2.069	2.228	2.302	2.308	2.355
2	Persentase Koperasi aktif	%	74,26	69,16	71,59	65,46	49,00	49,00
3	Jumlah koperasi yang dibina	Unit	470	410	438	470	425	120
4	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Unit	NA	66.090	70.738	58.379	58.379	58.379
5	Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	Unit	500	725	1.148	592	9.990	1.276

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM)

## 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

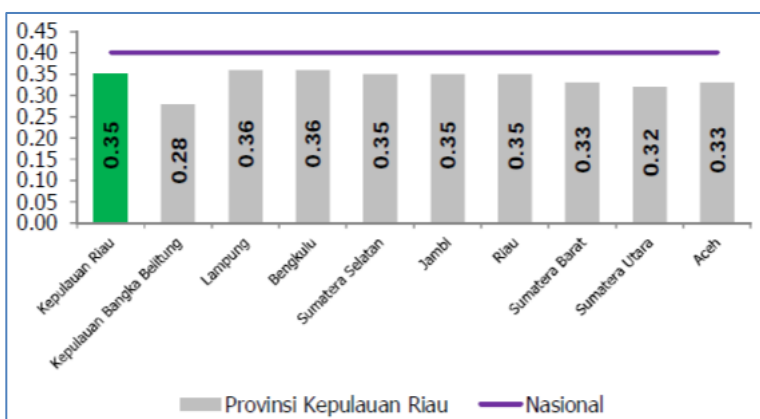
**Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat.** Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2012–2015 stabil dari sebesar 0,35 pada tahun 2011 menjadi 0,35 pada tahun 2016. Angkaini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang

kaya). Perkembangan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut ini.



**Gambar 2.19 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016**  
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera, indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung, Bengkulu, namun. Secara rinci perbandingan indeks gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.20.



**Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016**  
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

## 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk di perkotaan. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa); Peningkatan

aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman serta penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh. Pada Tabel 2.21 disajikan luas kawasan kumuh per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 2.21 Luas Kawasan Kumuh per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dan Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh
1	Karimun	49,76
2	Bintan	98,01
3	Natuna	60,12
4	Lingga	242,16
5	Kota Batam	177,99
6	Kota Tanjungpinang	150,14
7	Kep. Anambas	45,26
	Total	823,44

(Sumber: SK Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau)

Meskipun telah banyak dilakukan kegiatan peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun persentase kawasan kumuh yang ditangani mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2011-2015 pada tabel 2.22 berikut ini.

**Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase luas kawasan kumuh/lingkungan permukiman/perumahan yang ditangani	%	39,72	42,76	45,79	49,19	52,71	52,71

(Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman)

## 2.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

*Sustainable Consumption and Production* (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan Johannesburg Plan of Implementation tahun 2002 dan Konferensi United Nations Conference on Sustainable Development (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "The Future We Want" yang merupakan hasil

Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan 10 Year Framework of Programme on SCP (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional.

Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi), (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, (3) kriteria ecolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan, (4) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (5) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (green banking), serta (6) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah program penilaian terhadap upaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). PROPER diberikan dalam bentuk peringkat kinerja Hitam (sengaja dan lalai), Merah (tidak sesuai aturan), Biru (sesuai aturan), Hijau (melampaui syarat/aturan), dan Emas (keunggulan/peduli lingkungan). Jumlah perusahaan di Lampung yang menjadi peserta PROPER di tahun 2016 sebanyak 59 perusahaan dan ditargetkan peningkatan kepersetaan hingga 84 perusahaan di tahun 2019. Secara ringkas, tantangan pemerintah daerah adalah mendorong pergeseran pola konsumsi dan produksi menuju pola yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendorong tumbuhnya kapasitas industri barang dan jasa serta inovasi IPTEK yang ramah lingkungan. Bentuk kebijakan yang dapat dirumuskan antara lain meminimalisir penggunaan pestisida dalam pertanian, mengurangi penggunaan kemasan plastik, hingga penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah.

### **2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan**

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mencakup penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota; penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur; pembinaan PPNS provinsi;

penanggulangan bencana provinsi; dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, persentase Kabupaten/Kota yang tangguh bencana mengalami peningkatan dari 14,24% pada tahun 2011 menjadi 57,14% pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2011-2016 Persentase kejadian bencana kab/ kota yang tertangani dengan baik sebesar 100%. Secara rinci kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini.

**Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Pelindungan Masyarakat Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Kabupaten/Kota yang tangguh bencana di Provinsi Kepulauan Riau	%	14,29	28,57	28,57	42,86	57,14	57,14
2	Persentase kejadian bencana kab/ kota yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepri)

## 2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan, luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2.367,6 km sedangkan luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km<sup>2</sup>. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya) wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Sebagai provinsi dengan wilayah kepulauan, potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Potensi yang paling menonjol adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat dari tahun 2011 sebanyak 208.756 ton, menjadi sejumlah 375.441,66 ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap sejumlah 303.411,28 Ton atau penurunan sekitar 19,18% dari tahun 2015, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium beberapa jenis alat tangkap yang dominan dipergunakan nelayan di Kepulauan Riau.

**Tabel 2.24 Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh
1	Karimun	73,693.13
2	Bintan	51,870.00
3	Natuna	81,382.51
4	Lingga	33,647.00
5	Kota Batam	32,670.53
6	Kota Tanjungpinang	1,360
7	Kep. Anambas	28,788.11
<b>Jumlah/Total</b>		
	<b>2016</b>	<b>303,411.28</b>
	2015	380,064.47
	2014	406,395.00
	2013	392,638.90
	2012	360,560.00
	2011	308,355.00

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan)

Komoditas unggulan dari hasil tangkapan nelayan di Kepulauan Riau meliputi kelompok pelagis besar (ikan tongkol dan tenggiri), Kelompok pelagis kecil (ikan teri, selar, kembung), kelompok ikan demersal (bawal putih, bawal hitam, kakap putih, belanak dan kurau), kelompok ikan karang (ekor kuning/pisang-pisang, kakap merah, kerapu karang dan ikan baronang), kelompok kustase (udang putih, kepiting dan rajungan) serta kelompok moluska (kerang-kerangan dan cumi-cumi).

Aktivitas perikanan tangkap secara umum untuk tiap komoditas-tersebut terbagi dalam beberapa kriteria yaitu optimalisasi pemanfaatan untuk mencapai produksi optimal, pengembangan dengan hati-hati terhadap stok yang ada, dan moratorium. Hasil analisis untuk tiap kabupaten/kota berdasarkan pendekatan dataproduksi aktual dengan potensi stok menurut DKP RI 2010, maka pemanfaatan perikanan tangkap untuk kabupaten/kota yang perlu dilakukan moratorium penangkapan adalah di Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan tingkat pemanfaatan perikanan telah melebihi potensi lestarnya. Sementara itu di kabupaten lainnya, yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga masih berpotensi dikembangkan (dioptimalkan) dengan prinsip kehati-hatian.

## **2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan**

**Luas kawasan hutan** di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6/06/1986, Keputusan Menteri No. 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Kotamadya Batam Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat GIS



seluas 847.255,47 ha. Dari luasan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi atas hutan konservasi seluas 2.401,56 ha, hutan lindung seluas 35.967,25 ha, hutan produksi terbatas seluas 354.926,73 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 453.959,93 ha. Kondisi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tahun 2016 ini tercatat mengalami kerusakan sebesar 0,20% dari luasan yang ada. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perambahan hutan dan tidak optimalnya korporasi berbasis tanaman industri dalam pengelolaan hutan. Tingkat kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercatat saat ini sudah mencapai 0,10% dari total luas lahan hutan dan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Riau.

**Hutan merupakan sumberdaya yang penting dan memiliki peran dalam perekonomian daerah.** Walaupun perannya besar dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, namun kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat kecil. Kontribusi sektor kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 0,10%. Sektor kehutanan memberikan kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan dari sub-sektor hutan yang menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya dan sub-sektor industri pengolahan hasil hutan. Perkembangan kondisi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut.

**Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,05	0,10
2	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3	Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB	%	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,03	0,03

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan)

## **2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh**

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mencakup penanganan gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota; penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur; pembinaan PPNS provinsi; penanggulangan bencana provinsi; dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat capaiannya perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi sebanyak 4.892 kasus pada tahun 2015 dan sebanyak 4.885 kasus pada tahun 2016. Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi, maka peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan, termasuk dengan melakukan pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang bertugas sebagai Linmas. Kinerja angka gangguan trantib yang tertangani capaiannya sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut ini.

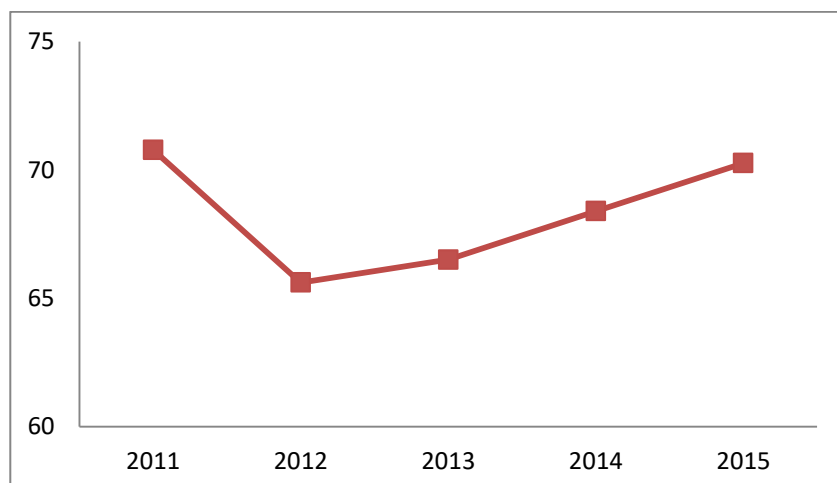
**Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2011-2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kriminalitas	Kasus	NA	NA	NA	NA	4.892	4.885
2	Angka gangguan trantib yang tertangani	%	70	70	75	75	78	100
3	Jumlah Forum yang terbentuk dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau	Forum	2	3	3	3	3	3
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	1	2	2	2	2
5	Persentase konflik social tertangani	%	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan	Kelompok	24	24	24	24	24	24

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	kebangsaan							
7	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)	%	-	-	-	Pileg: 71,65; Pilpres: 59,43	Pilgub: 55,25	-
8	Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kegiatan	1	2	3	1	1	1
9	Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepulauan Riau	Indeks	70,78	65,61	66,5	68,39	70,26	NA

(Sumber: Badan Kesbangpol, Satpol PP)

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Diketahui terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 65,61% dari 70,78% pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya IDI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2015 mencapai 70,26%. Gambaran perkembangan IDI di Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015**

Sumber: Badan Kesbangpol, Satpol PP

## 2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Untuk mendukung **jaringan komunikasi yang baik**, jumlah unit jaringan komunikasi juga harus mencukupi. Capaian indikator persentase SKPD memiliki akses layanan internet (terhubung jaringan LAN-WLAN) pada tahun 2015 baru mencapai 86%, tentunya kedepan perlu ada peningkatan

penyediaan jaringan komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, capaian indikator persentase jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain yang terkelola dengan baik dengan informasi yang terkini capaian pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Sementara itu persentase website SKPD telah memiliki sub domain resmi capaiannya masih rendah yaitu 29% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum seluruh SKPD memiliki sub domain resmi sebagai media penyebarluasan informasi publik.

Berkaitan penyebarluasan informasi, jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi, baru 100 media yang terdaftar sampai pada tahun 2015. Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik baru 4 saluran sampai pada tahun 2015.

**Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau Tahun 2011-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase website SKPD telah memilikisub domain resmi	%	4	14	18	27	29
2	Persentase SKPD memiliki Akses layanan Internet (terhubung Jaringan LANWAN)	%	45	49	61	65	86
3	Persentase Jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain yang terkelola dengan baik dengan informasi yang uptodate	%	50	71	78	85	100
4	Jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi	Media	68	75	87	92	100
5	Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik)	Saluran	3	3	3	4	4

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika)

Di Kepulauan Riau, capaian kinerja urusan statistik dapat diukur dari beberapa indikator seperti jumlah ketersediaan data dan informasi daerah dengan capaian setiap tahunnya sebanyak 2 dokumen, persentase keterisian data SIPD sebanyak 58,25% dan jumlah sistem informasi daerah sebanyak 2 aplikasi dan jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial sejumlah 2 dokumen.

## BAB III

### TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs



#### 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Starategi yang terdapat didalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 untuk mencapai target mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah : (1). Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa; (2) Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif; (3). Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi dan Peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan- kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, (4) Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi. (5) Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman; (6) Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih; (7) Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

Kebijakan Tujuan 1. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah : (1) Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial; (2) Pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; (3) Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular (4). Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik; (5) Pemerataan infrastruktur berkualitas, dengan fokus pada pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih; pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; (6) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam dengan fokus pada peningkatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Program tujuan 1. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: 1). Program Perencanaan sosial budaya terdiri atas 22 kegiatan; 2). Program Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 6 kegiatan; 3). Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas 9 kegiatan; 4) Program Pelayanan Kesehatan terdiri atas 4 kegiatan; 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas 3 kegiatan; 6) Program Perlindungan dan Pengembangangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas 4 kegiatan; 7) Program Kesehatan Masyarakat terdiri atas 7 kegiatan; 8) Surveilans dan Karantina kesehatan terdiri atas 2 kegiatan; 9) Keluarga Berencana terdiri atas 4 kegiatan; 10) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 1 kegiatan; 11) Mutu Pendidikan terdiri atas 2 kegiatan; 12) Program Pegelolaan tenaga kelistrikan terdiri atas 1 kegiatan; 13) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana terdiri atas 5 kegiatan; 15) Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup terdiri atas 2 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 1. Target Pencapaian indikator 1 bisa dilihat pada tabel 3.1. Program dan Kegiatan Tujuan 1 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Sosial- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Sosial –Matriks 2.



**Tabel 3.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>											
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan jenis kelamin	BPS RPJMD	% (kondisi Maret)	6,24	5,98	6,06	6,07	5,98	5,83	5,68
<b>Target 1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.</b>											
1.3.1(a)	Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Cakupan penerima Jamkesmas dan Jamkesda/BPJS orang miskin/KIS	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah orang	150.796	418.454	445.364	PM	PM	PM	PM
1.3.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	25,01	30,62	33,54	40,62	40,78	40,98	41,47



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.</b>											
1.4.1(a)	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (kelompok penduduk 40% terbawah)	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	BPS	%	77,95	89,9	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1(b)	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (kelompok penduduk 40% terbawah)	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Persentase peserta KB yang menggunakan semua cara	BKKBN	%	46,11	44,27	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki Akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (kelompok penduduk 40% terbawah)	Persentase masyarakat yang mampu mengakses air minum	BPS	%	69,77	69,85	83,95	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (kelompok penduduk 40% terbawah)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	55,81	65,59	86,33	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (kelompok penduduk 40% terbawah)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	99,56	98,68	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	82,79	73,74	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	65,61	69,29	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</b>											
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	org	57	118	100	150	150	150	150
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Dinas Sosial	org	-	118	100	150	150	150	150
1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	RPB Provinsi Kepri	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>											
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BPKAD	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok Pendidikan sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Milyar Rupiah	544,46	655,13	925,09	PM	PM	PM	PM
		Pengeluaran untuk layanan pokok Kesehatan sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Milyar Rupiah	223,96	193,04	334,17	PM	PM	PM	PM
		Pengeluaran untuk layanan pokok Perlindungan sosial sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan :

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)



### **3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi serta menggandakan produktivitas pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi untuk mencapai target menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan seperti yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah (1). Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; (2). Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan; (3). Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.

Kebijakan Tujuan 2. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan adalah: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor Pertanian, dan peningkatan kinerja sektor Pangan; (2) Peningkatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

Program tujuan 2. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: 1) Program Kesehatan Masyarakat terdiri atas 6 kegiatan; 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri atas 3 kegiatan; 3) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan terdiri atas

6 kegiatan; 4) Program peningkatan kesejahteraan Petani terdiri atas 7 kegiatan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri atas 6 kegiatan; 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri atas 1 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 2. Target Pencapaian indikator 2 bisa dilihat pada tabel 3.2. Program dan Kegiatan Tujuan 2 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Sosial- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Sosial –Matriks 2.



**Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator tujuan 2 Tanpa Kemiskinan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun</b>											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	BPS			PM	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	17	17,7	16,4	17,1	16,8	16,5	16,2
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	BPS	%	26,53	22,76	10,79	17,32	17,19	17,06	16,93

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025</b>											
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	Riskesdas dan PSG	%	22,9	22,9	21	21,35	20,85	20,35	20
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	PSG	%	12	15,6	14,2	10,5	10	9,5	9
		Prevalensi obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas	PSG	%	2,7	2,1	2,8	PM	PM	PM	PM
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH	BPS, diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Skor	83,8	83,4	88,7	91	92	93,5	94



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.</b>											
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS, Sakernas	Rp/tenaga Kerja	76.720	74.588	104.948	107.625	110.096	112.787	115.436

Keterangan:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)



### 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 10 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi untuk mencapai target Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia adalah: (1). Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; (2) Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit

Kebijakan Tujuan 3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia adalah: (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; (2) Pemantapan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program tujuan 3. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: 1) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas 24 kegiatan; 2) Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 1 kegiatan; 3) Pengendalian penyakit tidak menular terdiri atas 3 kegiatan; 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas 5 kegiatan; 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan terdiri atas 4 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 3. Target Pencapaian indikator 3 bisa dilihat pada tabel 3.3. Program dan Kegiatan Tujuan 3 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Sosial- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Sosial -Matriks 2.



**Tabel 3.3 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</b>											
3.1.1*	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan, Renstra Dinkes, dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 100.000 kelahiran hidup	146,53	109,61	125,19	131	130	129	128
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil (Susenas)	Laporan Rutin Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri	%	93	93,19	94,1	82	85	87	90

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kematian Hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH</b>											
3.2.1*	Angka Kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	11,48	8,43	7,88	PM	PM	PM	PM
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	7,79	5,37	6,28	PM	PM	PM	PM
<b>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya</b>											
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Prevalensi HIV	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	0,38	0,07	0,07	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	per 100.000 penduduk	145	171	261	PM	PM	PM	PM
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	API ( <i>Annual Paracite Incidence</i> ) per 1.000 penduduk (Kejadian Malaria per 1.000 orang)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	per 1000 penduduk	0,41	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).	Dinas Kesehatan	%	52,6	60	75	PM	PM	PM	PM
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).	Profil Kesehatan	per 10.000 penduduk	0,49	0,5	0,4	PM	PM	PM	PM
<b>3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan</b>											
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	Persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	%	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	37,3	9,9	11,8	28,5	28,3	28,1	27,9
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	42,7	3,37	13,76	18	17	16	15,5
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	12	30	31	PM	PM	PM	PM
<b>Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan</b>											
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	726	117	618	120	130	140	150
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	163	265	192	100	110	120	130
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	LAKIP dan RENSTRA BNN	%	2,74	0	1,71	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional</b>											
3.7.2*	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate/ ASFR</i> )	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate/ ASFR</i> )	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>											
3.8.1(a)	<i>Unmeet need</i> pelayanan kesehatan	<i>Unmeet need</i> pelayanan kesehatan	BPS	%	3,12	3,1	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara secara tepat</b>											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	26,9	27,49	PM	PM	PM	PM	PM
<b>3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang.</b>											
3.b.1(a)	Peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	69,29	75,5	81,14	81	82	85	87



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan, pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang</b>											
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Sumber : Profil Kesehatan)										
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,19	0,16	0,21	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,42	0,38	0,36	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,12	0,09	0,09	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi perawat	Kepadatan dan distribusi perawat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	1,93	1,88	1,85	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,04	0,04	0,05	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi bidan	Kepadatan dan distribusi bidan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,89	0,91	0,95	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,07	0,07	0,07	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,6	0,07	0,07	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,23	0,03	0,03	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisan medis	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisan medis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,03	0,25	0,24	PM	PM	PM	PM
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0,1	0,12	0,12	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)



### 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berkualitas Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai target Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua adalah: (1). Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi; (2). Peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan- kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; (3). penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengembangkan SMK kemaritiman

**Kebijakan Tujuan 4.** Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs adalah Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah.

Program tujuan 4. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: 1). Program Pendidikan Menengah dan Khusus terdiri atas 11 kegiatan; 2). Program Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas 2 kegiatan; 3). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 2 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 4. Target Pencapaian indikator 4 bisa dilihat pada tabel 3.4. Program dan Kegiatan Tujuan 4 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Sosial- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Sosial –Matriks 2.



**Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar</b>											
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BPS	%	32,33	32,18	31,39	PM	PM	PM	PM
<b>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas</b>											
4.3.1(a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%		85,17	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
4.3.1(b)	Persentase APK Perguruan Tinggi (PT)	Persentase APK Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	21,14	18,21	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan</b>											
4.4.1*	Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan	Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan</b>											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS	%	99,13	99,81	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	BPS	%	100,49	106,05	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	71,16	74,86	75,22	76,00	76,50	77,00	77,50
	Rasio APM perempuan/laki-laki di PT dan PTA sederajat	Rasio APM perempuan/laki-laki di PT dan PTA sederajat	BPS	%	141,23	124,05	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>											
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	BPS	%	98,79	98,84	PM	PM	PM	PM	PM
<b>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua</b>											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))										
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (a) listrik	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	87	90	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (a) listrik	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	94	96	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (a) listrik	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	100	100	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	80	86	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke:(b) internet untuk tujuanpengajaran	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke:(b) internet untuk tujuanpengajaran	Dapodik	%	NA	82	88	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	94	96	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	70	85	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	75	88	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	80	86	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	NA	65	70	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	70	75	PM	PM	PM	PM
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	75	80	PM	PM	PM	PM



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	65	70	PM	PM	PM	PM
<b>4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>											
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB yang bersertifikat pendidik	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB yang bersertifikat pendidik	Profil Disdik	%	50,05	53,54	65,98	67	68	70	72
	<b>Jenjang Pendidikan Menengah</b>	<b>Jenjang Pendidikan Menengah</b>									
	Persentase Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	86,00	84,00	86,00	88,00	90,00	93,00	95,00
	Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	19,20	22,94	-	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	58,69	75,44	-	PM	PM	PM	PM
	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	78,23	83,53	-	PM	PM	PM	PM
	Persentase Guru SMA yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SMA yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90,14	90,16	96,61	97,5	98	99	100
	Persentase Guru SMK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SMK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90,5	93,29	91,56	93	94	95	98
	Persentase Guru SLB yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Persentase Guru SLB yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	35,46	42,34	73,56	75	77	78	80

Keterangan:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)



### 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan serta meningkatkan penggunaan teknologi untuk pemberdayaan perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs adalah dengan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

Program tujuan 5. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: 1). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak terdiri atas 1 kegiatan; 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah terdiri atas 1 kegiatan; 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terdiri atas 8 kegiatan; 4). Program Perlindungan Anak terdiri atas 10 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 5. Target Pencapaian indikator 5 bisa dilihat pada tabel 3.5. Program dan Kegiatan Tujuan 5 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Sosial- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 5 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Sosial –Matriks 2.



**Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>											
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	dokumen	11	1	-	1	-	1	-
<b>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah Kasus perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	UPTD P2TP2A	orang	96	57	32	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
5.2.2*	Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian	Kasus perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian	UPTD P2TP2A	kasus	29	21	1	100	100	100	100
<b>Target 5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan</b>											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	BPS	PM	1,52	0,21	PM	PM	PM	PM	PM
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun	BPS	PM	11,73	15,32	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif , dan kesempatan yang sama untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat</b>											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah	DP3AP2KB PROVINSI KEPRI	%	3,09	3,09	3,09	3,09	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah eselon 2	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>											
5.b.1	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### 3. 6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses universal dan merata terhadap air minum, akses sanitasi dan kebersihan yang memadai, peningkatan kualitas air serta efisiensi penggunaan air di semua sektor, pengelolaan sumber daya air terpadu dan melindungi serta merestorasi ekosistem terkait sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Tujuan 6 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 antara lain: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, dan sanitasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, (2) Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis dan mendorong Kabupaten/Kota dan swasta dalam pengembangan RTH.

Arah Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan fokus pada pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase), pemerataan sarana prasarana air bersih, serta peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 6 yaitu Program: (1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum yang terdiri dari 18 kegiatan, (2) Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari 2 kegiatan, (3) Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 10 kegiatan, (4) Pengendalian dan Penegakan Hukum bagi penggunaan air tanah yang terdiri dari 1 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 6. Target Pencapaian indikator 6 bisa dilihat pada tabel 3.6. Program dan Kegiatan Tujuan 6 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan- Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan –Matriks 2.



**Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</b>											
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	84,12	85,31	83,95	PM	PM	PM	PM
6.1.1. (b)	Kapasitas sarana dan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas sarana dan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Pola PSDA WS Kep. Riau	m <sup>3</sup> /detik	0,04	0,165	0,005	0,005	0,65	0,4	0,04
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	BPS	%		PM	PM	PM	PM	PM	PM



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>											
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS	%		81,86	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	BPS	%	71,97	79,55	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Desa	215	262	292	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	Desa	30	30	48	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	data dokumen SSK (strategi sanitasi Kabupaten/ Kota)	kota/ kab	7	7	7	7	7	7	7
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	data dokumen SSK (strategi sanitasi Kabupaten/ Kota)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</b>											
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	data dokumen SSK (strategi sanitasi Kabupaten/Kota)	kota/kab	3	4	4	4	4	5	5
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	data base infrastruktur Cipta Karya (data cek kembali)	persen	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</b>											
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Laporan KemenESDM	Kegiatan	-	-	-	1	0	1	1
<b>Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat</b>											
6.5.1(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BP Dashl	RPDAS	1	-	-	1	PM	PM	PM
6.5.1.(c)	Jumlah Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	1	1	2	1	1	1

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BP Dashl	Hektar	425	125	225	175	175	PM	PM
6.5.1.(g)	Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air	Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	2	1	8	13	13	3	3
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	BP Dashl		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	1	2	1	3	2	3
<b>Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau</b>											
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	BP Dashl	Hektar	200	200	243	200	300	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### **3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 3 Indikator. Target-target tersebut antara lain memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern serta meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Tujuan 7 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan tahun 2016-2021 adalah Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang diwujudkan melalui arah kebijakan pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 7 yaitu Program: (1) Pengelolaan Ketenagalistrikan yang terdiri dari 4 kegiatan, (2) Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi yang terdiri dari 2 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 7. Target Pencapaian indikator 7 bisa dilihat pada tabel 3.7. Program dan Kegiatan Tujuan 7 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 7 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi –Matriks 2.



**Tabel 3.7 Target Pencapaian dan Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern</b>											
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	DESDM	%	83,72	89,14	89,15	90,5	91,5	92,5	93,5
7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita	Listrik perkapita	BPS	Kwh/ Kapita	332,18	348,10	1.355,53	581,20	588,43	595,36	609,97
<b>7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global</b>											
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	DESDM	%	9%	10%	10%	10%	11%	12%	13%





### **3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 7 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut meliputi pencapaian tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua, mengurangi proporsi pemuda yang tidak produktif, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan serta Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Tujuan 8 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan tahun 2016-2021 antara lain: (1) Mengembangkan Program kemitraan antara pemerintah dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), dan pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi. (2) Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa. (3) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM, (4) Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. (5) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan, (6) Meminimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut. (7) Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal. (8) Meningkatkan promosi potensi wisata Kepulauan Riau dengan memperbanyak ragam event dan destinasi wisata dan pemanfaatan media dan teknologi informasi.

Arah Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan 8 antara lain (1) peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan industri pengolahan, pengembangan perdagangan, peningkatan profesionalisme tenaga kerja, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan hasil olahan perikanan. (2) Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dengan fokus salah satunya pada optimalisasi pengembangan pariwisata bahari.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada tujuan 8 antara lain Program: (1) Perencanaan Perekonomian, (2) Pengembangan Data/Informasi, (3) Penelitian dan Pengembangan, (4) Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan, (5) Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM, (6) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, (7) Pengembangan Pemasaran Pariwisata, (8) Pengembangan Ekonomi Kreatif, (9) Pengembangan Destinasi Pariwisata, (10) Pengembangan Pemasaran Pariwisata, (11) Pengembangan Industri Pariwisata, serta (12) Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.

Target Indikator Tujuan 8. Target Pencapaian indikator 8 bisa dilihat pada tabel 3.8. Program dan Kegiatan Tujuan 8 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 8 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi -Matriks 2.



**Tabel 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</b>											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	6,01	5,03	PM	PM	PM	PM	PM
8.1.1(a)	PDRB Per kapita	PDRB per kapita (juta)	BPS	Juta	101	107	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</b>											
8.2.1*	Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja	Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>											
8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	22,1	28,3	27,26	27,12	27,03	26,98	26,85
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	71,9	66,2	68,51	70.82	73.13	75.44	77.75

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	76,49	74,25	75,42	76.59	77.76	78.93	80.01
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase akses UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	%	6,09	30,59	23,14	25,94	PM	PM	PM
<b>Target 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</b>											
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam kerja	BPS	%	18.796	18.595	19.653	21.365	23.081	23.773	24.486
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,20 laki-laki : 6,10 % Perempuan : 6,41 %	7,69 laki-laki : 7,54 % Perempuan : 7,97 %	7,16 laki-laki : 7,14 % Perempuan : 7,19 %	7,22 laki-laki : 5,10 % Perempuan : 10,88 %	7 laki-laki : 4,91 % Perempuan : 10,60 %	6,83 laki-laki : 4,77 % Perempuan : 10,36 %	6,65 laki-laki : 4,62% Perempuan : 10,12 %
					Usia 15-24 : 21,98 % Usia 25 : 3,36 %	Usia 15-24 : 22,31 % Usia 25 : 5,48 %	Usia 15-24 : 16,63 % Usia 25 : 5,06 %	Usia 15-24 : 20,75% Usia 25 : 4,53 %	Usia 15-24 : 20,57 % Usia 25 : 5,60 %	Usia 15-24 : 19,99 % Usia 25 : 3,38 %	Usia 15-24 : 34,9 1% Usia 25 : 3,58 %

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
8.5.2(a)	Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	3,52	2,85	4,22	4,15	4,05	3,95	3,87
<b>Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan</b>											
8.6.1*	Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	RENSTRA DISNAKE RTRANS	%	14,88	15,12	16,12	15,88	15,65	15,43	15,10
<b>8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal</b>											
8.9.1(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	BPS RPJMD	Juta Orang	2,04	1,92	2,07	2,25	2,30	2,40	2,50
8.9.1(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	KEMENPAR/ DISPAR	Juta Orang	1,45	1,48	2,89	1,54	1,57	1,60	1,63

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
8.9.1(c)	Penerimaan Devisa	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	BPS/ KEMENPAR/ DISPAR	Jumlah Penerimaan devisa	NA	NA	NA	6.918.750.000.000	7.245.000.000.000	7.740.000.000.000	8.250.000.000.000
<b>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</b>											
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah ATM	OJK Prov. Kepri	Unit	1.372	1.391	1.435	PM	PM	PM	PM
	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah Bank Umum (termasuk KP, KC, KCP, dan KK)	OJK Prov. Kepri	Unit	351	356	357	PM	PM	PM	PM
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (BankUmum) (Km)	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (BankUmum) (Km)	BPS	Km	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### **3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 4 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari (1). mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua; (2). Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang; (3). Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (4). Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020;

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Adapun strategi untuk mencapai target Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi adalah :

1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
3. Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih
4. Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi adalah :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase);
2. peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi.
4. Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor perindustrian.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pada Tujuan 9 adalah Program : (1). Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan jembatan yang terdiri dari 7 kegiatan, (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas 8 kegiatan (3). Pembangunan Transportasi Laut yang terdiri dari 5 kegiatan, (4). Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut yang terdiri dari 7 kegiatan, (5). Pengembangan Industri Unggulan yang terdiri dari 2 kegiatan, (6). Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari 52 kegiatan, (7). Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 69 kegiatan, (8). Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017) yang terdiri dari 1 kegiatan, (9). E-government yang terdiri dari 2 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 9. Target Pencapaian indikator 9 bisa dilihat pada tabel 3.9. Program dan Kegiatan Tujuan 9 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 9 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi -Matriks 2.



**Table 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	Panjang jalan Provinsi baik	Dinas Pu, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	71,37	66,21	67,3	69,73	71,49	73,24	75,00
		Panjang jalan kondisi jelek		%	28,63	33,79	32,7	30,27	28,51	26,76	25,00
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis	Dishub Kepri	UNIT	20	20	22	25	28	31	34
<b>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>											
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	%	38,36	37,75	PM	PM	PM	PM	PM
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	%	35,00	25,23	33,04	24,52	23,88	23,29	33,30

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi</b>											
9.4.1	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>											
9.c.1(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	74,17	73,77	PM	PM	PM	PM	PM
9.c.1(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS	%	37,02	41,20	48,35	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara”. Dalam rangka mencapai tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari (1). secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, (2). memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Adapun strategi untuk mencapai target Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara adalah:

1. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa
2. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
3. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), dan pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Arah kebijakan untuk mencapai target Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi
2. Peningkatan daya saing ekonomi, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 10 yaitu Program : (1). Perencanaan sosial budaya yang terdiri dari 4 kegiatan, (2). Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 4 kegiatan,

(3). Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari 9 kegiatan, (4). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri dari 8 kegiatan, (5). Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang terdiri dari 3 kegiatan, (6). Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang terdiri dari 1 kegiatan, (7). Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 kegiatan, (8). Program Perencanaan sosial budaya yang terdiri dari 1 kegiatan, (9). Pengembangan Data/Informasi yang terdiri dari 1 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 10. Target Pencapaian indikator 10 bisa dilihat pada tabel 3.10. Program dan Kegiatan Tujuan 10 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 10 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi -Matriks 2.



**Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber Data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>											
10.1.1*	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS dan RPJMD Prov.Kepri	% (September)	0,339	0,352	0,359	0,35±0,01	0,35±0,01	0,35±0,01	0,34±0,01
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk miskin	BPS dan RPJMD Prov.Kepri	% (September)	5,78	5,84	6,13	6,07	5,98	5,83	5,68
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	260	133	90	80	60	40
10.1.1.(d)	jumlah desa mandiri	jumlah desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	0	0	5	10	15	20

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber Data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya</b>											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	80,16	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	BPS BATAM I	34,32	43,76	36,82	31,22	31,34	31,46	31,64

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### **3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan**

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut antara lain (1). menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh, (2) meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi (3) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, (4) secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan (5) mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, (6). menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas, (7). meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Adapun strategi untuk mencapai target Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan

swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
3. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
4. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

Arah kebijakan RPJMD Provisi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 untuk mencapai target Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan, dengan fokus pada peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 11 yaitu Program: (1). Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan yang terdiri dari 26 kegiatan, (2). Penanganan Tanggap darurat bencana yang terdiri dari 2 kegiatan, (3). Pemulihan Pasca Bencana yang terdiri dari 3 kegiatan, (4). Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017) yang terdiri dari 12 kegiatan, (5). dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017), (6). Program Kegiatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, (7). Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 5 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 11. Target Pencapaian indikator 11 bisa dilihat pada tabel 3.11. Program dan Kegiatan Tujuan 11 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan - Matriks 1. Program dan Kegiatan



organisasi non pemerintah Tujuan 11 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan –Matriks 2.





Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>											
11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	66,16%	55,05%	67,95%	PM	PM	PM	PM
11.6.1 (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	Renstra DLHK	Kab/ Kota	3	3	3	7	7	7	7
<b>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.</b>											
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030</b>											
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	BPBD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target



### **3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan**

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri (1). mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, (2). Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka, (3). menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai RPJMD Provisi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Adapun strategi untuk mencapai target Menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan RPJMD Provisi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah: Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan, dengan fokus pada peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 12 adalah Program: (1). Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017) yang terdiri dari 5 kegiatan.

Target Indikator Tujuan 12. Target Pencapaian indikator 12 bisa dilihat pada tabel 3.12. Program dan Kegiatan Tujuan 12 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 12 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan –Matriks 2.



**Tabel 3.12 Target Pencapaian Indikator Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>											
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	PM	20	26	35	35	35	35
12.4.2 (b)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	0	30	30	30	30	30	30
12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton/m3	10.301	42.351	61.402	PM	PM	PM	PM



Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b>											
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001..	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>											
12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			PM	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target



### **3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim**

Tujuan 13 SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, serta Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Tujuan 13 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2016-2021 antara lain melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong Kabupaten/Kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada tujuan 13 antara lain Program: (1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, (2) Pemulihan Pasca Bencana dan (3) Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup.

Target Indikator Tujuan 13. Target Pencapaian indikator 13 bisa dilihat pada tabel 3.13. Program dan Kegiatan Tujuan 13 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 13 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan –Matriks 2.



**Tabel 3.13 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</b>											
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	BPBD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1566	430	230	PM	PM	PM	PM
<b>Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</b>											
13.2.1(a)	Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Barenlitbang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)



### 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2021, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator pada tingkat nasional. Berdasarkan target tersebut disusunlah Rencana Aksi Daerah yang mengakomodir Tujuan 14 terdiri dari 2 target yang diukur melalui 2 indikator. Target-target tersebut meliputi pengaturan dan pemanenan penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan IUU *fishing*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi yang dilakukan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan adalah melalui:

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan, konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa.
3. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

Arah Kebijakan untuk mencapai target melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Pengembangan kemaritiman dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan.
2. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat pedesaan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan TPB/SDGs, program yang akan oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain: (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 5 kegiatan antara lain Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pengembangan Kapal Perikanan, Pengelolaan Usaha Perikanan tangkap Skala Kecil, Pengembangan Saran Prasarana Pelabuhan Perikanan; (2) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Penyelesaian Tindak Pindana Kelautan dan Perikanan; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.

Target Indikator Tujuan 14. Target Pencapaian indikator 14 bisa dilihat pada tabel 3.14. Program dan Kegiatan Tujuan 14 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 14 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan -Matriks 2.



**Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya</b>											
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Statistik Perikanan tangkap, satu data KKP	%	93,08	68,39	100	100	100	100	100
<b>Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi</b>											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Penerbitan Izin Usaha Perikanan	DKP Kepri	%	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

PM (Prememory) : Tidak Ada Angka Target



### **3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan**

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2021 ditetapkan 3 Target yang diukur melalui 3 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global, serta menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun nonpemerintah.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati adalah Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mencapai target melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

2. Peningkatan kualitas lingkungan dengan fokus pada peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau.

Program dan Kegiatan Tujuan 15 Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang antara lain Program: (1) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, (3) Pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengamanan kawasan hutan.

Target Indikator Tujuan 15. Target Pencapaian indikator 15 bisa dilihat pada tabel 3.15. Program dan Kegiatan Tujuan 15 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Lingkungan - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 15 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Lingkungan -Matriks 2.





**Tabel 3.15 Target Pencapaian dan Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 15. 1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>											
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 15. 2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.</b>											
15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Pengelolaan Hutan Lestari	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Unit	1	1	6	6	6	6	6
<b>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</b>											
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			PM	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory: Tidak Ada Angka Target)



### **3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Tujuan 16 Merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Dalam rangka mencapai perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh , pada Tujuan 16 ini Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 Target yang tertuang didalam 19 indikator. Target tersebut terdiri dari Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Strategi Tujuan 16 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 antara lain: (1) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI; (2) Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan serta dengan didukung oleh arah kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 16 yaitu Program: (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terdiri dari 4 Kegiatan, (2) Perlindungan Anak terdiri dari 2 Kegiatan, (3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terdiri dari 19 Kegiatan, (4) Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri terdiri dari 2 Kegiatan, (5) E-PROCUREMENT terdiri dari 10 Kegiatan, (6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah terdiri dari 3 Kegiatan, dan (7) Penataan Administrasi Kependudukan.

Target Indikator Tujuan 16. Target Pencapaian indikator 16 bisa dilihat pada tabel 3.16. Program dan Kegiatan Tujuan 16 tercantum dalam Lampiran II. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam lampiran II Pembangunan Hukum dan Tata Kelola –Matriks 2.



**Tabel 3.16 Target Pencapaian dan Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b>											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah Kasus	19	8	7	PM	PM	PM	PM
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Jumlah Kematian disebabkan konflik	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	0	0	0	PM	PM	PM	PM
16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	%	0,79	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	76,53 (2014)	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>											
16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	UPTD P2TP2A	orang	29	21	8	50	50	50	50
16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>											
16.3.1(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
16.3.1(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Jumlah bantuan hukum bagi korban kekerasan yang telah diberikan	UPTD P2TP2A	orang	96	57	32	19	PM	PM	PM
		Jumlah korban yang ditangani non litigasi		orang	50	36	21	10	PM	PM	PM
		Jumlah korban yang ditangani litigasi		orang	95	59	33	19	PM	PM	PM
<b>Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat</b>											
16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	BALP	%	NA	0	65	70	75	80	85
16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Ombudsman RI	zona	Hijau	Kuning	kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
<b>Target 16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan</b>											
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM PROVINSI KEPRI	%	9,09	9,09	9,09	6,81	9,09	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
16.7.2(a)	Indeks Lembaga Demokrasi (dari IDI)	Indeks Lembaga Demokrasi (dari IDI)	BPS	%	66,13	59,48	65,82	PM	PM	PM	PM
16.7.2(b)	Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI)	Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI)	BPS	%	80,16	85,43	90,84	PM	PM	PM	PM
16.7.2(c)	Indeks Hak-hak Politik (dari IDI)	Indeks Hak-hak Politik (dari IDI)	BPS	%	65,01	71,28	71,45	PM	PM	PM	PM
<b>Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur	BPS	%	88,64	90,18	PM	PM	PM	PM	PM
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	Renstra 2016-2021	64,01	75	83,19	77	79	80	82

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</b>											
16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Penanganan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	UPTD P2TP2A	orang	66	36	23	14	100	100	100

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)





### **3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Tujuan 17 TPB/SDGs adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 Target yang diukur melalui 10 Indikator. Target-target tersebut meliputi mobilisasi sumber daya domestik, Pengoperasionalan penuh bank teknologi dan sains, meningkatkan ekspor negara berkembang, serta meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas negara berkembang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Tujuan 17 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 antara lain: (1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, (2) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM. (3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. (4) Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. (5) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan. (6) Meminimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut. (7) Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah. (8) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Peningkatan ekonomi produktif dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM serta pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar) dan pengembangan perdagangan. (2) Peningkatan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus pada peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. (3) Peningkatan iklim investasi yang kondusif dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi, peningkatan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai ketentraman, ketertiban, serta antisipasi potensi gangguan keamanan.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 17 yaitu Program: (1) Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri atas 4 Kegiatan , (2) Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terdiri atas 34 Kegiatan, (3) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang terdiri atas 3 Kegiatan, (4) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang terdiri atas 25 Kegiatan, (5) Penataan Struktur Industri yang terdiri atas 3 Kegiatan.

Target Indikator Tujuan 17. Target Pencapaian indikator 17 bisa dilihat pada tabel 3.17. Program dan Kegiatan Tujuan 17 tercantum dalam Lampiran II. Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan Kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 17 tercantum dalam lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi –Matriks 2.



**Tabel 3.17 Target Pencapaian dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>											
17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BP2RD	%	0,51	0,50	0,48	0,49	0,50	0,52	0,54
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BP2RD	%	34,23	29,97	29,58	37,05	31,79	32,38	33,21
<b>Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>											
17.6.2.(b)	Tingkat akses tetap pitalebar (fixed broadband): Perkotaan dan Perdesaan	Tingkat akses tetap pitalebar (fixed broadband): Perkotaan dan Perdesaan	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	BPS	%	37,02	41,2	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologidan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</b>											
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	37,02	41,20	48,35	PM	PM	PM	PM
<b>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</b>											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</b>											
17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021
<b>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>											
17.19.1(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada kementerian/Lembaga	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada OPD di daerah.	BPS	orang	30	31	33	PM	PM	PM	PM
17.19.1(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	BPS	%			1,82	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

PM (Prememory : Tidak Ada Angka Target)

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

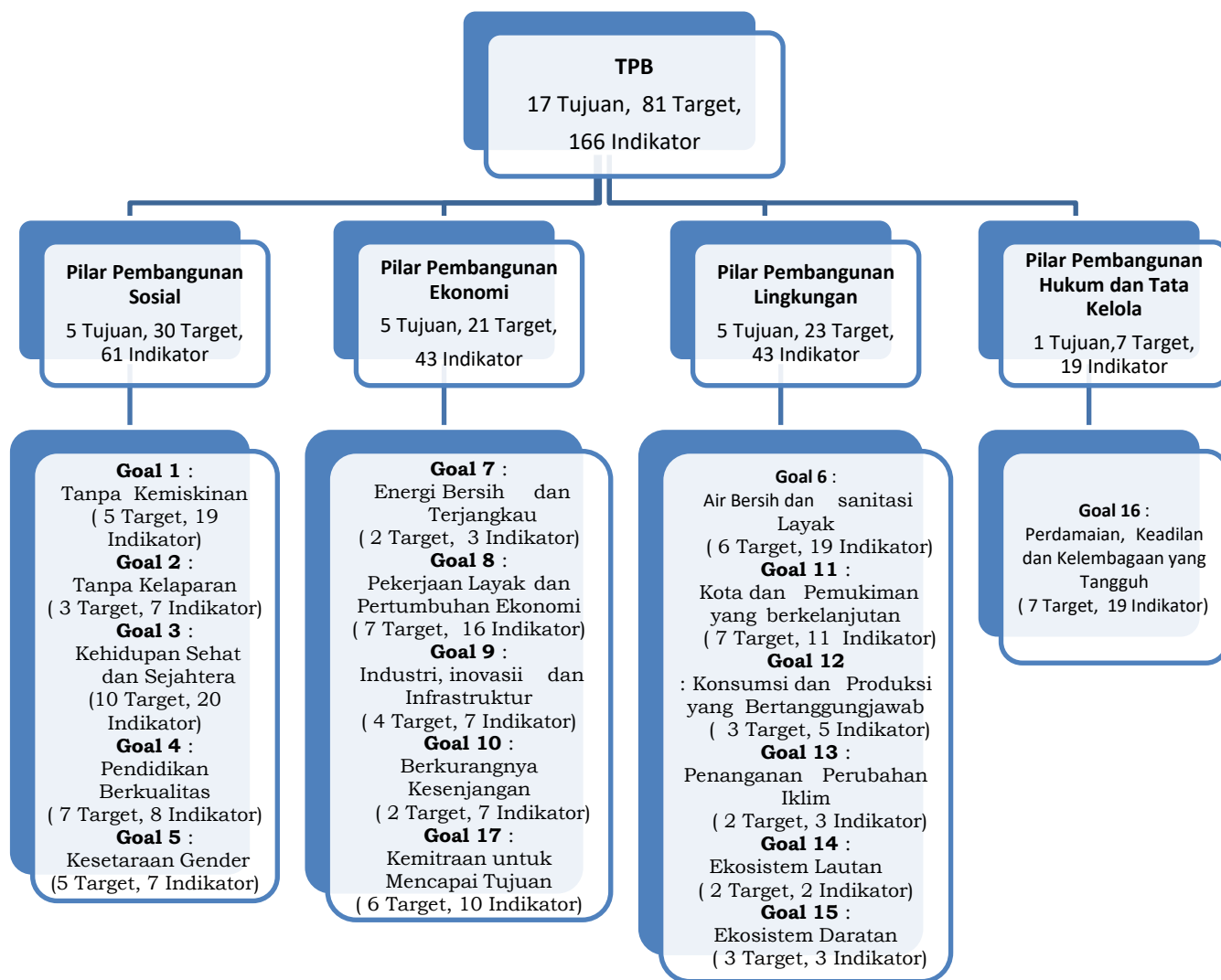
Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

**Landasan Peraturan.** Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk Organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

**Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.** Tujuan Pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi

menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

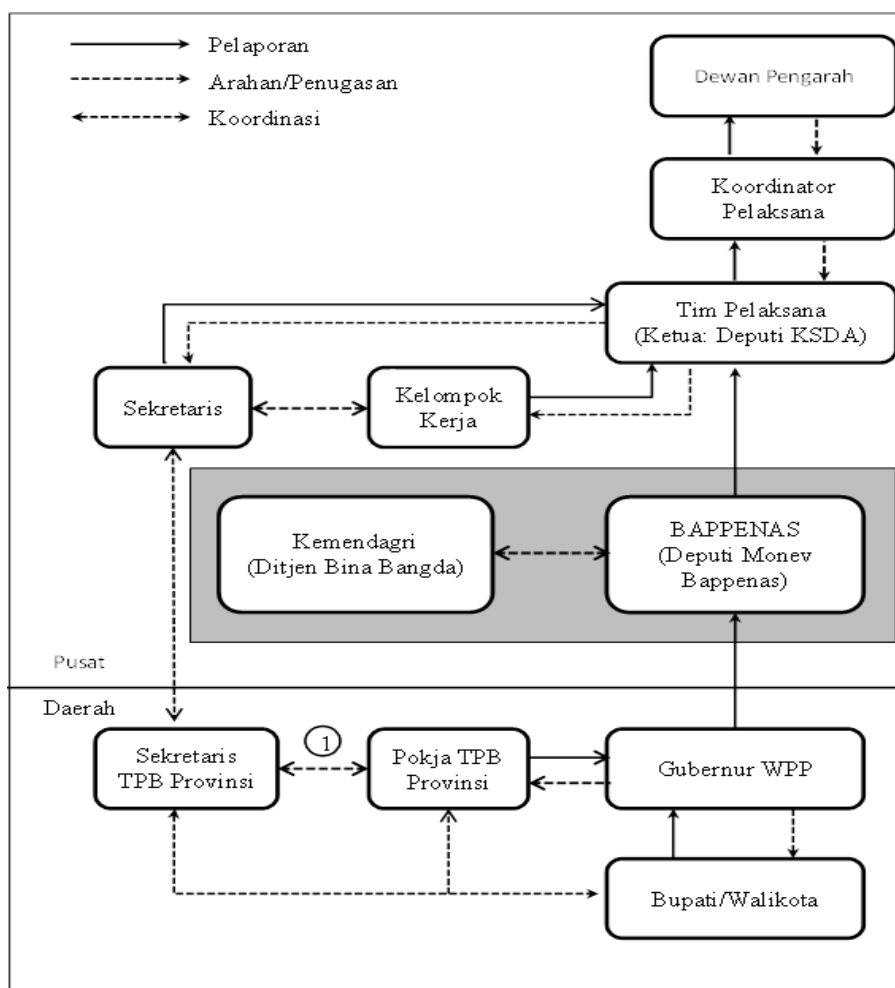
**Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.** Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau mencakup 17 Tujuan dan 81 target daerah yang dilaksanakan melalui instansi pelaksana. Pencapaian 81 target daerah diukur dengan 166 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam 4 (empat) pilar dengan rincian Pilar Sosial sebanyak 61 Indikator, Pilar ekonomi 43 indikator, Pilar Lingkungan sebanyak 43 indikator dan Pilar Hukum dan Tata kelola sebanyak 19 indikator . Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program dan kegiatan yang dibiayai baik APBD maupun APBN.



Gambar 4.1 Pilar, Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

#### 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri Sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.



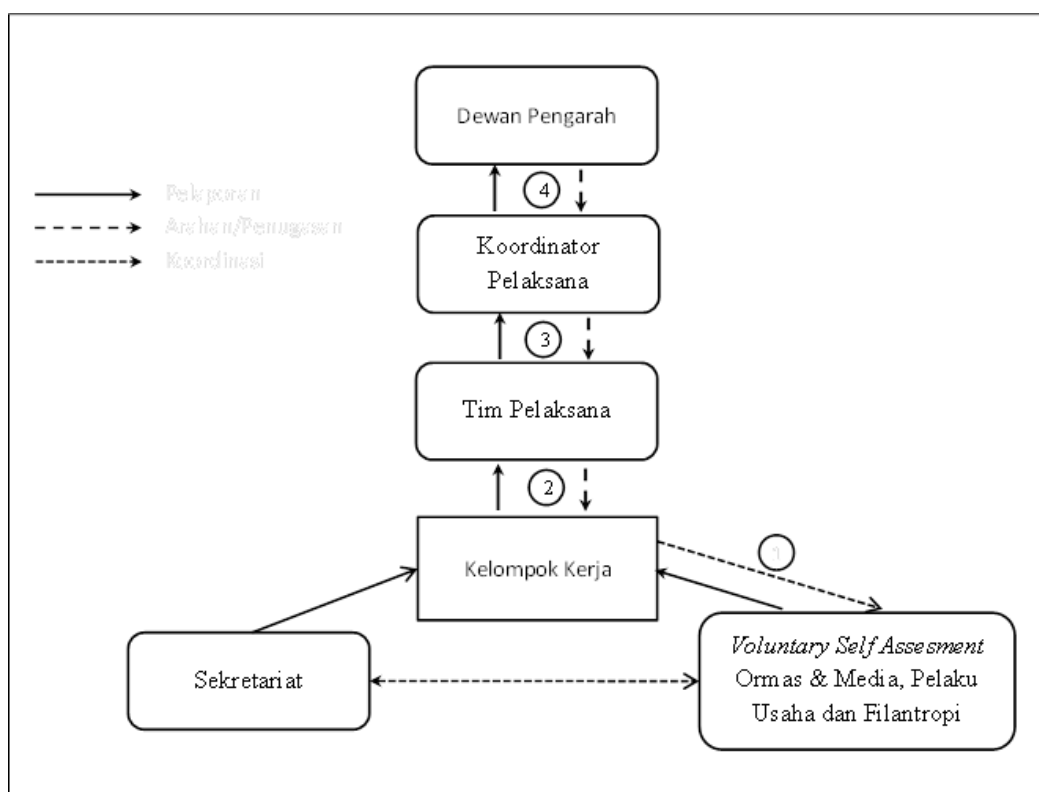
Gambar 4.2 Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs sumber : Sekretariat SDGs Nasional 2016



Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan Program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1)
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/ Bappenas melalui Deputi bidang pemantauan, evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PP/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS;
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat dibantu oleh Sekretariat SDGs;
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekteretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana;
6. Ketua tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SGDs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non-pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dijalani pemerintah. Program dan Kegiatan dari pihak non-pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.3 Alur Informasi Pemantauan Untuk Non-Pemerintah  
sumber : Sekretariat SDGs Nasional 2016

Alur Pelaporan dalam pemantauan pihak non-pemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Organisasi non-pemerintah melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada sekretariat SDGs.

- Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi non-pemerintah dengan format yang ditetapkan (langkah 1)
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (langkah2)
  3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator Pelaksana dan atau Dewan Pengarah (langkah3)
  4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target.
  5. TPB/SDGs tingkat Daerah Provinsi Kepada Gubernur /Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (langkah 4)

Mekanisme evaluasi untuk organisasi non-pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Pokja dan Sekretariat SDGs Provinsi yang dimaksud adalah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 757 Tanggal 17 Juli 2017.

#### **4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 2016-2021**

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi , sebagai berikut : Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018.



**Gambar 4.4 Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB/SDGs Nasional dan Daerah**  
sumber : Sekretariat SDGs Nasional 2016

Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan, Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGs Provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGs 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

#### **4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen atau informasi publik lainnya, khususnya melalui laman <http://bappeda.kepriprov.go.id/>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama secara global dan nasional, yang dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs.

**Prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs.** Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang **Universal**. Tidak hanya dilaksanakan oleh Negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait atau **Integration**. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat pada semua orang khususnya kelompok rentan dan disabilitas, Prinsip ini dikenal dengan istilah **“No one left behind”** atau tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip **Inklusif** dengan melibatkan 4 Platform partisipasi yang terdiri dari atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki peran untuk

menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat/Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi Masyarakat Sipil dan Media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan melakukan advokasi antara pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga **Cara Pelaksanaan** yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun juga pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penyusunan RAN/RAD TPB/SDGs harus melibatkan sejauh mungkin seluruh platform, dan tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Ditingkat daerah, Kepulauan Riau tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan telah disusunnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 757 tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu keberadaan Bank Indonesia dan beberapa bank baik bank pemerintah maupun swasta juga mampu memberikan banyak manfaat kepada daerah pemerintahan kab/kota di Provinsi

Kepulauan Riau dalam memberikan pendanaan dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat, terkait dengan usaha pencapaian goal 1 dan goal 2 TPB/SDGs.

Provinsi Kepulauan Riau kedepannya akan berusaha untuk menggiatkan TPB/SDGs sehingga bisa masuk ke seluruh aspek kehidupan dan melibatkan 4 Platform yang termasuk didalamnya.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

**Perluasan Penggunaan Teknologi.** Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

**Kemitraan Multipihak.** Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

**Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi

program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 757 tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

**Peningkatan Kapasitas.** Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan



tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, *workshop* serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

**Penghargaan Kepada Para Pihak.** Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

**Strategi Komunikasi.** Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

**Pemutakhiran Dokumen.** Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.\*\*\*

## Daftar Pustaka

### Tujuan 1. Tanpa Kelaparan

(Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 *Edisi Perubahan*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016—2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

(Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 Edisi Perubahan*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2016. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2014. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2013. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Provinsi Kepulauan Riau Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016*. Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2018. *Provinsi Kepulauan Riau Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 *Edisi Perubahan*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### **Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

(Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 Edisi Perubahan*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2016. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2014. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2013. *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Provinsi Kepulauan Riau Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2018. *Provinsi Kepulauan Riau*

*Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017.* Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 *Edisi Perubahan.* Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014-2019.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 *Edisi Perubahan.* Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

#### **Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

(Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.* Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2016. *Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.* Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2015. *Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.* Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2014. *Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.* Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

## **Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

<https://Kekerasan.kemenpppa.go.id>

## **Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Monev BWS (Balai Wilayah Sungai 4) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

## **Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## **Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas. Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Kepulauan Riau.

Bank Indonesia dan OJK Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### **Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### **Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Laporan Penanggulangan Resiko Bencana tahun 2016. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan Penanggulangan Resiko Bencana tahun 2017. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### **Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

### **Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016-2021.

### **Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim**

Laporan Penanggulangan Resiko Bencana tahun 2016. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan Penanggulangan Resiko Bencana tahun 2017. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016-2021.

#### **Tujuan 14 Ekosistem Lautan**

Statistik Produksi Perikanan tangkap, Satu data KKP 2018.

Pengurusan perizinan di Bidang perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Per oktober 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

#### **Tujuan 15 Ekosistem Daratan**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016-2021.

#### **Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Polisi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2017.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

<https://Kekerasan.kemenpppa.go.id>



## **Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

<https://www.bps.go.id/>

<https://kepri.bps.go.id/>

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**NURDIN BASIRUN**

## Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

**Matrik Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Sosial**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>Program Perencanaan sosial budaya</b>												
Kegiatan 1: Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1	1,455	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	0	339,565,2	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 3: Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	0	0	0	0	0	1	0	500	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 4: Pemutakhiran Database Kemiskinan berbasis Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah dokumen database pemutakhiran data kemiskinan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1,350	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 6: Kajian tentang strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	315	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>												
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	53	30	56	52	179	179	179	5.875	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	40	40	40	1.830	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	914	7.400	8.972	0	721	721	721	4.006	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	75	20	51	38	46	46	46	2.357	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	30	30	30	1.127	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	1.753	2.750	2.508	0	178	178	178	1.668	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	0	0	8	10	25	25	25	1.386	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	30	30	30	320	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	0	0	276	0	101	101	101	711	APBD	Dinsos
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>												
Pelayanan Sosial Lanjut Usia	a) Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	org	26	400	570	213	400	400	200	1.852	APBD	Dinsos
	b) Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	6	1	1	1	1	1	1	340	APBD	Dinsos
<b>INDIKATOR SDGs: 1.3.1(a) Cakupan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)</b>												
<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>												
1.1 Dukungan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	%	71	75	80	90	95	95	95	12.054,39	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Persentase Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional	%	65	70	74	78	82	86	90			
	Jumlah Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan yang Diterbitkan	Juknis	1	1	1	1	1	1	1			
1.2 Rakor Pelaksanaan JKN/KIS dan Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar (Pemerintah dan Swasta) yang Mendukung Pelaksanaan JKN	%	40	50	54	58	62	66	70	540	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) Dalam Daerah yang Mendukung Pelaksanaan JKN	%	60	70	75	80	85	90	95			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) Dalam dan Luar Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Jamkesda	RS	22	20	17	15	13	12	10			
1.3 Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS (Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA CBG's/Penguatan Daerah Dalam Pengelolaan	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar (Pemerintah dan Swasta) yang Mendukung Pelaksanaan JKN	%	40	50	54	58	62	66	70	565	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Dana Pemanfaatan Dana JKN/KIS)	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) Dalam Daerah yang Mendukung Pelaksanaan JKN	%	60	70	75	80	85	90	95			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) Dalam dan Luar Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Jamkesda	RS	22	20	17	15	13	12	10			
1.4 Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) Dalam dan Luar Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Jamkesda	RS	22	20	17	15	13	12	10	1330	APBD	Dinkes Provinsi
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>												
Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos)	a) Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	org	20.458	20.458	20.458	61.320	61.320	61.320	61.320	1.085	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	b) Jumlah keluarga Program Keluarga harapan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	org	650	0	2.100	1.297	1.100	1.100	1.100	3.064	APBD	Dinsos
<b>INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(b) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan</b>												
<b>PROGRAM 1. Program Perlindungan dan Pengembangangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>												
<b>Kegiatan 1:</b> Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program K3 dan BPJS Di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau	Terseleenggaranya Koordinasi dan Monitoring tersebut selama 1 tahun dan tersediannya data program pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan jamsostek/BPJS	Kegiatan	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 2:</b> Pemantauan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pemantauan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	129,0451	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 3:</b> Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Kegiatan	1	0	1	0	0	0	0	150,956	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 4:</b> Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Hukum Ketenagakerjaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	86,0113	APBD	DISNAKE RTRANS



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs:1.4.1(a) Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan</b>												
<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>												
1.1 Asuhan Persalinan Normal Melalui P2KS Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90	667	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Sosialisasi Program KIA dalam pemanfaatan dana CSR dengan sektor swasta	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	144	120	132	131	130	129	128	160	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90		APBD	Dinkes Provinsi
1.3 Kelas Ibu Hamil Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90	185	APBD	Dinkes Provinsi
1.4 Peningkatan Kapasitas Nakes dalam PPIA	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	144	120	132	131	130	129	128	488,00	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90		APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.5 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	144	120	132	131	130	129	128	160,00	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90		APBD	Dinkes Provinsi
1.6 Orientasi Petugas dalam P4K dan ANC Terpadu	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	144	120	132	131	130	129	128	235,00	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	75	77	79	82	85	87	90		APBD	Dinkes Provinsi
Orientasi Petugas dalam P4K dan ANC Terpadu	Persentase Puskesmas yang Melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K)	%	75	83	88	95	96	97	98	235	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 1.4.1(b) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan</b>												
<b>Program Surveilans dan karantina kesehatan</b>												
1.1 Penanggulangan PD3i	Persentase Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	74,5	88,7	90	91	92	93	94	1.565	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Pertemuan Akselerasi Imunisasi Rutin, Lanjutan dan BIAS	Persentase Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	74,5	88,7	90	91	92	93	94	180	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs : 1.4.1.c Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)</b>												
<b>PROGRAM : Keluarga Berencana</b>												
Kegiatan 1: Fasilitasi Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat melalui BBGRM	1.1. Terasilitasinya pelayanan KB gratis bagi masyarakat	orang	0	0	100	100	100	100	100	1.200	APBD	DP3AP2K B
Kegiatan 2: Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kampung KB	2.1. Terasilitasinya pembentukan dan pengembangan Kampung KB	jumlah	0	0	0	1	2	2	2	127,8	APBD	DP3AP2K B
Kegiatan 3: Peran Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga	3.1 Meningkatnya ketahanan keluarga	orang	450	900	150	0	0	0	0	149,6	APBD	DP3AP2K B
Kegiatan 4 : Pemetaan terhadap pengendalian penduduk dan KB	4.1. Tersusunnya profil pengendalian penduduk dan KB Provinsi Kepri	dokumen	0	0	1	0	1	1	2	700	APBD	DP3AP2K B

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b>												
<b>1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)</b>												
<b>1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat) (kelompok penduduk 40% terbawah)</b>												
<b>1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)</b>												
<b>PROGRAM 1. (Pendidik dan Tenaga Kependidikan )</b>												
Kegiatan 1: Pengadaan Alat Transportasi Siswa dan Guru Daerah Hinterland	1.1. Tersedianya alat transportasi Siswa dan Guru Daerah Hinterland	unit			3	3	2	2	3.500	APBD	Disdik Prov. Kepri	
<b>PROGRAM 2. (Mutu Pendidikan )</b>												
Kegiatan 1: Pengadaan Bus Transportasi Siswa	1.1. Tersedianya bus transportasi Siswa	unit			2	1	2	2	1.750	APBD	Disdik Prov. Kepri	
Kegiatan 2: Pengadaan Transportasi laut (pompong) untuk Siswa	1.2: Tersedianya transportasi laut (pompong) untuk siswa	unit			6	5	5	5	2.100	APBD	Disdik Prov. Kepri	
<b>INDIKATOR SDGs: 1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</b>												
<b>PROGRAM pengelolaan ketenagalistrikan</b>												
Kegiatan 1: Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin	1.1. Terlaksananya Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Keg	-	-	-	-	1	1	1	2.300	APBD	ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	0	188	50	50	75	75	75	2.256	APBD	Dinsos
<b>INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</b>												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	0	188	50	50	75	75	75	(1.5.1.(b))	APBD	Dinsos
<b>INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.</b>												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	0	0	50	100	75	75	75	(1.5.1.(b))	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>INDIKATOR SDGs : 1.5.3 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>											
<b>PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>											
1. Partisipasi dalam rangka memperingati bulan pengurangan resiko bencana (PRB)	1.1. Dokumen PRB dan Jumlah pameran yang diikuti	Dokumen	1	1	1	1	1	1	800	APBD	BPBD Provinsi Kepri
2. Bimbingan Teknis Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana Kab/Kota	2.1. Jumlah Guru dan Murid sekolah/Madrasah yang mendapat Pelatihan	Orang		30	30	20	25	30	1.779,832	APBD	BPBD Provinsi Kepri
3. FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	3.1. Jumlah Kegiatan FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	Kali			2	2	2	2	450	APBD	BPBD Provinsi Kepri
4. Publikasi BPBD	4.1. Jumlah Publikasi Kebencanaan	Titik			6	4	6	5	900	APBD	BPBD Provinsi Kepri
5. Pembuatan Brosur dan Poster tentang Waspada Bencana	5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Brosur dan Poster tentang peningkatan waspada bencana			4	6			7	482,2975	APBD	BPBD Provinsi Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</b>												
<b>Program Perencanaan sosial budaya</b>												
Kegiatan 1: Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah laporan sinkronisasi perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	2.1Jumlah laporan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 3: Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kepulauan Riau	3.1Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4: Pemutakhiran Database Kemiskinan berbasis Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah dokumen database pemutakhiran data kemiskinan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 6: Kajian tentang strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs : 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah</b>												
<b>Program Perencanaan sosial budaya</b>												
Kegiatan 1: Penguatan Perencanaan dan Pembinaan urusan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1	1,050	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat Se-Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	0	1	1	1	1	1	1	1,555	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 3:Perencanaan dan Pembinaan Urusan Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	0	0	1	1	1	1	1	1,050	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4:Penguatan perencanaan dan pemantauan Penanggulangan HIV AIDS	Dokumen	1	0	0	1	1	1	1	1	1,290	APBD	BARENLIT BANG



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 5:Penguatan kualitas perencanaan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pengurustamaan gender dan penanggulangan bencana	5.1Jumlah laporan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pengurustamaan gender dan penanggulangan bencana	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1,600	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 6:Perencanaan Urusan Kesehatan dan Pendidikan Berbasis Bonus Demografi	6.1Jumlah dokumen perencanaan urusan kesehatan dan pendidikan berbasis demografi	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	250	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 7:Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Program pengarusutamaan gender	7.1Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pengarusutamaan Gender	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	250	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 8:Penguatan Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)Provinsi Kepulauan Riau	8.1Jumlah dokumen perencanaan dan pembinaan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1,150	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 9:Koordinasi, Evaluasi dan Fasilitasi RAD Pangan dan Gizi Se-Provinsi Kepulauan Riau	9.1Dokumen RAD Pangan dan Gizi Se-Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	313.702	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 10:Penyusunan Perencanaan Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Kepri 2017	10.1Dokumen Perencanaan Penanggulangan HIV AIDS 2017	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	300	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 11:Review perencanaan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020	11.1Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	325	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 12:Review perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020	12.1Jumlah Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	325	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 13:Penyusunan Perencanaan Kesehatan Provinsi Kepri 2021-2026	13.1Jumlah dokumen Perencanaan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	700	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 14:Penyusunan Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepri 2021-2026	14.1Jumlah dokumen Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	700	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 15:Penguatan Prioritas Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	15.1Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1,200	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 16:Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua (RAD PUS)	16.1Jumlah Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua (RAD PUS) Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	245	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 17:Monitoring dan Evaluasi Pendidikan untuk Semua (Monev PUS)	17.1Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUS	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	460	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 18:Koordinasi, Evaluasi dan Fasilitasi Kota Sehat	18.1Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, evaluasi, dan fasilitasi Kota Sehat	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	250	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup</b>												
Kegiatan 1: Koordinasi dan Fasilitasi urusan Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	0	295	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Penguatan Perencanaan bidang Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	1,475	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	200	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Kajian Rencana Induk Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	300	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3: Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan dengan Perguruan Tinggi Se-Kepri	3.1Jumlah Peserta	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	225	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4: Penelitian Pemberdayaan Perempuan Daerah Pesisir dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	4.1Jumlah Dokumen Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	300	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 5: Kajian Pendidikan Buta Aksara Alqur'an	5.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	300	APBD	BARENLIT BANG
<b>TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 2.1.1(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Anak Balita</b>												
<b>2.2.2* Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</b>												
<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>												
1.1 Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Bagi Petugas	Persentase Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada Anak Balita	%	17,7	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	450	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	%	12	11,5	11	10,5	10	9,5	9			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.2 Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bagi Anak) dalam mendukung GERMAS	Persentase Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada Anak Balita	%	17,7	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	180	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	%	12	11,5	11	10,5	10	9,5	9			
1.3 Pelacakan Kasus Gizi Buruk	Persentase <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	%	12	11,5	11	10,5	10	9,5	9	720	APBD	Dinkes Provinsi
1.4 Orientasi Kader Melalui "Rumpi Sehat" mendukung program GERMAS	Persentase Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada Anak Balita	%	17,7	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	150,612	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	%	12	11,5	11	10,5	10	9,5	9			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.5 Pertemuan dalam Rangka Penurunan/Pencegahan bumil KEK	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	%	25,4	24	23	22	21	20	19	150	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.</b>												
<b>Jumlah penduduk rawan pangan</b>												
<b>PROGRAM 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>												
Kegiatan 1: Analisis Penanganan Kerawanan Pangan	1.1. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kerawanan Pangan	Kab/Kota		7	1	1	7	7	7	947,55	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 2: Penanganan Kerawanan Pangan	2.1 Jumlah Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Kecamatan		15	0	0	1	1	1	750	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: Dukungan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	3.1 Jumlah Kawasan yang Didukung Pengembangan Mandiri Pangan	Kawasan		0	0	0	0	8	0	500	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta</b>												
<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>												
1.1 Pengadaan Taburia dalam Rangka Penurunan <i>Stunting</i>	Persentase <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun)	%	22,85	22,35	21,85	21,35	20,85	20,35	20	250	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan</b>												
<b>PROGRAM 1.Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>												
Kegiatan 1: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan lahan pekarangan	1.1. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diberdayakan	KWT		15	5	2	5	5	10	1.351,22	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 2: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.1 Jumlah Hasil Pengembangan Olahan Pangan Lokal	Jenis		-	0	0	5	5	5	610,00	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: Kegiatan Kampanye B2SA dan Gelar Pangan Lokal	3.1 Jumlah Kelompok PKK yang Mengikuti Kampanye B2SA dan Gelar Pangan Lokal	Kelompok PKK		-	1	7	7	7	7	1.223,23	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 4: Kegiatan Promosi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	4.1 Jumlah Hasil Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	Kali		6	0	0	0	1	1	300	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 5: Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk	5.1 Jumlah Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk	Dokumen		1	0	0	1	1	1	400	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 6: Pengembangan Pangan Pokok Lokal	6.1 Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma yang diberdayakan	Kelompok		-	0	0	0	2	4	450	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
<b>INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).</b>												
<b>PROGRAM 1. Program peningkatan kesejahteraan Petani</b>												
Kegiatan 1: Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	1.1. Jumlah Kelompok Tani yang Terlatih tentang Agribisnis	Kelompok				-	-	3	3	348,40	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2: Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani	2.1 Jumlah Kelompok Tani yang Memperoleh Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Kelompok		0	0	0	7	7	7	685,30	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: PENAS Petani Nelayan	3.1 Jumlah Peserta yang Mengikuti PENAS	Orang		60	60	0	0	50	0	6.494,12	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 4: PEDANA Petani Nelayan Provinsi Kepulauan Riau	4.1 Jumlah Peserta yang Mengikuti PEDANA	Orang		50		0	50			1.492,62	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 5: Pemberdayaan manajemen & Teknis perluasan Sawah	5.1 Jumlah Kelompok Tani yang Terlatih tentang Budidaya Padi	Kelompok			1	0	1	1	1	2.016,46	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 6: Sekolah Lapang Budi Daya Pertanian	6.1 Jumlah Kelompok Tani yang Terlatih tentang Budidaya Tanaman Hortikultura	Kelompok		0	0	2	2	2	6	1.246,19	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 7: Pemberdayaan manajemen & Teknis Perkebunan	7.1 Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Teknis Budidaya dan Manajemen Kelompok Tani	Kelompok			0	0	0	2	2	300	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
<b>INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas</b>												
		<b>Jumlah bantuan benih padi (kg)</b>										
		<b>Jumlah bantuan benih jagung (kg)</b>										
<b>PROGRAM 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan Produksi Padi Kegiatan adalah kegiatan yang ada di Renstra yang mendukung Tujuan SDGs	1.1. Luas Lahan Sawah yang Dioptimalisasi dalam Peningkatan Produksi Padi	Hektar		420	0	0	100	150	185	3.500	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 2: Peningkatan Produksi Palawija	2.1. Luas Lahan yang Dioptimalisasi dalam Peningkatan Produksi Palawija	Hektar		620	0	0	125	130	225	3.140	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: Peningkatan Produksi Hortikultura	3.1. Luas Lahan yang Dioptimalisasi dalam Peningkatan Produksi Hortikultura	Hektar		3222	3400	0	3800	4000	6300	3.802,54	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>2.a.2 Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian</b>												
	<b>Jumlah bantuan untuk petani dan peternak</b>												
<b>PROGRAM 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>													
Kegiatan 1: Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Petani	1.1. Jumlah Pupuk Organik Cair yang Disalurkan	Liter					530.000	1.750	3.500	7.000	1.730	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Dolomit untuk Petani	2.1. Jumlah Pupuk Dolomit yang Disalurkan	Kg				70.000	-	200.000	225.000	225.000	2.193,23	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Kegiatan 3: Pengembangan Tanaman Pertanian melalui Bantuan Pestisida untuk Petani	3.1. Jumlah Pestisida yang Disalurkan	Kg					-	1.800	3.600	7.200	1.400	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
<b>PROGRAM 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>													
Kegiatan 1: Pengembangan Pembibitan Ternak Kegiatan adalah kegiatan yang ada di Renstra yang mendukung Tujuan SDGs	1.1. Jumlah Bibit Ternak yang Dihasilkan	Ekor				250	165	200	400	530	2.742,24	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 3.3.1(a) Prevalensi HIV</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Technical dan Monitoring ARV	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75	587	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Pertemuan Validasi Data SIHA Program HIV	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	180	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.3 Pemuda Peduli AIDS	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	100	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.4 Koordinasi Pendamping Sebaya untuk Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	450	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.5 Evaluasi dan Penguatan Warga Peduli AIDS (WPA) se-Provinsi Kepulauan Riau	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	150	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.6 Evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	150	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.7 Sosialisasi Program HIV/AIDS bagi masyarakat dalam rangka Hari HIV AIDS Sedunia	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	300	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.8 Rapat Koordinasi Masyarakat Peduli AIDS Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	130	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
1.9 Survey Pengetahuan Dasar HIV pada Remaja Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kepri	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	380	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Angka Kasus HIV yang Diobati	%	65,39	67	69	71	73	74	75			
<b>INDIKATOR SDGs: 3.3.2 (a) Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 Penduduk</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Peningkatan Kapasitas Tata Laksana Program TB di Faskes	Jumlah Kasus TB per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	137	140	144	148	152	156	160	400	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.2 Penguatan Jejaring Layanan Public Private Mix (PPM)	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	139	171	155	160	165	170	175	210	APBD	Dinkes Provinsi
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	%	79	78,6	80	81	82	83	84			
	Jumlah Kasus TB per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	137	140	144	148	152	156	160			
1.3 Dukungan Peringatan TB DAY (Hari TB Sedunia)	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	139	171	155	160	165	170	175	160	APBD	Dinkes Provinsi
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	%	79	78,6	80	81	82	83	84			
	Jumlah Kasus TB per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	137	140	144	148	152	156	160			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang.</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Pengendalian Pencegahan Peningkatan Kasus DBD/Malaria di Kab/Kota se-Provinsi Kepri	API ( <i>Annual Paracite Incidence</i> ) per 1.000 Penduduk	per 1.000 penduduk	0,41	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27	594	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Pelaksanaan Survey Vektor, Breeding Places DBD dan Malaria di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu	Kabupaten/Kota	2	4	4	5	5	6	7	310	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 3.3.3 Prevalensi Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada Kelompok Berisiko</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Dukungan dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B di Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B pada Kelompok Berisiko	Kabupaten/Kota	-	1	1	1	1	1	1	234	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 3.3.3(b) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Pengendalian Pencegahan Kejadian Filariasis di Kab/Kota se-Provinsi Kepri	Angka Kejadian Filariasis per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	5	5	5	5	4	4	3	318	APBD	Dinkes Provinsi



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.2 Technical dan Mentoring POMP Filariasis di 3 Kab/Kota Endemis	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengobatan Massal Filariasis terhadap Penduduk Endemis	Kabupaten/Kota		2	2	2	2	2	2	190	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 3.4.1(b) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Validasi Data PTM Tingkat Provinsi Kepri	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	35	22,4	28,7	28,5	28,3	28,1	27,9	320	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	%	10	20	22	24	26	28	30			
1.2 Pelatihan Posbindu PTM	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	35	22,4	28,7	28,5	28,3	28,1	27,9	170	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	%	10	20	22	24	26	28	30			
1.3 Pelatihan PANDU PTM di FKTP se - Provinsi Kepri	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	35	22,4	28,7	28,5	28,3	28,1	27,9	220	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	%	10	20	22	24	26	28	30			
1.4 Penanggulangan dan Pengendalian PTM	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	%	10	20	22	24	26	28	30	600	APBD	Dinkes Provinsi
<b>INDIKATOR SDGs: 3.4.1 (c) Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun</b>												
<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
1.1 Pelatihan Surveilans Faktor Risiko PTM Tingkat Provinsi Kepri	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia > 18 Tahun	%	-	20	19	18	17	16	15,5	200	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Sosialisasi Program PTM bagi Stakeholders dan Instansi Terkait dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Prov Kepri	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia > 18 Tahun	%	-	20	19	18	17	16	15,5	150	APBD	Dinkes Provinsi
1.3 Surveilans Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) di FKTP	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia > 18 Tahun	%	-	20	19	18	17	16	15,5	200	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.</b>												
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>												
Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang dirujuk ke/dari pusat rehabilitasi	org	0	0	0	0	5	5	5	120	APBD	Dinsos
<b>INDIKATOR SDGs: 3.a.1 Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤18 tahun</b>												
<b>Program Pengendalian penyakit tidak menular</b>												
1.1 Penanggulangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	%	14	25	40	55	65	83	100	885,735	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik dalam Upaya Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	%	14	25	40	55	65	83	100	360	APBD	Dinkes Provinsi
1.3 Advokasi dan Sosialisasi Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tingkat Provinsi Kepri	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	%	14	25	40	55	65	83	100	150	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 3.b.1 Peningkatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas</b>												
<b>Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>												
1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat di Pelayanan Kesehatan Dasar	%	77	75,5	78	81	82	85	87	6923,739	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Dukungan Peningkatan Pengelolaan Instalasi Farmasi Provinsi Kepri	Persentase Ketersediaan Obat di Pelayanan Kesehatan Dasar	%	77	75,5	78	81	82	85	87	1295,325	APBD	Dinkes Provinsi
2.1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	15	20	23	26	29	32	35	120	APBD	Dinkes Provinsi
2.2 Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	15	20	23	26	29	32	35	800	APBD	Dinkes Provinsi
2.3 Upaya Peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR)	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	%	35	40	45	50	55	60	65	378	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan</b>												
<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan</b>												
1.1 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	%	58	53	56	58	60	63	67	420	APBD	Dinkes Provinsi
1.2 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	%	58	53	56	58	60	63	67	846	APBD	Dinkes Provinsi
1.3 Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS	Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	%	58	53	56	58	60	63	67	26900	APBD	Dinkes Provinsi
1.4 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Sertifikat Kompetensi yang Diterbitkan	Sertifikat	-	-	-	50	-	-	-	400	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>												
<b>INDIKATOR SDGs:</b>												
<b>4.1.1(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</b>												
<b>4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun</b>												
<b>4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</b>												
<b>4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat</b>												
<b>PROGRAM 1. (Program Pendidikan Menengah dan Khusus)</b>												
1.1 Pembangunan RKB SMA di Provinsi Kepri	1.1 Terlaksananya Pembangunan RKB SMA di Provinsi Kepri	ruang		0	0	12	11	14	14	10.200	APBD	Disdik Prov. Kepri
2.1 Pembangunan RKB SMK di Provinsi Kepri	2.1 Terlaksananya Pembangunan RKB SMK di Provinsi Kepri	ruang		0	0	11	12	13	13	10.000	APBD	Disdik Prov. Kepri
<b>PROGRAM 2: ( Peningkatan Mutu Pendiudikan)</b>												
1.1.Pengadaan Meubiler Sekolah SMA/SMK/SLB	1.1. Tersedianya Meubiler Sekolah SMA/SMK/SLB	Sekolah		0	0	24	16	15	10	13.000	APBD	Disdik Prov. Kepri
1.2: Pengadaan Sarana dan Presarana Pendidikan	1.2: Tersedianya Sarana dan Presarana Pendidikan	sekolah		0	0	15	15	17	20	18.000	APBD	Disdik Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b>		<b>4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										
<b>PROGRAM 1. (Program Pendidikan Menengah dan Khusus)</b>												
Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMA Se-Kepri	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMA Se-Kepri	Unit		0	3	3	3	1	1	48.000	APBD	Disdik Prov. Kepri
Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMK di Provinsi Kepri	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMK di Provinsi Kepri	Unit		0	1	0	0	2	2	20.000	APBD	Disdik Prov. Kepri
Pembangunan RKB SMA di Provinsi Kepri	Terlaksananya Pembangunan RKB SMA di Provinsi Kepri	ruang		0	0	12	11	14	14	(4.1.1.g)	APBD	Disdik Prov. Kepri
Pembangunan RKB SMK di Provinsi Kepri	Terlaksananya Pembangunan RKB SMK di Provinsi Kepri	ruang		0	0	11	12	13	13	(4.1.1.g)	APBD	Disdik Prov. Kepri
<b>INDIKATOR SDGs:</b>		<b>4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)</b>										
<b>PROGRAM 1. (Program Pendidikan Menengah dan Khusus)</b>												
Pelaksanaan Rutinitas Sekolah	Tersedianya Dana Rutinitas Sekolah	Sekolah		0	0	118	120	123	125	9.765	APBD	Disdik Prov. Kepri
Bantuan Operasional Sekolah	Tersedianya Dana Operasional Sekolah	sekolah		0	0	118	120	223	125	91.686	APBD	Disdik Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pelaksanaan Rutinitas Sekolah SMA/SMK se-kepri	Tersedianya Dana Rutinitas Sekolah SMA/SMK se-kepri	Unit		0	0	118	120	123	125	39.060	APBD	Disdik Prov. Kepri
Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/SLB se-kepri	Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMA/SMK/SLB se-kepri	Unit		0	0	118	120	223	125	366.786	APBD	Disdik Prov. Kepri
Pengadaan Komputer sekolah untuk Ujian Akhir Nasional	tersedianya Komputer untuk sekolah	Sekolah		0	0	3	5	7	7	13	APBD	Disdik Prov. Kepri
Pelaksanaan Rutinitas sekolah SLB	Tersedianya Dana Rutinitas Sekolah SLB se-kepri	Sekolah		0	0	12	14	14	14	2.800	APBD	Disdik Prov. Kepri
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB	Tersedianya Dana Operasional Sekolah SLB se-kepri	Sekolah		0	0	12	0	2	2	7.032	APBD	Disdik Prov. Kepri



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b>		<b>4.c.1* Persentase guru SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik</b>										
<b>PROGRAM 1. (Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan)</b>												
1.1 Penyediaan Jasa PTK Non ASN Kategori 1 SMANSMKN/SLBN Se-Provinsi Kepri	1.1 Tersedianya Jasa PTK Non ASN Kategori 1 SMANSMKN/SLBN Se-Provinsi Kepri	orang	0	0	707	707	707	707	2.828	APBD	Disdik Prov. Kepri	
2.1 Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OSN) Se-Provinsi Kepulauan Riau	2.1 Terlaksananya Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OSN) Se-Provinsi Kepulauan Riau	orang	0	5	5	5	5	5	25	APBD	Disdik Prov. Kepri	
<b>TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.</b>												
<b>PROGRAM : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>												
Kegiatan 1. Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	1.1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	jumlah	0	0	0	50	50	50	0	225	APBD	DP3AP2K B

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Program 1 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah</b>												
Kegiatan 1 : Evaluasi PPRG	1.1 Jumlah LHE	Laporan	-	-	40	40	40	40	650	650	APBD	Inspektora t
<b>INDIKATOR SDGs : 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 5.2.1*: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1. Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan / TPPO	1.1. Jumlah pertemuan koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan / TPPO	jumlah	0	0	0	1	4	4	4	1.003,4	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2. Pengembangan dan Pemantapan jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	2.1. Tersedianya jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	jumlah	0	0	0	0	1	1	1	750	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 3. Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT - PPKTP	3.1. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pemantapan SPPT - PPKTP	jumlah	0	0	1	0	0	0	0	250	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs 5.2.1(a): Rasio kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>PROGRAM : Perlindungan Anak</b>												
Kegiatan 1. Pengembangan Kota layak Anak	1.1. Persentase Kota Layak Anak	Presentase	28,57	28,57	42,85	42,85	57,14	57,14	85,71	1.062,7	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2. Pengembangan Kelembagaan Forum Anak	2.1. Terbentuknya Kelembagaan Forum Anak	Jumlah	72	11	48	14	14	14	14	616,6	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 3. Ajang Temu Anak	3.1. Terlaksananya Kegiatan Ajang Temu Anak	Orang	1400	700	700	700	700	700	700	1.437,8	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 4. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD Terhadap Pemenuhan Hak Anak	4.1. Meningkatkan Kapasitas Guru Paud terhadap Pemenuhan Hak Anak	Orang	0	0	100	0	0	0	0	450	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 5. Penguatan dan Pengembangan KPPAD	5.1. Terlaksananya Operasional Komisioner KPPAD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	7.012,6	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 6. Penguatan dan Pengembangan PATBM	6.1. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan PATBM	Desa/Kelurahan	0	4	4	4	4	4	4	1.810	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 7. Pelatihan KHA	7.1. Terselenggaranya Pelatihan KHA	Orang	0	0	0	0	30	30	30	300	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 8. Klinik Terapi Anak Berkebutuhan Khusus	8.1. Terbentuknya Klinik Terapi Anak Berkebutuhan Khusus	Lemba ga	0	0	0	1	0	0	0	764,8	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 9. Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA)	9.1. Terlaksananya Pengembangan PUSPAGA	Lemba ga	0	0	0	1	0	0	0	950	APBD	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR SDGs 5.2.2*: Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1. Pelayanan penerimaan pengaduan dan penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan	1.1. Terlaksananya Pelayanan penerimaan pengaduan dan penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan yang komperhensif	jumlah	0	0	0	0	1	1	1	650	APBD	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR SDGs 5.2.2 (a) : Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komperhensif</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1. Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi perempuan dan anak korban kekerasan	1.1. Terlaksananya pelayanan, Rehabilitasi, Pemulangan dan reintegrasi perempuan dan anak korban kekerasan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	2,120	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>INDIKATOR SDGs : 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>											
<b>INDIKATOR SDGs : 5.3.1*: Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.</b>											
<b>PROGRAM : Perlindungan Anak</b>											
Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas orangtua dan anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	jumlah	0	0	0	0	1	1	1	778,2	APBD	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR SDGs : 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif , dan kesempatan yang sama untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat</b>											
<b>INDIKATOR SDGs : 5.5.1* : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah eselon 3</b>											
<b>INDIKATOR SDGs : 5.5.2* :Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</b>											
<b>PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>											
Kegiatan 1. Penguatan dan Revitalisasi Organisasi Perempuan Politik di Provinsi Kepri	orang	0	0	50	0	0	0	0	165	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2. Capacity Building Politik Perempuan di Provinsi Kepri	orang	0	0	40	0	0	0	0	153,1	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3. Workshop Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepri	3.1. Jumlah Perempuan yang ditingkatkan keterampilannya	orang	0	50	100	0	0	0	0	389,7	APBD	DP3AP2KB

**Matrik Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Ekonomi**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita</b>												
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>												
Kegiatan 1: Penyediaan Pembangkit Listrik Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Keg	-	-	1	-	-	-	-	-	292,506	APBD	ESDM
Kegiatan 2: Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin	Keg	-	-	-	-	1	1	1	1	2.300	APBD	ESDM
Kegiatan 3: Penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) di Provinsi Kepulauan Riau	Keg	-	-	-	1	1	1	1	1	2.130,538	APBD	ESDM
Kegiatan 4: Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri	Keg	-	-	-	1	1	1	1	1	16.605,231	APBD	ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 7.2.1.* Bauran Energi Terbarukan</b>												
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI</b>												
Kegiatan 1 : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau (DAK)	1.1 Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	-	-	1	1	-	-	-	27.995	DAK	ESDM
Kegiatan 2: Pengadaan dan Pemasangan PJUTS di Kep. Anambas	2.1 Jumlah Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Unit	-	-	10	20	20	20	40	3.986,501	APBD	ESDM
<b>TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 8.1.1.(a) PDB per kapita.</b>												
<b>Program perencanaan Perekonomian</b>												
Kegiatan 1: Koordinasi dan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Sinkronisasi terkait dengan percepatan program pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	382,3	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	2.1Jumlah laporan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	2,050	APBD	BARENLIT BANG



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3: Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Kepulauan Riau	3.1Jumlah laporan pelaksanaan forum pengembangan ekonomi lokal di Provinsi Kepri	Dokumen	0	0	1	2	2	2	2	1.862,125,3	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4: Perencanaan Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal	4.1Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	2,775	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 5: Penyusunan regulasi, perencanaan dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kepulauan Riau	5.1Jumlah dokumen regulasi, perencanaan dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	726,3	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 6: Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau	6.1Terlaksananya Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	100	0	0	0	0	278,95	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 7:Koordinasin dan Fasilitasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016	7.1Tersedianya laporan pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di provinsi kepulauan riau tahun 2016	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	27	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 8: Studi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Lingga	8.1Tersedianya dokumen hasil studi pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan perekonomian masyarakat di kabupaten lingga	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	80,5	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>												
Kegiatan 1: Foccus Group Discussion (FGD) Isu Aktual Ekonomi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah Pertemuan	Kali	0	0	0	0	0	0	2	250	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Penyusunan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau	2.1Jumlah Dokumen Laporan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	220	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 1: Kajian Pengembangan Ekonomi Maritim Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah Dokumen Analisis	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	360	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Kajian Tentang Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau	2.1Jumlah Dokumen Analisis	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	365	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 3: Kajian Tentang Dampak Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Terhadap Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau	3.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	300	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4: Penelitian Potensi Hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah Dokumen Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	325	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 5: Kajian Pengembangan Industri Pengolahan dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kepri	5.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	325	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 6: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Kepri	6.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	275	APBD	BARENLIT BANG
<b>INDIKATOR SDGs: 8.3.1*. Akses Layanan Keuangan formal UMKM</b>												
<b>PROGRAM 1: Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan Pengusaha Wanita	1.1 Jumlah Koperasi dan Pengusaha wanita yang mendapat perluasan akses permodalan	KUKM	NA	NA	NA	NA	20	15	15	870	APBD	Dinas Koperasi UKM
<b>PROGRAM 2: Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM</b>												
Kegiatan 1: Pembinaan kepada Penerima pinjaman Dana Bergulir	1.1 Terlaksananya Pembinaan kepada Penerima pinjaman Dana Bergulir	Orang	NA	NA	NA	NA	25	25	25	650	APBD	Dinas Koperasi UKM
Kegiatan 2: Peningkatan wawasan pembiayaan melalui KUR bagi KUKM	2.1 Terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan pembiayaan melalui KUR bagi KUKM	KUKM	NA	150	48	45	NA	NA	NA	259	APBD	Dinas Koperasi UKM
Kegiatan 3: Fasilitasi pembiayaan KUKM melalui Lembaga Keuangan	3.1 Terlaksananya fasilitasi pembiayaan KUKM melalui lembaga Keuangan	KUKM	NA	NA	NA	NA	100	100	100	750	APBD	Dinas Koperasi UKM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 4: Pembinaan terhadap KUKM	4.1 Jumlah KUKM yang meningkat produksinya	KUKM	NA	NA	NA	NA	50	50	50	1.200	APBD	Dinas Koperasi UKM
<b>INDIKATOR SDGs:</b>		<b>8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja</b> <b>8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur</b> <b>8.6.1 Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)</b>										
<b>PROGRAM 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>												
<b>Kegiatan 1:</b> Pelatihan AK3 Umum Di Batam	Terlaksananya Pelatihan AK3 Umum Di Batam	Paket	1	1	1	0	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 2:</b> Pelatihan Scaffolding Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Scaffolding Di Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 3:</b> Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 4:</b> Pelatihan Rigger Di Batam	Terlaksananya Pelatihan Rigger Di Batam	Paket	1	1	1	0	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 5:</b> Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik	Paket	1	1	1	0	0	0	1	1.500	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 6:</b> Pelatihan Mechatronics	Terlaksananya Pelatihan Mechatronics	Paket	1	1	1	0	0	0	0	350	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 7:</b> Pelatihan Servis Sepeda Motor	Terlaksananya Pelatihan Servis Sepeda Motor	Paket	1	1	1	0	0	0	1	373	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 8:</b> Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)	Terlaksananya Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)	Paket	1	1	1	0	0	0	1	700	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 9:</b> Pelatihan Operator Alat Berat	Terlaksananya Pelatihan Operator Alat Berat	Paket	1	1	1	0	0	0	1	686	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 10:</b> Pelatihan Menjahit	Terlaksananya Pelatihan Menjahit	Paket	1	1	1	1	1	1	1	550	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 11:</b> Pelatihan Bubut Logam	Terlaksananya Pelatihan Bubut Logam	Paket	1	1	1	1	1	1	1	550	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 12:</b> Pelatihan Listrik Di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga	Terlaksananya Pelatihan Listrik Di kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga	Paket	1	1	1	0	0	0	0	867	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 13:</b> Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Paket	1	1	1	0	0	0	0	1.000	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 14:</b> Pelatihan Sertifikasi P3K	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi P3K	Paket	1	1	1	0	0	0	1	1.500	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 15:</b> Pelatihan Komputer	Terlaksananya Pelatihan Komputer	Paket	1	1	1	1	1	1	1	525	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 16:</b> Pelatihan Teknik Listrik	Terlaksananya Pelatihan Teknik Listrik	Paket	1	1	0	1	1	1	1	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 17:</b> Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 18:</b> Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan	Paket	1	1	0	1	1	1	1	900	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 19:</b> Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D	Paket	1	1	0	1	0	0	0	500	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 20:</b> Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel	Paket	1	1	0	1	0	0	0	500	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 21:</b> Pelatihan Sertifikasi Mesin Pita Transport	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Mesin Pita Transport	Paket	1	1	0	1	0	0	0	500	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 22:</b> Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian	Paket	1	1	0	1	0	0	0	500	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 23:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 24:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 25:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Perancah	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Perancah	Paket	1	1	0	1	1	0	1	600	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 26:</b> Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 27:</b> Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer	Terlaksananya Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer	Paket	1	1	0	0	0	1	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 28:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 29:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Paket	1	1	0	0	0	0	1	700	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 30:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Akuntansi	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Akuntansi	Paket	1	1	0	0	0	1	1	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 31:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 32:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 33:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 34:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 35:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Rotating Equipment	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Rotating Equipment	Paket	1	1	0	0	0	1	1	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 36:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding	Paket	1	1	0	0	0	1	1	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 37:</b> Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 38:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 39:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Forklift	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Forklift	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 40:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas	Paket	1	1	0	1	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 41:</b> Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)	Terlaksananya Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)	Paket	1	1	1	1	1	0	1	300	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 42:</b> Pelatihan AC	Terlaksananya Pelatihan AC	Paket	1	1	0	1	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 43:</b> Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer	Terlaksananya Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer	Paket	1	1	0	1	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 44:</b> Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)	Terlaksananya Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)	Paket	1	1	0	1	1	1	1	410	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 45:</b> Pelatihan Teknik Otomotif	Terlaksananya Pelatihan Teknik Otomotif	Paket	1	1	0	1	1	1	1	400	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 46:</b> Pelatihan Las	Terlaksananya Pelatihan Las	Paket	1	1	1	1	1	1	0	678	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 47:</b> Pelatihan Welding Inspector Level 1	Terlaksananya Pelatihan Welding Inspector Level 1	Paket	1	1	0	1	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 48:</b> Pelatihan Las Dasar	Terlaksananya Pelatihan Las Dasar	Paket	1	1	1	0	0	0	1	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 49:</b> Pelatihan Las 3G	Terlaksananya Pelatihan Las 3G	Paket	1	1	1	1	0	0	0	200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 50:</b> Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber	Paket	1	1	0	1	1	1	1	1.200	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 51:</b> Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII	Paket	1	1	1	0	0	0	0	350	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 52:</b> Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Paket	1	1	0	1	1	1	1	800	APBD	DISNAKE RTRANS



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 8.9.1 Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan pariwisata</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara</b>												
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>												
Kegiatan 1 : Promosi Pariwisata Mancanegara	1.1 Jumlah Promosi Pariwisata di Luar Negeri	Kota di Luar Negeri	1	1	2	0	2	3	2	3.853	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Pengadaan Direktori Pariwisata	1.2 Bahan-bahan promosi pariwisata Kepulauan Riau yang diadakan	eksemplar	180.000	10.000	7.500	0	10.000	5.000	5.000	700	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Wonderful Riau Islands di Nongsa dan Lagoi	1.3 Jumlah Event di Nongsa dan Lagoi yang didukung	event	2	2	4	0	2	2	3	1.251	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Festival Barongsai dan Lampu Lampion	1.4 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	1	1	1	1	1	1	2.330	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Kampanye Wonderful Riau Islands di Asian Games	1.5 Jumlah partisipasi event pada pelaksanaan Asian Games	event	0	0	0	1	0	0	0	460	APBD	DISPAR
Kegiatan 6 : Peningkatan Branding Wonderful Riau Islands Pada Event Internasional di Bintan dan Batam	1.6 Event internasional di Bintan dan Batam yang ditingkatkan Brandingnya	event	0	0	0	3	2	3	3	1.600	APBD	DISPAR
Kegiatan 7 : Penyelenggaraan International Tour de Kepri	1.7 Jumlah Event Internasional yang dilaksanakan	event	1	1	0	1	0	1	1	4.900	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>												
Kegiatan 1: Kepri Carnival	1.1 Jumlah Peserta yang mengikuti karnaval	Peserta	200	100	0	0	100	0	100	800	APBD	DISPAR
<b>INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Kunjungan Wisatawan Nusantara</b>												
<b>PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>												
Kegiatan 1 : Penataan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD)	1.1 Jumlah Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) yang ditata dan dikembangkan	Objek Wisata	0	2	0	0	1	1	0	800	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata	1.2 Sarana Prasarana Destinasi wisata yang ditingkatkan	obyek wisata	14	1	0	0	1	1	0	1.000	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Revitalisasi Kawasan, Objek, dan Sarana Prasarana Pariwisata	1.3 Jumlah Kawasan, Objek, dan Sarana Prasarana Pariwisata yang direvitalisasi	objek wisata	0	0	0	0	1	0	1	600	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata	1.4 Jumlah objek wisatayang disediakan sarana dan fasilitas pendukungnya	objek wisata	1	1	2	0	2	1	1	1.429	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona	1.5 Jumlah orang yang mengikuti Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona	orang	200	200	100	0	100	100	100	937	APBD	DISPAR
Kegiatan 6 : Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	1.6 Jumlah Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata yang dibina	desa wisata dan pokdar wis	0	0	0	2	0	2	2	800	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 7 : Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Riau	1.7 Jumlah objek wisata di KSPN Kepri yang dikembangkan	objek wisata / KSPN	0	0	0	0	0	1	1	1.000	APBD	DISPAR
Kegiatan 8 : Rintisan dan Diversifikasi Objek dan Daya Tarik Wisata Baru	1.8 Jumlah Rintisan dan Diversifikasi Objek dan Daya Tarik Wisata Baru	objek wisata	0	0	0	0	1	1	1	900	APBD	DISPAR
Kegiatan 9 : Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit Usaha Pariwisata	1.9 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit Usaha Pariwisata yang dilatih	badan usaha	0	0	0	0	100	100	0	600	APBD	DISPAR
<b>PROGRAM 2 : PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>												
Kegiatan 1 : Promosi Pariwisata Nusantara	1.1 Jumlah Promosi di Dalam Negeri	Kota di Dalam Negeri	12	0	0	0	2	2	2	2.150	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	1.2 Jumlah Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kerjasama Promosi Pariwisata	1	0	0	0	1	0	0	200	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Familiarization Trip	1.3 Jumlah Kabupaten/ Kota yang dipublikasikan melalui Famtrip	Kabupaten/ Kota	2	0	1	1	0	1	1	548	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	1.4 Durasi Publikasi melalui media Internet	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	900	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Kampanye Wonderful Riau Islands di Luar Daerah	1.5 Event di luar daerah yang didukung	event	0	0	0	0	1	1	1	1.100	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>PROGRAM 3 : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>												
Kegiatan 1 : Penyediaan Sarana Ruang Kreatif	1.1 Sarana ruang kreatif yang tersedia	unit	0	0	0	0	0	0	1	410	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Partisipasi Dalam Event Produk Kreatif dan Karya Produk Kreatif Kepri di Tingkat Nasional	1.2 Jumlah Partisipasi event produk kreatif kepri di tingkat nasional	event	0	0	0	0	0	1	0	400	APBD	DISPAR
<b>INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(c) Penerimaan Devisa</b>												
<b>PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Festival Bahari Kepri	1.1 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	1	1	1	1	1	1	4.275	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Kampanye Wonderful Riau Islands pada Event Pariwisata Daerah	1.2 Jumlah Event Pariwisata Daerah yang didukung	event	0	0	7	3	3	5	5	4.821	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Festival Pulau Penyengat	1.3 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	0	0	1	0	1	1	548	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Festival Akhir Tahun	1.4 Festival Akhir tahun yang dilaksanakan	event	0	0	0	0	1	0	1	800	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Festival Pulau Penawar Rindu	1.5 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	0	0	0	1	1	1	1.100	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 6 : Festival Gunung Daek	1.6 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	0	0	0	0	1	1	800	APBD	DISPAR
Kegiatan 7 : Festival Pulau Senoa	1.7 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	1	0	0	1	1	1	1.200	APBD	DISPAR
Kegiatan 8 : Festival Padang Melang	1.8 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	1	0	0	1	1	1	1.200	APBD	DISPAR
Kegiatan 9 : Penyelenggaraan Festival Sungai Carang	1.9 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	1	1	1	0	1	1	1	2.317	APBD	DISPAR
Kegiatan 10 : Promosi Pariwisata Mancanegara	1.10 Jumlah Promosi Pariwisata di Luar Negeri	Kota di Luar Negeri	1	1	2	0	2	3	2	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 11 : Pengadaan Direktori Pariwisata	1.11 Bahan-bahan promosi pariwisata Kepulauan Riau yang diadakan	eksemplar	180.000	10.000	7.500	0	10.000	5.000	5.000	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 12 : Wonderful Riau Islands di Nongsa dan Lagoi	1.12 Jumlah Event di Nongsa dan Lagoi yang didukung	event	2	2	4	0	2	2	3	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 13 : Penyelenggaraan Festival Barongsai dan Lampu Lampion	1.13 Jumlah Event yang dilaksanakan	event	0	1	1	1	1	1	1	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 14 : Kampanye Wonderful Riau Islands di Asian Games	1.14 Jumlah partisipasi event pada pelaksanaan Asian Games	event	0	0	0	1	0	0	0	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 15 : Peningkatan Branding Wonderful Riau Islands Pada Event Internasional di Bintan dan Batam	1.15 Eventinternasional di Bintan dan Batam yang ditingkatkan Brandingnya	event	0	0	0	3	2	3	3	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 16 : Penyelenggaraan International Tour de Kepri	1.16 Jumlah Event Internasional yang dilaksanakan	event	1	1	0	1	0	1	1	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
<b>PROGRAM 2: PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>												
Kegiatan 1 : Gelar Produk Ekonomi Kreatif	1.1 Pameran Produk Kreatif yang diikuti	Pameran	0	1	0	0	0	1	1	400	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Kepri Creative Food	1.2 Jumlah pameran Kepri Creative Food yang dilaksanakan	Pameran	0	1	0	1	1	1	1	1.203	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Kepri Carnival	1.3 Jumlah Peserta yang mengikuti karnaval	Peserta	200	100	0	0	100	0	100	(8.9.1.a)	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.4 Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengembangan ekonomi kreatif	orang	0	0	0	0	100	75	150	881	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	1.5 Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	200	0	0	0	100	100	400	APBD	DISPAR
Kegiatan 6 : Sertifikasi Profesi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	1.6 Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi	Peserta	0	0	0	0	50	0	75	370	APBD	DISPAR
Kegiatan 7 : Pembinaan, Pengembangan dan Pendukung kepada Komunitas Kreatif	1.7 JUmlah komunitas Kreatif yang dibina dan dikembangkan	Peserta	0	0	0	0	150	0	150	819	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 8 : Coding MUM'S ( Program Edukasi Ibu Rumah Tangga kreatif)	1.8 Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Coding Mum's	Peserta	0	0	0	0	0	0	50	200	APBD	DISPAR
<b>PROGRAM 3 : PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA</b>												
Kegiatan 1 : Bimtek Penerapan Pendaftaran Usaha dan Standar Usaha Pariwisata	1.1 Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang diberikan pelatihan tentang Penerapan Standar Usaha Pariwisata	orang	200	200	100	100	100	100	100	1.370	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP)	1.2 Jumlah pelaku usaha pariwisata yang diadvokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP)	orang	0	0	0	0	50	0	100	700	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Pelatihan Kemudahan Investasi dan Perizinan Pariwisata	1.3 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kemudahan Investasi dan Perizinan Pariwisata	orang	0	0	0	0	50	100	100	1.250	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Akomodasi dan MICE	1.4 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Akomodasi dan MICE	orang	0	0	0	0	100	0	100	600	APBD	DISPAR
Kegiatan 5 : Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Makan Minum	1.5 Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Makan Minum	orang	0	0	0	0	100	100	100	900	APBD	DISPAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>PROGRAM 4: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA</b>											
Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata	orang	200	200	0	0	100	200	200	1.050	APBD	DISPAR
Kegiatan 2 : Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata	Orang	800	900	100	75	100	100	200	1.406	APBD	DISPAR
Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	orang	0	200	75	0	0	100	0	376	APBD	DISPAR
Kegiatan 4 : Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Provinsi Kepri	orang	0	0	0	300	0	0	0	450	APBD	DISPAR



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</b>												
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>9.1.1 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Panjang jalan Provinsi baik Panjang jalan kondisi jelek</b>											
<b>PROGRAM 1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>												
a. Kegiatan pembangunan jalan di Kota Tanjungpinang	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	-	-	-	-	-	42.479,50	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
b. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	0,05	0,80	1,80	2,80	3,80	3,80	44.279,50	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
c. Kegiatan pembangunan jalan di Kota Batam	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	44.725,04	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
d. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Karimun	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	-	2,00	3,00	4,00	5,00	39.907,90	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
e. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	21.800,00	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
f. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00	31.197,50	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
g. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas	Panjang Jalan Baru yang Terbangun	Km	-	-	0,50	1,50	3,00	4,00	5,00	31.597,50	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
<b>PROGRAM 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>												
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi	2.1 Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	635,31	593,58	609,32	625,09	640,87	656,56	672,34	2.631,60	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.a . Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala pada ruas jalan provinsi di Kota Tanjungpinang	2.a Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	57,93	47,15	50,15	52,15	54,15	55,65	57,65	13.104,09	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Bintan	2.b Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	107,44	128,62	130,62	132,62	134,62	136,62	138,62	9.605,29	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2.c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kota Batam	2.c Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	101,45	88,96	93,96	98,96	102,96	107,96	111,96	12.002,99	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Karimun	2.d Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	109,53	104,34	107,34	110,34	113,34	116,84	119,84	10.183,53	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Lingga	2.e Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	133,83	126,96	127,96	129,46	131,46	133,46	135,46	11.655,71	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Natuna	2.f Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	96,97	72,97	74,71	76,21	78,21	79,21	80,71	11.585,52	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2.g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	2.g Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik	Km	28,16	24,58	24,58	25,35	26,13	26,82	28,10	9.000,00	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 9.1.2.c Jumlah pelabuhan strategis</b>												
<b>PROGRAM 1: Pembangunan Transportasi Laut</b>												
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Multifungsi Bongkar Muat Tanjung Uban	tersedianya Pelabuhan Bongkar muat tg.uban Uban	Unit	-	-	-	-	1	-	-	60.000	APBD	Dishub
Pembangunan Pelabuhan Pulau Berhala	tersedianya Pelabuhan P Berhala	Unit	-	-	-	1	-	-	-	15.000	APBD	Dishub
Pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat Belakang Padang	tersedianya Dermaga Pulau Kasu Barat	Unit	-	-	-	1	-	-	-	5.000	APBD	Dishub
Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian	tersedianya Pelabuhan Teluk Durian	Unit	-	-	-	-	1	-	-	20.000	APBD	Dishub
Pembangunan Dermaga Pasir Panjang Kecamatan Durai Kab. Karimun	tersedianya Dermaga Pasir Panjang Karimun	Unit	-	-	-	-	1	-	-	30.000	APBD	Dishub
<b>PROGRAM 2: Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut</b>												
Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Parit Rempak	meningkatnya kapasitas pelabuhan parit rempak	Unit	-	-	-	-	1	-	-	50.000	APBD	Dishub
Pembangunan ponton pelabuhan Sei Tenam Daik, Kab Lingga	tersedianya ponton di pel sei tenam	Unit	-	-	-	1	-	-	-	2.100	APBD	Dishub
Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Penagi	meningkatnya kapasitas pelabuhan penagi	Unit	-	-	-	-	1	-	-	30.000	APBD	Dishub
Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Pelantar I dan pelantar II	meningkatnya kapasitas pelabuhan pelantar TPI	Unit	-	-	-	-	1	-	-	60.000	APBD	Dishub

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Peningkatan Dermaga Wisata Pulau Penyengat	meningkatnya kapasitas dermaga P Penyengat	Unit	-	-	-	1	0	-	-	10.000	APBD	Dishub
Pengembangan dan Peningkatan Dermaga Pulau Teban Senayang	meningkatnya kapasitas pelabuhan P Teban	Unit	-	-	-	-	1	-	-	5.000	APBD	Dishub
Pembangunan ponton pelabuhan Kampung Asam Kec. Kundur Utara	meningkatnya kapasitas pelabuhan Kampung Asam	Unit	-	-	-	1	-	-	-	21.000	APBD	Dishub
<b>INDIKATOR SDGs : 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita</b>												
<b>Program Pengembangan Industri Unggulan</b>												
Pelatihan Diversifikasi dan Pengembangan Produk Pengolahan Hasil Laut menjadi Bahan Baku Produk kosmetik dan farmasi di Provinsi Kepri.	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan provinsi Kepri.	Pelaku Industri					1			200	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pelatihan Diversifikasi dan Pengembangan Produk Pengolahan berbasis komoditas unggulan agro lainnya (pertanian/perkebunan) di provinsi Kepri.	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan provinsi Kepri.	Pelaku Industri				1	1	1	1	600	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b>		<b>9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur</b>										
<b>PROGRAM 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>												
<b>Kegiatan 1:</b> Pelatihan AK3 Umum Di Batam	Terlaksananya Pelatihan AK3 Umum Di Batam	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 2:</b> Pelatihan Scaffolding Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Scaffolding Di Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 3:</b> Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 4:</b> Pelatihan Rigger Di Batam	Terlaksananya Pelatihan Rigger Di Batam	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 5:</b> Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 6:</b> Pelatihan Mechatronics	Terlaksananya Pelatihan Mechatronics	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 7:</b> Pelatihan Servis Sepeda Motor	Terlaksananya Pelatihan Servis Sepeda Motor	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 8:</b> Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)	Terlaksananya Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 9:</b> Pelatihan Operator Alat Berat	Terlaksananya Pelatihan Operator Alat Berat	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 10:</b> Pelatihan Menjahit	Terlaksananya Pelatihan Menjahit	Paket	1	1	1	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 11:</b> Pelatihan Bubut Logam	Terlaksananya Pelatihan Bubut Logam	Paket	1	1	1	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 12:</b> Pelatihan Listrik Di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga	Terlaksananya Pelatihan Listrik Di kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 13:</b> Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 14:</b> Pelatihan Sertifikasi P3K	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi P3K	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 15:</b> Pelatihan Komputer	Terlaksananya Pelatihan Komputer	Paket	1	1	1	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 16:</b> Pelatihan Teknik Listrik	Terlaksananya Pelatihan Teknik Listrik	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 17:</b> Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 18:</b> Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 19:</b> Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 20:</b> Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 21:</b> Pelatihan Sertifikasi Mesin Pita Transport	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Mesin Pita Transport	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 22:</b> Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 23:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 24:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 25:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Perancah	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Perancah	Paket	1	1	0	1	1	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 26:</b> Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 27:</b> Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer	Terlaksananya Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer	Paket	1	1	0	0	0	1	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 28:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 29:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Paket	1	1	0	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 30:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Akuntansi	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Akuntansi	Paket	1	1	0	0	0	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 31:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 32:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 33:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 34:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 35:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Rotating Equipment	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Rotating Equipment	Paket	1	1	0	0	0	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 36:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding	Paket	1	1	0	0	0	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 37:</b> Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 38:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 39:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Forklift	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Forklift	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 40:</b> Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 41:</b> Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)	Terlaksananya Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)	Paket	1	1	1	1	1	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 42:</b> Pelatihan AC	Terlaksananya Pelatihan AC	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 43:</b> Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer	Terlaksananya Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Kegiatan 44:</b> Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)	Terlaksananya Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 45:</b> Pelatihan Teknik Otomotif	Terlaksananya Pelatihan Teknik Otomotif	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 46:</b> Pelatihan Las	Terlaksananya Pelatihan Las	Paket	1	1	1	1	1	1	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 47:</b> Pelatihan Welding Inspector Level 1	Terlaksananya Pelatihan Welding Inspector Level 1	Paket	1	1	0	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 48:</b> Pelatihan Las Dasar	Terlaksananya Pelatihan Las Dasar	Paket	1	1	1	0	0	0	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 49:</b> Pelatihan Las 3G	Terlaksananya Pelatihan Las 3G	Paket	1	1	1	1	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 50:</b> Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 51:</b> Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII	Paket	1	1	1	0	0	0	0	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS
<b>Kegiatan 52:</b> Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Paket	1	1	0	1	1	1	1	(8.5.1)	APBD	DISNAKE RTRANS

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs : 9.3.1* Tumbuhnya Industri Kecil Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 9.3.1 (a) Jumlah Industri Kecil</b>												
<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>												
Kegiatan 1 : Pendataan dan Monitoring industri kecil dan menengah	1.1 Jumlah Industri Kecil yang di monitoring dan di data	BLN			12					200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 2: Fasilitasi dan Bantuan Legalitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	2.1 Jumlah IKM yang terfasilitasi Legalitas Usahanya	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 3: Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Produk dari Buah Kelapa	3.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 4: Peningkatan Produk IKM sektor pangan melalui Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	4.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM						15		200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 5: Sosialisasi Sertifikat Halal dan PIRT di 7 Kab/Kota	5.1Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 6: Bantuan Sertifikat Halal dan PIRT Bagi Produk Pangan IKM	6.1Jumlah IKM yang mendapat bantuan sertifikat halal	IKM			50	50		50		1.400	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 7: Sayembara Produk Unggulan IKM Sektor Pangan	7.1 Jumlah IKM Unggulan Hasil Sayembara	IKM			10					50	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 8: Sayembara Wirausaha Baru Sektor Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Provinsi Kepulauan Riau	8.1 Jumlah Wirausaha Baru	WUB				10			100	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 9: Fasilitasi Magang bagi wirausaha baru ke sentra-sentra industri di pulau jawa	9.1 Jumlah Wirausaha Baru	WUB						10	80	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 10: Fasilitasi Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	10.1 Jumlah Wirausaha Baru	WUB						10	200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 11: Bimtek Pengolahan Pangan Berbahan Baku Ikan/Hasil Laut	11.1 Jumlah IKM yang dibina	IKM			15				75	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 12: Peningkatan Mutu Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan/Hasil Laut	12.1 Jumlah IKM yang dibina	IKM			15			15	800	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 13: Pelatihan Pembuatan Aneka Produk Furnitur dari Bahan Kayu	13.1 Jumlah IKM Yang dibina	IKM						15	300	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 14: Partisipasi dalam Pameran Jakarta Fair	14.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM	12	6	6				1.884,6837	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 15: Partisipasi Pameran Produk Kepri di Luar Daerah	15.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM			12				300	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 16: Partisipasi Pameran Produk Kepri di Dalam Daerah	16.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM			20				450	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 17: Fasilitasi Pameran Produk Pangan Kepri	17.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 18: Pendataan dan Pengembangan Database IKM Provinsi Kepulauan Riau	18.1 Jumlah Bulan Pendataan	BLN			12	12	12	12		950	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 19: Gelar Produk IKM Kepri	19.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promo	IKM		4						250	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 20: Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Baku Sagu	20.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM						15		200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 21: Pelatihan Pengasinan dan Pengasapan Ikan	21.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM						15		70	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 22: Pelatihan Pengolahan Pangan dari Buah-buahan	22.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 23: Pelatihan Pengolahan Batang Kelapa menjadi aneka produk furnitur	23.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM					15			200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 24: Pelatihan Peningkatan Mutu dan Design Produk Sandang	24.1 Jumlah IKM Sandang yang dilatih	IKM							40	200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 25: Dukungan Operasional Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau	25.1 Terlaksananya operasional Dekranasda	bulan	12	12	12	12	12	12	12	7.440.847.500	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 26:Kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Operasional dan Pengembangan Klinik Kemasan & Design	26.1 Jumlah IKM yang difasilitasi	IKM	200	200	200	250	250	250	250	3.479.355.595	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 27: Pengadaan Tanah Gedung Rumah Kemasan	27.1 Tersedianya Lahan Gedung Rumah Kemasan	M2					5000			3.750	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 28: DED Pembangunan Gedung Kemasan Disperindag Prov Kepri	28.1 Tersusunnya DED Pembangunan UPT Kemasan bagi Industri Kecil Menengah	Dokumen					1			200	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 29: Pembangunan Fisik Rumah Kemasan Disperindag Prov Kepri	28.1 Tersediaan Fasilitas Fisik Gedung UPT Kemasan	Unit						1		2.000	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 30: Penyediaan sarana dan Prasarana Gedung Rumah Kemasan	29.1 Tersediaan Sarana dan Prasarana Gedung UPT Kemasan	Kegiatan						1	1	2.300	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 31: Kegiatan Pelatihan bagi para Fasilitator GKM bagi aparat pembina Kab/Kota dan pelaku IKM se Provinsi Kepulauan Riau	30.1 Jumlah tenaga Fasilitator	orang			0				40	200	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Kegiatan 32: Pelatihan Peningkatan Mutu Kerajinan berbasis Berbahan Baku Lokal	31.1 Jumlah Pengrajin	Orang				25				75	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 34: Bimbingan Teknis dan Penerapan Standar Mutu Produk Aneka Industri	32.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15			15	15	600	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 35: Pameran dan promosi IKM baik lokal / Nasional	33.1 Jumlah IKM yang difasilitasi Promosi/pameran	IKM					12			150	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 36: Fasilitasi Galery /Showroom /Display Produk bagi Pelaku IKM	34.1 Tersedianya tempat Pemasaran bagi pelaku IKM	Unit			1			1	1	1.200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 37: Kegiatan Promosi Produk IKM Unggulan Melalui Media Lokal maupun Nasional	35.1 Terlaksananya promosi produk IKM Unggulan	Produk								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 38: Temu Bisnis Pelaku Industri Kecil Menengah	36.1 Terlaksananya Forum Temu Bisnis Pelaku IKM Unggulan	Kegiatan								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 39: Pelatihan kewirausahaan CEFE dan AMT bagi Pelaku IKM	37.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			40				40	700	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 38:Magang bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Daerah	38.1 Jumlah IKM yang mengikutimagang	IKM								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 39: Pelatihan Pembuatan Cendera Mata Berbahan baku Lokal bagi Pelaku IKM/Wirausaha Baru	39.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			35			35	35	570	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 40: Pelatihan Keterampilan Resparasi Alat Elektronik	40.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM							40	200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 41: Pameran Industri Kreatif dan Produk Khas Daerah	41.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi	IKM			35					482,55	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 42: Pelatihan Aneka Kerajinan Bagi IKM	42.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15	40	40	40	40	1.187,15	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 43: Partisipasi pada Pameran Produk Kerajinan dan Industri Kreatif	43.1 Jumlah IKM yang mengikuti Promosi	IKM			20	20				627	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 44: Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku IKM Kepri	44.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			20					195	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 45: Pelatihan Pengolahan Limbah Gonggong Menjadi Aneka Produk Kerajinan di Batam	45.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM			20					177	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 46: Feasibility Study Pendirian Rumah Kemasan di Provinsi Kepulauan Riau	46.1 Dokumen Feasibility Study	Dokumen				1				200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 47: Bimtek Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan bagi IKM	47.1 Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan bagi IKM	%				100				310	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 48: Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Pangan dan Bantuan Peralatan bagi IKM	48.1 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Pangan dan Bantuan Peralatan bagi IKM	%			100	100	100	100	100	1.340	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 49: Partisipasi dalam Pameran Produk Pangan Kepri	49.1 Terlaksananya Partisipasi dalam Pameran Produk Pangan Kepri	%			100	100				934,05	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 50: Kajian Pengembangan Batik dan Tenun Songket Khas Kepulauan Riau	50.1 Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Batik dan Tenun Songket Khas Kepulauan Riau	Dokumen				100				250	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 51: Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan Bagi IKM Pangan	51.1 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan Bagi IKM Pangan	%								-	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 52: Pelatihan Kewirausahaan , Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk IKM	52.1 :Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan , Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk IKM	%				100				200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 53: Pendataan dan Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah	53.1Terlaksananya Pendataan dan Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah	%			100					250	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 54: Partisipasi Pada Pameran Produk Unggulan Daerah	54.1 Terlaksananya Partisipasi Pada Pameran Produk Unggulan Daerah	%			100					500	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 55: Pelatihan Kewirausahaan bagi IKM	55.1 Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi IKM	%			100					200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 56: Pameran Produk IKM Kepri di Luar Daerah	56.1 Terlaksananya Pameran Produk IKM Kepri di Luar Daerah	%			100					250	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 57: Pelatihan Aneka Kerajinan dari Bahan Perca di Batam	57.1 Terlaksananya Pelatihan Aneka Kerajinan dari Bahan Perca di Batam	%			100					200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 58: Partisipasi Pada Pameran Kepri Expo	58.1 Terlaksananya Partisipasi Pada Pameran Kepri Expo	%			100					200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 59: Partisipasi Pada Pameran Investrade Expo	59.1 Terlaksananya Partisipasi Pada Pameran Investrade Expo	%			100					300	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 60: Pameran Produk IKM Kepri di Dalam Daerah	60.1 Terlaksananya Pameran Produk IKM Kepri di Dalam Daerah	%			100					400	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 61: Pelaksanaan Pelatihan Industri berbasiskan Pangan	61.1 Tersedianya IKM yang dapat mengolah bahan pangan menjadi bahan jadi	IKM		20						150	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 62: Partisipasi Pada Pameran Sail Karimata	62.1 Terlaksananya Pameran Sail Karimata	IKM		5						50	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 63: Fasilitasi Pameran Produk Dalam Negeri di Bandung	63.1 Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Dalam Negeri di Bandung	IKM		4						233,750	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 64: Partisipasi Pameran Produk Khas Daerah di Batam	64.1 Terlaksananya Partisipasi Pameran Produk Khas Daerah di Batam	IKM		4						214,997	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Kegiatan 65: Pelatihan Kerajinan Rajutan di Batam	65.1 Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Rajutan di Batam	IKM		4						225	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Kegiatan 66: Partisipasi Pameran Produk Khas Daerah di Semarang	IKM		4						242,9	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri	
Kegiatan 67: Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri di Jogjakarta	IKM		4						220,35	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri	
Kegiatan 68: Pelatihan Mejahit dan Bantuan Peralatan Menjahit di Tanjung Pinang	%		100						150	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri	
<b>INDIKATOR SDGs: 9.4.1 (a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
1.3 Inventarisasi Gas Rumah Kaca Se Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data GRK Kab/Kota	Kab/Kota	-	-	-	7	7	7	7	430	APBD	DLHK
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>9.c.1(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.</b>											
<b>PROGRAM 1. E-GOVERNMENT</b>												
1. Pengadaan sarana dan prasarana jaringan TIK	Tersedianya sarana dan prasarana jaringan TIK	Kegiatan	NA	NA	NA	1	1	1	1	8.605	APBD	DINAS KOMINFO PROVINSI KEPRI
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan TIK	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan TIK	Kegiatan	NA	NA	NA	1	1	1	1	16.542	APBD	DINAS KOMINFO PROVINSI KEPRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>Program Perencanaan sosial budaya</b>												
Kegiatan 1: Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah laporan sinkronisasi perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	2.1Jumlah laporan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	0	0	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 3: Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kepulauan Riau	3.1Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 4: Pemutakhiran Database Kemiskinan berbasis Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah dokumen database pemutakhiran data kemiskinan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 6: Kajian tentang strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	4.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	(1.2.1)	APBD	BARENLIT BANG
<b>INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.</b>												
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>												
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	53	30	56	52	179	179	179	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	40	40	40	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	914	7.400	8.972	0	721	721	721	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	75	20	51	38	46	46	46	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	30	30	30	(1.2.1)	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	1.753	2.750	2.508	0	178	178	178	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	0	0	8	10	25	25	25	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	0	0	0	0	30	30	30	(1.2.1)	APBD	Dinsos
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	0	0	276	0	101	101	101	(1.2.1)	APBD	Dinsos

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b> <b>10.1.1. (b) . Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan</b> <b>10.1.1. (c) . Jumlah desa tertinggal</b> <b>10.1.1. (d) . Jumlah desa mandiri</b>												
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 1: Kajian tentang strategi pengembangan Pemberdayaan masyarakat perbatasan	1.1Jumlah Dokumen Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	350	APBD	BARENLIT BANG
Kegiatan 2: Kajian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	2.1Jumlah Dokumen Penelitian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	300	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>												
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	1.1. Jumlah Kabupaten yang mendapat pembinaan	Kab	NA	5	5	5	5	5	5	1.965,193	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2.1 Jumlah peserta yang ikut serta	orang	NA	0	35	35	0	35	40	990	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 3: Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa	3.1 Jumlah pendamping desa yang dilatih	orang	NA	0	45	0	0	0	0	259,3520	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 4: Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel	3.1 Jumlah Kader yang dilatih	orang	NA	0	50	0	50	50	75	1.066,1211	APBD	DPMD DUKCAPIL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 5: Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS dan pemakai narkoba	orang	NA	0	32	0	0	0	80	396,7321	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 7: Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa dan Desa Adat	des	NA	0	1	0	1	1	1	814,8811	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 8: Pembinaan dan Penguatan Sekretariat Pokjantal Posyandu	orang	NA	33	35	0	35	35	35	1.160	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 9: Peningkatan Kapasitas BPD	lembaga	NA	0	0	0	0	80	80	510	APBD	DPMD DUKCAPIL
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>											
Kegiatan 1: Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	BUMDesa	15	25	35	55	80	105	130	1.150	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 2: Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDesa	BUMDesa	6	12	25	25	25	35	25	1.330	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 3: Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)Desa/ Kelurahan	Kelompok UEM	0	0	49	35	0	35	63	1.400	APBD	DPMD DUKCAPIL



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna</b>												
Kegiatan 1: Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi Kepri	Jumlah TTG yang dilombakan	TTG	0	0	30	30	30	30	30	2.039,24	APBD	DPMD DUKCAPIL
<b>Program Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa</b>												
Kegiatan 1: Evaluasi Perkembangan Desa/ kelurahan	Jumlah deskel yang memiliki status Perkembangan desa/ kel	Dsea/ kel	0	0	0	0	200	332	416	2.540,329	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 2: Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang ikut raker	orang	0	275	275	275	275	275	275	2.192,802	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 3: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	orang	0	0	156	150	125	150	150	1.543,828	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 4: Rapat Kerja Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur pemdes yang mengikuti raker	orang	0	0	226	0	275	275	275	2.279,335	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 5: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa bagi Aparatur Desa di Provinsi Kepri	Jumlah peserta yang dilatih	orang	0	0	0	0	40	40	60	700	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 6: Evaluasi Data Profil desa/ kel	Jumlah Desa/ kel Yang memutakhirkan Entri Data	Des/Ke 1	0	0	120	0	180	0	0	761,143	APBD	DPMD DUKCAPIL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 7: Pembinaan pelaksanaan kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Ikut Bintek Aset Desa	Des/Ke 1	0	0	0	0	275	0	275	495	APBD	DPMD DUKCAPIL
<b>Program Perencanaan sosial budaya</b>												
Kegiatan 1: Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau	Dokum en	0	0	0	0	1	1	1	1,220	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>												
Kegiatan 2: Penyusunan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau	2.1Jumlah Dokumen Laporan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau	Dokum en	0	0	0	0	0	0	1	(8.1.1)	APBD	BARENLIT BANG
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>												
Kegiatan 1: Kajian Evaluasi dan Implementasi Pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau	1.1Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian	Dokum en	0	0	0	1	0	0	0	300	APBD	BARENLIT BANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP menurut sumbernya</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 17.1.1 (a) Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya</b>												
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>												
Kegiatan 1. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.	1. Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan	izin/non izin	NA	1,264	1.011	850	860	870	880	5.850,683	APBD	DPMPPTSP
Kegiatan 2. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	2. Jumlah Izin dan dan Non Izin yang di layani di Mall Pelayanan Publik	izin/non izin	NA	NA	NA	600	625	650	675	2.209,540	APBD	DPMPPTSP
Kegiatan 3. Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	3. Jumlah pegawai/peserta pelatihan peningkatan SDM	Orang	NA	NA	30	35	40	45	50	1.216,640	APBD	DPMPPTSP
Kegiatan 4. Pembuatan Aplikasi Pelayanan Perizinan PTSP	4. Jumlah Aplikasi	Aplikasi	NA	NA	1	-	1	1	-	300	APBD	DPMPPTSP
<b>INDIKATOR SDGs: 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik</b>												
<b>Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah</b>												
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT Anambas	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	395	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	1.030	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	714	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	728	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	750	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN KB di Kota Batam	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	1.342	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	810	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN KB di UPTD Batu Aji	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	743	APBD	BP2RD
Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	436	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tanjung Batu	Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	Kali		4	4	4	4	4	4	461	APBD	BP2RD
Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB, dan AP KPPD Natuna	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Natuna	Laporan		1	1	1	1	1	1	600	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kab. Lingga	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kab. Lingga	Laporan		1	1	1	1	1	1	570	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kota Tanjungpinang	Laporan		1	1	1	1	1	1	790	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kota Batam	Laporan		1	1	1	1	1	1	1.935	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kab. Bintan	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kab. Bintan	Laporan		1	1	1	1	1	1	560	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kab. Karimun	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kab. Karimun	Laporan		1	1	1	1	1	1	605	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kijang	Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB, P-AP di Kijang	Laporan		1	1	1	1	1	1	375	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak	terlaksananya Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak	Bulan		12	12	12	12	12	12	975	APBD	BP2RD
Penyusunan dan Updating Data NJKB Provinsi Kepri	Tersusunnya Updating Data NJKB Provinsi Kepri	Dokumen		1	1	1	1	1	1	850	APBD	BP2RD
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Bulan		12	12	12	12	12	12	1.250	APBD	BP2RD
Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Bulan				12				200	APBD	BP2RD
Optimalisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan PAP)	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Bulan				12			12	840	APBD	BP2RD
Verifikasi Pasif Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Riau	tersedianya data wajib pajak	Dokumen				1			1	400	APBD	BP2RD
Forum Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam rangka penggalan sumber sumber PAD prov. Kepri	Terbinanya forum koordinasi dan kerjasama stakeholder dalam rangka penggalan sumber-sumber PAD Prov. Kepri	Kegiatan			1	1	1	1	1	1.329	APBD	BP2RD
Pendataan Wajib Pajak Air Permukaan	tersedianya data wajib pajak AP	Dokumen		1		1			1	200	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau KPPD Batam	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Bulan		12		12	12	12	12	2.206	APBD	BP2RD
Penyusunan Pelaporan Penerimaan PKB, BBN-KB dan AP KPPD Batam	tersusunnya laporan PKB, BBN-KB, dan AP	Dokumen				1			1	250	APBD	BP2RD
Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau KPPD Pinang	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Bulan				12	12	12	12	580	APBD	BP2RD
Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau KPPD Karimun	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Bulan				12	12	12	12	540	APBD	BP2RD
Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau KPPD Bintan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Bulan				12	12	12	12	440	APBD	BP2RD
Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau KPPD Natuna	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Bulan				12	12	12	12	500	APBD	BP2RD
Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri	terbinanya Tim Kesamsatan	Kegiatan		1		1	1	1	1	840	APBD	BP2RD
Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan PBB-KB	Meningkatnya Penerimaan PBB-KB	Bulan		12		12			12	240	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan rekonsiliasi dengan Wajib Pungut	Bulan			12						APBD	BP2RD
lanjutan penyusunan ranperda PAJAK daerah	tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Dokumen		1	1					100	APBD	BP2RD
Pengadaan SAMSAT Drivethru (Karimun dan Tanjungpinang)	terlaksananya FGD dan koordinasi dalam penggalian potensi PAD	KPPD			2					389	APBD	BP2RD
Pengadaan Unit Mobil Samsat Keliling (untuk KPPD Batam, Tanjungpinang, dan Karimun)	tersedianya kendaraan Samsat Keliling	Unit			3					1.591	APBD	BP2RD
Pengadaan Layanan Samsat pada Mall Pelayanan Samsat di Sumatera Expo	tersedianya Layanan Samsat Mall di Sumatera Expo	Unit			1					100	APBD	BP2RD
Pemeriksaan Verifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) Provinsi Kepri	Terlaksananya Verifikasi Penerimaan PBB-KB Prov. Kepri	Dokumen			1					155	APBD	BP2RD
Pengelolaan Bis Samsat Keliling KPPD Batam	Terlaksananya operasionalisasi bis samsat keliling KPPD Batam	Bulan		12	12					310	APBD	BP2RD
Pendataan Alat Berat di Kota Batam	Terdatanya Jumlah Alat Berat di Batam	Laporan			1					143	APBD	BP2RD



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pendataan Alat Berat dan Air Permukaan di Tanjungpinang	Laporan Data Alat Berat dan Air Permukaan di Kota Tanjungpinang	Laporan			1					100	APBD	BP2RD
Pendataan Alat Berat di Tanjung Balai Karimun	Laporan realisasi penagihan aktif pajak daerah dan data tunggakan pajak	Laporan			1					95	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di tanjung batu	Laporan Data Alat Berat di Kab Karimun	Laporan			1					296	APBD	BP2RD
Pendataan Alat Berat di Bintan	Laporan Data Alat Berat di Kab Bintan	Laporan			1					97	APBD	BP2RD
Pendataan Alat Berat di Lingga	Laporan Data Alat Berat di Kab Lingga	Laporan			1					71	APBD	BP2RD
Penagihan Aktif tunggaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kab. Anambas	Laporan realisasi penagihan aktif pajak daerah dan data tunggakan pajak	Laporan			1					275	APBD	BP2RD
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Batam	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Batam	Laporan					1	1	1	443	APBD	BP2RD
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjungpinang	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Tanjungpinang	Laporan					1	1	1	400	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjung Balai Karimun	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Karimun	Laporan					1	1	1	395	APBD	BP2RD
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Bintan	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Bintan	Laporan					1	1	1	397	APBD	BP2RD
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Lingga	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Lingga	Laporan					1	1	1	296	APBD	BP2RD
Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Natuna	Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Natuna	Laporan					1	1	1	296	APBD	BP2RD
Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif	Terselenggaranya Penerapan Pajak kendaraan bermotor Progresif	Dokumen						1	1	300	APBD	BP2RD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara negara kurang berkembang</b>												
<b>17.5.1.(a) Jumlah Nilai Realisasi PMA</b>												
<b>17.5.1.(b) Jumlah Nilai Realisasi PMDN</b>												
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>												
Kegiatan 1: Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	1. Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	Laporan	NA	NA	60	70	80	85	90	2.853,24	APBD	DPMPPTSP
Kegiatan 2: Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal	2. Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan. bimbingan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Orang	NA	30	40	40	55	60	60	2.315,65	APBD	DPMPPTSP
Kegiatan 3: Kegiatan Updating dan Penyempurnaan RUPM Prov Kepri	3. Jumlah dokumen Revisi RUPM	Dokumen	NA	NA	1	0	1	0	1	509,96	APBD	DPMPPTSP
<b>17.11.1 (a) Pertumbuhan ekspor produk non migas</b>												
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>												
Desiminasi Regulasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Stakeholder yang mengikuti Desiminasi Regulasi Peraturan Terbaru Perdagangan Luar Negeri	Stakeholder	40		40	40	40	40	40	750	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum bagi pengusaha di Provinsi Kepri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum	Pelaku Usaha			30	30			30	602,5	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FGD Pengembangan Ekspor Prov. Kepri	Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor	Dokumen			1				1	300	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pengembangan Database Ekspor Impor Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Database Perdagangan Luar Negeri Prov. Kepri	Dokumen/ Web			1	1			1	480	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pameran Dagang dan Promosi Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran dagang dan Promosi Luar Negeri	Pelaku Usaha			4	4		4		1.650	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Ekspor di Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang meng mengikuti Pameran di Dalam Negeri	Pelaku Usaha					4	4		405	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengusaha Untuk Pasar Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Prosedur untuk Pasar	Pelaku Usaha			30				30	360	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Business Matching dan Partisipasi pada Trade Expo Indonesia Jakarta	Jumlah Stakeholder yang mengikuti Kerjasama Perdagangan Bilateral	Pelaku Usaha			4				4	450	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
FGD Evaluasi Pelaksanaan MEA	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan MEA di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen									APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	2		300	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Partisipasi Pameran Halal Fiesta di Malaysia	Terlaksananya Partisipasi Pameran Halal Fiesta di Malaysia	%			1					400	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Partisipasi Pada Pameran MIHAS di Malaysia	Terlaksananya Partisipasi Pada Pameran MIHAS di Malaysia	%			1					400	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Partisipasi pada Pameran Ekspor Daerah di Batam	Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Ekspor Daerah di Batam	%		1	1					199,2502	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Partisipasi pada Jiattex Jogja Expo	Terlaksananya Partisipasi pada Jiattex Jogja Expo	%			1					250	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Pembuatan Video Audio Visual prosedur Ekspor Impor	Terlaksananya Pembuatan Video Audio Visual prosedur Ekspor Impor	%				1			1	270	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Sosialisasi Fasilitasi FTA	Terlaksananya Sosialisasi Fasilitasi FTA	%					1			150	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Database Ekspor Impor Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Database Ekspor Impor Provinsi Kepulauan Riau	%			1					335	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Partisipasi Pameran Miattex Mataram	Terlaksananya Partisipasi Pameran Miattex Mataram	%			1					340	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Sosialisasi Perjanjian Perundingan Internasional	Terlaksananya Sosialisasi Perjanjian Perundingan Internasional	%			1					200	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Pelatihan Pengembangan Produk Untuk Pasar Ekspor	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Produk Untuk Pasar Ekspor	%			1					300	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri
Partisipasi Pameran Bittra di Bali	Terlaksananya Partisipasi Pameran Bittra di Bali	%			1					300	APBD Provinsi Kepri	Disperind ag Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FGD Implementasi MEA	Terlaksananya FGD Implementasi MEA	%			1					200	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Pameran Dagang dan Temu Bisnis ke Luar Negeri	Terlaksananya pameran dagang dan temu usaha/bisnis di luar negeri (Belanda)	Paket		1						15,7623	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MEA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan MEA di dalam dan luar negeri bagi Provinsi Kepri	Kegiatan		1						229,912	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Partisipasi Pameran Halal Expo di Malaysia	Terlaksananya Pameran Halal Expo di Malaysia	Kegiatan		1						358,1646	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
<b>17.11.1 (c) Pertumbuhan ekspor produk non migas</b>												
<b>Program Penataan Struktur Industri</b>												
Pemetaan Potensi Sektor Industri Manufaktur Berbasis Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Industri Manufaktur						1		1	100	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Data Base Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data tentang Industri Manufaktur					1		1	1	100	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri
Penyusunan RANPERDA Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Kepri	Terlaksananya Rapat-rapat pembahasan dalam Perumusan dan Penyusunan Dokumen Ranperda RPIP Provinsi Kepri	Dokumen dan Sertifikasi		1						200	APBD Provinsi Kepri	Disperindag Prov. Kepri

**Matrik Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Lingkungan**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b>												
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</b>											
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>											
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/AIR MINUM</b>												
Kegiatan Pengelolaan / Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan pada Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah SR dari SPAM terbangun/ditingkatkan /dipelihara	Unit	72,01	89,44	60					7.400,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengelolaan / Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan pada Kawasan Strategis Provinsi Pulau Dompok	Jumlah SR dari SPAM terbangun/ditingkatkan /dipelihara	Unit	72,01	89,44	340					1.500,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan Pengelolaan / Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan pada Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah SR dari SPAM terbangun/ditingkatkan /dipelihara	Unit	72,01	89,44	308					350,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih & Air Minum	Jumlah Laporan	Laporan				5	5	5		3.350,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Anambas	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%				0,003	0,002	0,001		1.430,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Batam	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%				0,003	0,002	0,001		1.430,00	APBD	Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%					0,003	0,002	0,001	1.430,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Karimun	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%					0,003	0,002	0,001	1.430,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%					0,003	0,002	0,001	1.430,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Natuna	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%					0,003	0,002	0,001	1.430,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Kota Tanjungpinang	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%					0,003	0,002	0,001	4.154,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Anambas	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Batam	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Karimun	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Natuna	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang	Jumlah unit yang terpelihara	Unit					1	1	1	3.700,00	APBD	Dinas Perkim
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</b>											
<b>PROGRAM 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>												
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi, dan Daerah Pengairan Lainnya	1.1 Bertambahnya Luas Area Jaringan Irigasi	Hektar (Ha)	1.093,00	1.193,00	1.427,00	1.543,00	1.660,00	1.777,00	1.894,00	5.100	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Kegiatan 2: Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Waduk/Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	2.1 Bertambahnya Kapasitas Volume Sumber Air Baku	m3/tahun	25.315.905,00	27.805.571,00	29.602.145,00	31.583.745,00	33.663.926,00	35.895.777,00	38.244.626,00	5.500	APBD	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Indikator SDGs: 6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</b>												
<b>Indikator SDGs: 6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</b>												
<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>												
1.1 Orientasi Sanitarian Puskemas dalam Pelaksanaan STBM	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	14,3	43	43	57	57	70	70	570	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	%	11,78	15,63	20,43	25,24	28,85	31,25	33,65			
	Persentase Penduduk Stop Buang Air Sembarangan (BABS)	%	42	45	50	55	60	65	70			
1.2 Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan STBM	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	14,3	43	43	57	57	70	70	435	APBD	Dinkes Provinsi
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	%	11,78	15,63	20,43	25,24	28,85	31,25	33,65			
	Persentase Penduduk Stop Buang Air Sembarangan (BABS)	%	42	45	50	55	60	65	70			
1.3 Pengawasan Kualitas Air Minum	Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan	%	20	25	30	35	40	45	50	475	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.4 Orientasi Pelayanan Kesling di Puskesmas	Persentase Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	55	58	60	63	65	68	72	350	APBD	Dinkes Provinsi
1.5 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis	Persentase RS yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	%	10	17	23	30	35	40	45	165	APBD	Dinkes Provinsi
1.6 Pemetaan Risiko Keamanan Pangan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	8	12	17	24	30	35	40	35	APBD	Dinkes Provinsi
1.7 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pengawasan keamanan Pangan ( <i>Food Inspector HSP</i> )	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	8	12	17	24	30	35	40	355	APBD	Dinkes Provinsi
1.8 Penguatan Kelembagaan Forum Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Kab/Kota Binaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Kabupaten/ Kota	2	3	4	4	5	5	6	165	APBD	Dinkes Provinsi
1.9 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Kabupaten/ Kota	2	3	4	4	5	5	6	518	APBD	Dinkes Provinsi
1.10 Pertemuan Penguatan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim	%	-	1	2	4	5	6	7	233,351	APBD	Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.</b>												
<b>PROGRAM Penelitian, Mitigasi dan pelayanan geologi sumber daya mineral dan air tanah</b>												
Kegiatan 1: Penyusunan Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau	1.1. Dokumen Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah	Dok	-	-	-	1	-	1	1	550	APBD	ESDM
<b>TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah Kawasan permukiman kumuh perkotaan</b>												
<b>PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN LAYANAN DASAR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN</b>												
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab/Kota	Luas permukiman kumuh	Ha		823,4 4	752,6 2	60	0	0	0	6.305	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Perdesaan Potensial	Luas permukiman kumuh	Ha		823,4 4	752,6 2	60	0	0	0	2.703	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten/Kota	Luas permukiman kumuh	Ha		823,4 4	752,6 2	60	0	0	0	46.905	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Pesisir, Pulau-Pulau Kecil/ Terluar/ Perbatasan	Luas permukiman kumuh	Ha		823,4 4	752,6 2	60	0	0	0	9.500	APBD	Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Pesisir/Nelayan Perkotaan	Luas permukiman kumuh	Ha		823,44	752,62	60	0	0	0	5.200	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis Provinsi Permukiman Khusus Pulau Dompak	Luas permukiman kumuh	Ha		823,44	752,62	60	0	0	0	350	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Kep. Anambas	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				6,89	4,3	9,35	6,85	4.000	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Batam	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				27,1	16,9	36,76	26,92	22.950	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Bintan	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				14,92	9,31	20,24	14,83	12.001	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Karimun	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				7,58	4,73	10,28	7,53	4.000	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Lingga	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				36,76	22,93	49,87	36,52	32.940	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Natuna	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				9,15	5,71	12,41	9,09	9.000	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Tanjungpinang	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha				22,9	14,28	31,06	22,75	20.038	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kabupaten Anambas	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit				0	1	1	1	1.782	APBD	Dinas Perkim
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kota Batam	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit				0	2	3	3	3.500	APBD	Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kabupaten Bintan	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	2	1	1	3.000	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kabupaten Karimun	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	1	2	2	2.100	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kabupaten Lingga	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	3	2	2	5.000	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kabupaten Natuna	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	2	1	1	3.000	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan di Kota Tanjungpinang	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	2	2	2	3.000	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, pulau-pulau kecil, terluar Anambas	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	2	1	2	3.000	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, pulau-pulau kecil, terluar di Kabupaten Natuna	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	1	2	2	2.100	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, pulau-pulau kecil, terluar di Kota Batam	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	1	2	1	2.550	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, pulau-pulau kecil, terluar di Kabupaten Bintan	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit			0	2	2	2	3.000	APBD	Dinas Perkim	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, pulau-pulau kecil, terluar di Kabupaten Karimun	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	unit				0	2	2	2	2.700	APBD	Dinas Perkim	
Kegiatan Fasilitasi Program Penyediaan Perumahan	Pemenuhan fasilitasi program penyediaan perumahan	Bulan					12	12	12	600	APBD	Dinas Perkim	
<b>INDIKATOR SDGs : 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</b>													
<b>PROGRAM Penanganan Tanggap darurat bencana</b>													
1. Peningkatan Kapasitas TRC dalam membantu korban bencana	1.2. Jumlah respontime personil TRC yang membantu korban bencana	Orang				15	15	15	15	1.350	APBD	BPBD Provinsi Kepri	
2. Siaga Darurat Bencana	2.2. Jumlah waktu/bulan respontime Siaga Darurat Bencana	Bulan		12	12	12	12	12	12	1.840,361	APBD	BPBD Provinsi Kepri	
<b>INDIKATOR SDGs : 11.5.1.(a). indeks resiko bencana (IRB)</b>													
<b>INDIKATOR SDGs : 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</b>													
<b>PROGRAM Pemulihan Pasca Bencana</b>													
1. Inventarisasi wilayah pasca bencana Provinsi Kepulauan Riau	1.3. Jumlah dokumen bencana yang terinventarisasi	Dokumen				1	1	0	1	1	973,5	APBD	BPBD Provinsi Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2. Penyusunan DED Wilayah Pasca Bencana	2.3. Jumlah DED Wilayah Pasca Bencana	Dokumen			1		1	1	1	1.187,567	APBD	BPBD Provinsi Kepri
3. Pemulihan dampak Sosial/Ekonomi/Psikologis Pasca Bencana	3.3. Jumlah Lokasi Pemulihan Sosial/Ekonomi/Psikologis Pasca Bencana	Lokasi					1	1	1	2.125	APBD	BPBD Provinsi Kepri
<b>INDIKATOR SDGs: 11.6</b>	<b>Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>											
<b>INDIKATOR SDGs: 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
Studi Kelayakan TPA Regional di Pulau Bintan	Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	411,008	APBD	DLHK
Penyiapan Pembangunan TPA Regional Pulau Bintan	Persiapan Pembangunan TPA Regional	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	100	APBD	DLHK
Penyusunan DED TPA Regional di Pulau Bintan	Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	450	APBD	DLHK
Pembangunan TPA Regional di Pulau Bintan	Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)	Unit	-	-	-	-	-	1	1	430	APBD	DLHK



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pengelolaan persampahan limbah domestik di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah sampah yang diangkut di gedung perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam 1 tahun	Ton	-	200	200	200	200	200	200	637,7	APBD	DLHK
kegiatan pengadaan tong sampah kabupaten bintang	tersedia tong sampah di kabupaten bintang (bintang utara)	Unit	-	-	106	-	-	-	-	95,075	APBD	DLHK
Kegiatan pengadaan peralatan bank sampah	1. terbinanya kelompok masyarakat pengelola bank sampah	Lokasi	-	3	-	-	-	3	3	150	APBD	DLHK
	2. tersedianya peralatan pengelolaan sampah											
Pengadaan Kapal Pembersih dan Pengangkut Sampah	tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah di provinsi kepri	Unit	-	-	-	-	2	-	-	200	APBD	DLHK
Pos Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH)	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH)	Kasus	10	11	4	-	-	-	-	197,061	APBD	DLHK
kegiatan peringatan hari peduli sampah nasional	terlaksananya peringatan hari peduli sampah nasional	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	50	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 11.6.1 (b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
Kegiatan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	Kab/Kota	3	5	5	7	7	7	7	758,713	APBD	DLHK
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan pembinaan & penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	Sekolah	8	10	23	26	30	35	40	4.428,465	APBD	DLHK
<b>INDIKATOR SDGs:</b>	<b>11.7.1 (a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.</b>											
<b>PROGRAM</b>												
Kegiatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang terbangun per Tahun	%					100	100	100	27.919	APBD	Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>INDIKATOR SDGs : 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</b>											
<b>PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>											
1. Partisipasi dalam rangka memperingati bulan pengurangan resiko bencana (PRB)	1.1. Dokumen PRB dan Jumlah pameran yang diikuti	Dokumen	1	1	1	1	1	1	(1.5.3)	APBD	BPBD Provinsi Kepri
2. Bimbingan Teknis Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana Kab/Kota	2.1. Jumlah Guru dan Murid sekolah/Madrasah yang mendapat Pelatihan	Orang		30	30	20	25	30	(1.5.3)	APBD	BPBD Provinsi Kepri
3. FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	3.1. Jumlah Kegiatan FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	Kali			2	2	2	2	(1.5.3)	APBD	BPBD Provinsi Kepri
4. Publikasi BPBD	4.1. Jumlah Publikasi Kebencanaan	Titik			6	4	6	5	(1.5.3)	APBD	BPBD Provinsi Kepri
5. Pembuatan Brosur dan Poster tentang Waspada Bencana	5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Brosur dan Poster tentang peningkatan waspada bencana			4	6			7	(1.5.3)	APBD	BPBD Provinsi Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
Pengawasan Tingkat Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup (Proper)	Perusahaan yang mendapat Peringkat Proper	Perusahaan	0	0	0	22	22	22	22	600	APBD	DLHK
<b>INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(b) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
	Jumlah pelaku Usaha/ Industri Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki pengelolaan Limbah B3 sesuai Standart	Industri	-	-	-	-	285	365			APBD	DLHK
Pengelolaan Limbah B3 Akibat Tumpahan Minyak di Kawasan Pesisir Kab. Bintan	Penyelesaian insidental kejadian pencemaran akibat tumpahan Minyak	Kabupaten	-	-	-	-	1	1		535	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3	Terlaksananya pengawasan dan monitoring pengelolaan limbah B3 serta jumlah izin dan rekomendasi yang dikeluarkan dan dievaluasi	Perusahaan	-	-	-	-	30	30		983,136	APBD	DLHK
<b>INDIKATOR SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>												
<b>PROGRAM Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2018-2021)/Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2017)</b>												
Kegiatan Pengadaan Bank Sampah kota batam	Tersedianya lokasi pengolahan Bank Sampah	Lokasi			1		-	-		270,409	APBD	DLHK
<b>TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</b>												
<b>INDIKATOR SDGs : 13. 1. 1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</b>												
<b>PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>												
1. Partisipasi dalam rangka memperingati bulan pengurangan resiko bencana (PRB)	1.1. Dokumen PRB dan Jumlah pameran yang diikuti	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1.5.3	APBD	BPBD Provinsi Kepri
2. Bimbingan Teknis Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana Kab/Kota	2.1. Jumlah Guru dan Murid sekolah/Madrasah yang mendapat Pelatihan	Orang			30	30	20	25	30	1.5.3	APBD	BPBD Provinsi Kepri
3. FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	3.1. Jumlah Kegiatan FGD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kab/Kota	Kali				2	2	2	2	1.5.3	APBD	BPBD Provinsi Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
4. Publikasi BPBD	4.1. Jumlah Publikasi Kebencanaan	Titik				6	4	6	5	1.5.3	APBD	BPBD Provinsi Kepri
5. Pembuatan Brosur dan Poster tentang Waspada Bencana	5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Brosur dan Poster tentang peningkatan waspada bencana				4	6			7	1.5.3	APBD	BPBD Provinsi Kepri
<b>INDIKATOR SDGs : 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>												
<b>PROGRAM Pemulihan Pasca Bencana</b>												
1. Inventarisasi wilayah pasca bencana Provinsi Kepulauan Riau	1.3. Jumlah dokumen bencana yang terinventarisasi	Dokumen			1	1	0	1	1	11.5.1.(a)	PM	PM
2. Penyusunan DED Wilayah Pasca Bencana	2.3. Jumlah DED Wilayah Pasca Bencana	Dokumen			1		1	1	1	11.5.1.(a)	APBD	BPBD Provinsi Kepri
3. Pemulihan dampak Sosial/Ekonomi/Psikologis Pasca Bencana	3.3. Jumlah Lokasi Pemulihan Sosial/Ekonomi/Psikologis Pasca Bencana	Lokasi					1	1	1	11.5.1.(a)	APBD	BPBD Provinsi Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs : 13.2.1 (a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).</b>												
<b>PROGRAM Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup</b>												
1. Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD GRK	1.1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan GRK	Dokumen	1	1	1					477,5	APBD	Barenlitbang
2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD GRK	2.1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan GRK	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1.870	APBD	Barenlitbang
<b>TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs:14.4.1 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.</b>												
<b>PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
Kegiatan 1: Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Pelatihan Pengawakan kapal perikanan	Orang	-	-	-	0	20	30	20	700	APBD	DKP
Kegiatan 2: Pengembangan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (unit)	piece/unit/paket	35600 pcs	36000 pcs	2925	1000	1500	1500	1500	16.844,513	APBD	DKP

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3: Pengembangan Kapal Perikanan	Jumlah unit kapal / perahu Penangkap ikan (unit)	Unit	679	698	476	300	408	441	441	13.849,514	APBD	DKP
Kegiatan 4: Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil	Usaha perikanan tangkap skala kecil: (Bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampan bahan fibre glass, sampan dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya	Unit	1232	1.250	457	300	400	400	400	32.796,137	APBD	DKP
Kegiatan 5 : Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan/tambatan perahu	Unit	4	4	3	1	1	1	1	18.898,004	APBD/DAK	DKP
<b>INDIKATOR SDGs: 14.6.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha</b>												
<b>PROGRAM Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>												
Kegiatan 1: Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Paket/ Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	36.956,705	APBD/DAK	DKP
	Terlaksananya Pertemuan Forum Penanganan TPP	Paket/ Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1			



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP di Daerah	POKMAS WAS	65	72	79	86	93	100	107			
	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bagi POKMAS dan POKMASWAS	Paket/ Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1			
	Rekrutmen dan pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K)	PPNS/Po lsius	0	2	3	5	7	9	9			
	Dukungan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut	Paket	-	-	1	1	1	1	1			
	Jumlah sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbangun dan beroperasi	Unit	5	7	7	3	3	3	3			
	Dukungan pembangunan Pos Pengawas SDKP, Pengadaan Perahu Motor POKMASWAS dan Uniform POKMASWAS (sumber dana DAK)	Unit/Pak et	-	-	3	3	3	3	3			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	a.Penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan	Paket Kegiatan : pemberkasan Penanganan Tindak Pidana Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1.540	APBD	DKP
	b) Peningkatan pengelolaan penanganan barang bukti tindak pidana ;											
	c) Pemberian sanksi kapal ikan asing hasil tangkapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sebagai efek jera);											
<b>INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi</b>												
<b>PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>												
Kegiatan 1: Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang mendapatkan pembinaan usaha kenelayanan (asuransi nelayan, kartu tanda anggota nelayan (TAN))	RTP Nelayan Tangkap / KUB Perikanan Tangkap	3.040	9.135	90	50	50	50	50	1.310,630	APBD	DKP

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 15.2.1 (a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya</b>												
<b>PROGRAM Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>												
Kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Kerusakan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat	Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	Ha	1	25	5	5	5	5	5	1.467,499	APBD	DLHK
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan pembinaan & penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	Sekolah	8	10	23	26	30	35	40	4.428,465	APBD	DLHK
<b>INDIKATOR SDGs: 15.2.1 (b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.</b>												
<b>PROGRAM Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</b>												
Sosialisasi peraturan terkait penatausahaan hasil hutan kayu	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan terkait penatausahaan hasil hutan kayu	pelaku usaha kehutan an dan masyarakat	0	0	27	0	30	30	30	381,25	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 15.2.1 (d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.</b>												
<b>PROGRAM Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan</b>												
1.1 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Bintan - Tanjungpinang	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	150	APBD	DLHK
1.2 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Lingga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	150	APBD	DLHK
1.3 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Natuna	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	150	APBD	DLHK
1.4 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Anambas	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	150	APBD	DLHK
1.5 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Batam	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	150	APBD	DLHK
1.6 Penyusun Dokumen RencanaPengelolaan pada KPHP Karimun	Dokumen	0	-	1	1	1	1	1	3	150	APBD	DLHK
1.7 Operasional KPH Bintan - Tanjungpinang	Paket	0	1	1	1	1	1	1	1	340	APBD	DLHK
1.8 Operasional KPH Batam	Paket	0	1	0	1	1	1	1	1	340	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.9 Operasional KPH Karimun		Paket	0	1	0	1	1	1	1	330	APBD	DLHK
2.0 Operasional KPH Natuna		Paket	0	1	0	1	1	1	1	445	APBD	DLHK
2.1 Operasional KPH Lingga		Paket	0	0	0	1	1	1	1	340	APBD	DLHK
2.2 Operasional KPH Anambas		Paket	0	1	0	1	1	1	1	455	APBD	DLHK
2.3 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Bintan- Tanjungpinang		Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK
2.4 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Batam		Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK
2.5 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Karimun		Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK
2.6 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Lingga		Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2.7 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Natuna	Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK
2.8 Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Anambas	Ha	-	5	-	-	5	5	5	150	APBD	DLHK
2.9 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	-	10	-	10	10	10	10	375	APBD	DLHK
3.0 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang	Kelompok	-	2	-	-	2	2	2	160	APBD	DLHK
3.1 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Batam	Kelompok	-	2	-	-	2	2	2	160	APBD	DLHK
3.2 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Karimun	Kelompok	-	2	-	-	2	2	2	160	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
3.3 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Lingga	Kelompok	-	2	-	-	2	2	2	160	APBD	DLHK
3.4 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Natuna	Kelompok	-	2	-	-	2	2	2	160	APBD	DLHK
3.5 Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani hutan Wilayah KPH Anambas	Kelompok	-	1	-	-	1	1	1	160	APBD	DLHK
3.6 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Batam	Unit	-	1	-	2	2	2	2	200	APBD	DLHK
3.7 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Natuna	Unit	-	1	-	1	1	1	1	200	APBD	DLHK
3.8 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Bintan - Tanjungpinang	Unit	-	1	-	1	1	1	1	200	APBD	DLHK
3.9 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Lingga	Unit	-	1	-	2	2	2	2	200	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
4.0 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Karimun		Unit	-	1	-	1	1	1	1	200	APBD	DLHK
4.1 Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Anambas		Unit	-	1	-	1	1	1	1	200	APBD	DLHK
4.1 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Batam		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.2 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.3 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Karimun		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.4 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Lingga		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.1 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Natuna		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.5 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Anambas		Patroli	-	4	-	4	4	4	4	200	APBD	DLHK
4.6 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang		Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	150	APBD	DLHK



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
4.7 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Batam	Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	150	APBD	DLHK
4.8 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Karimun	Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	150	APBD	DLHK
4.9 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Lingga	Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	150	APBD	DLHK
5.0 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Natuna	Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	150	APBD	DLHK
5.1. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPH Anambas	Pertemuan	-	1	-	-	1	1	1	205	APBD	DLHK
5.2 Pos Penangan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus	10	11	-	4	4	4	4	727,575	APBD	DLHK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs : 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</b>												
<b>PROGRAM Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan</b>												
	1.1 Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	-	-	-	-	100	100	-			
	1.2 Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	-	-	-	-	0,03	0,05	-			
	1.3 Luas lahan kritis terehabilitasi	Ha	200	313	243	220	225	230	230			
	1.4 Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	KPH	-	-	-	3	4	5	6			
	1.5 Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	kasus	10	11	4	4	4	4	4			

**Matrik Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020				2021	
<b>TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.1.3 Proporsi Penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.1.3 Angka Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir</b>												
<b>PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1 : Pengembangan dan Pemantapan Jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	1.1. Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan dan perlindungan perempuan	Lembaga	0	0	0	0	20	20	20	750	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2 : Pelayanan Rumah Singgah Engku Putri		Paket	1	1	1	1	1	1	1	2,270	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 3 : Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan		Orang	0	0	0	100	100	100	100	650	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 4 : Pelayanan Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan		Orang	0	0	0	30	30	30	30	2,120	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.1 Proporsi anak umur 1 - 17 Tahun yang mengalami hukuman fisik dan / atau tekanan psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.1 Persentase anak yang mengalami kekerasan dari pengasuh dalam sebulan terakhir</b>												
<b>PROGRAM : Perlindungan Anak</b>												
Kegiatan 1 : Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	1.1. Terfasilitasinya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Orang	0	0	0	100	100	100	100	650	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2 : Pelayanan Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan	2.1. Terfasilitasinya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Orang	0	0	0	30	30	30	30	2,120	APBD	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.2 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.2 Persentase kasus korban perdagangan manusia menurut jenis kelamin</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>												
Kegiatan 1 : Workshop Pemberdayaan Perempuan Prov.Kepri	1.1. Jumlah perempuan yang dilatih keterampilan	Orang	0	0	40	50	50	50	50	387,7	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18 - 29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun</b>													
<b>INDIKATOR SDGs: 16.2.3 (a) Persentase kekerasan pada penduduk usia muda bagi korban kekerasan yang telah diberikan</b>													
<b>PROGRAM : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>													
Kegiatan 1 : Penguatan dan Revitalisasi Organisasi Perempuan Politik di Prov. Kepri	1.1. Jumlah organisasi perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang politik	Orang	50	0	0	0	0	0	0	0	165	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2 : Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri	2.1. Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang politik	Orang	0	40	40	40	40	0	0	0	153,1	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 3 : Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	3.1. Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	40	50	50	50	50	50	223,6	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 4 : Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan	4.1. Terfasilitasinya pembentukan kelurahan/desa bebas kekerasan	Kabupaten /Kota	0	2	1	1	1	1	1	1	660	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 5 : Sosialisasi dan Publikasi Desa/Kelurahan Bebas Kekerasan	5.1. Terlaksananya rapat	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	420	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang dilakui dalam mekanisme resolusi konflik</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.3.1 (a) Jumlah bantuan hukum bagi korban kekerasan yang telah diberikan</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	1.1. Terlaksananya sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Kabupaten /Kota	0	0	0	1	2	2	2	100	APBD	DP3AP2KB
<b>INDIKATOR SDGs: 16.3.1 (b) Jumlah Perda Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>												
Kegiatan 1 : Pembentukan dan sosialisasi Pergub implementasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	1.1. Jumlah Pergub yang dihasilkan	Dokumen	0	0	0	0	4	4	4	500	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2 : Sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	2.1. Terlaksananya sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Kabupaten /Kota	0	0	0	1	2	2	2	(16.3.1.a)	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs: 16.3.1 Jumlah korban yang ditangani litigasi</b>												
<b>Jumlah korban yang ditangani non litigasi</b>												
<b>INDIKATOR SDGs 16.3.2 :Proporsi tahanan yang belum diputus terhadap seluruh jumlah tahanan dan napi</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>												
Kegiatan 1. Pelayanan rumah singah engku putri	1.1. Terlayaninya pengaduan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2,270	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2. Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan	2.1. Terlaksananya penerimaan pengaduan dan penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan	Paket	0	0	0	0	1	1	1	650	APBD	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Indikator : 16.5.1.(a) Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau</b>												
<b>Program 1 : Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri</b>												
Kegiatan 1 : Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	1.1 Jumlah Laporan Monev	Laporan	-	-	1	1	1	1	550	550	APBD	Inspektora t
Kegiatan 2 : Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	2.1 Jumlah Laporan Monev	Laporan	-	-	1	1	1	1	550	550	APBD	Inspektora t
<b>INDIKATOR SDGs: 16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel dan transparan di semua tingkat</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.6.1 ( c). Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan</b>												
<b>PROGRAM E-PROCUREMENT</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan LPSE Kepri	1.1. Frekuensi Pelaksanaan Dukungan dan Operasional LPSE Kepri	Bulan	na	0	0	12	12	12	12	2.730,52	APBD	BALP
Kegiatan 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE Kepri	2.1 . Frekuensi Penyedia Sarana dan Prasarana LPSE Kepri	Bulan	na	0	0	12	12	12	12	1.512,4	APBD	BALP
Kegiatan 3: Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Yang Terintegrasi	3.1. Jumlah Sistem yang Diadakan	Sistem	na	0	0	1	0	0	0	177,2	APBD	BALP
Kegiatan 4: Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Kepulauan Riau	4.1. Jumlah Peserta Rakor LPSE	Orang	na	0	0	40	45	50	60	860	APBD	BALP



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 5: Rapat Kerja LPSE Regional Sumatera	5.1. Jumlah Peserta Rapat Kerja LPSE Regional Sumatra	Orang	na	0	0	0	80	0	80	620	APBD	BALP
Kegiatan 6: Peningkatan Pengguna SPSE	6.1. Jumlah Pengguna SPSE	Orang	na	0	0	100	150	150	150	592,82	APBD	BALP
Kegiatan 7: Peningkatan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	7,1, Jumlah Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	Orang	na	0	0	50	50	70	50	800	APBD	BALP
Kegiatan 8: Peningkatan Pelaksanaan E-Purchasing dan Katalog Elektronik	8.1. Jumlah Peserta Pelatihan E-Purchasing	Orang	na	0	0	80	80	90	80	790	APBD	BALP
Kegiatan 9: Peningkatan Penyusunan Perencanaan Pengadaan pada SIRUP	9.1. Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	na	0	0	1	1	1	1	352	APBD	BALP
Kegiatan 10: Pengelola Website Biro Administrasi Layanan Pengadaan	10.1. Jumlah Website yang dikelola	Sistem	na	0	0	0	1	1	1	305	APBD	BALP

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Indikator : 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau</b>												
<b>Program 1 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah</b>												
Kegiatan 1 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.	1.1 Jumlah UPP yang di Monev	UPP	10	10	10	10	10	15	1.230	1.230	APBD	Inspektora t
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	2.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dikelola	Lap. Pengaduan	10	10	15	15	20	20	595	595	APBD	Inspektora t
Kegiatan 3 : Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3.1 Jumlah Kab/ Kota yang di Monev	Kab/kota	-	-	-	-	7	7	600	600	APBD	Inspektora t

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs:</b> <b>16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur</b> <b>16.9.1. (a) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</b> <b>16.9.1. (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.</b>												
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>												
Kegiatan 1: Fasilitasi Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran	1.1. Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan	0	7	7	7	7	7	7	7	1.250	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 2: Persiapan/ Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	1.1. Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan	0	0	0	0	0	7	7	7	323	APBD	DPMD DUKCAPIL
Kegiatan 3: Hibah Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Mobil yang dihibahkan	0	0	0	0	0	0	0	1	1.200	APBD	DPMD DUKCAPIL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>INDIKATOR SDGs 16.10.1(b) :Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.</b>												
<b>PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1. Pelayanan Rumah Singgah Engku Putri	1.1. Terlayannya pengaduan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak	Paket	1	1	1	1	1	1	1	(16.3.1)	APBD	DP3AP2KB
Kegiatan 2. Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO	2.1. Jumlah pertemuan koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan / TPPO	jumlah	0	0	0	1	4	4	4	1.003,4	APBD	DP3AP2KB

**Matrik Bagian 2 : Program dan Kegiatan Non-Pemerintah Pilar Sosial**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020					2021
<b>TUJUAN SDGs: TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>												
Kegiatan 1: Bantuan Langsung Fakir Miskin dan Ibnu Sabil	Rupiah					72.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Kegiatan 2, Rutin Lansia						210.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
<b>INDIKATOR SDGs : 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
Pembangunan gedung Posyandu Desa Belibak	USD				30.000				30.000	Premier Oil		Premier Oil
Pelatihan kader posyandu	USD			8.338					8.338	Premier Oil		Premier Oil
<b>INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)</b>												
<b>PROGRAM : KEPRI CERDAS</b>												
Kegiatan 2: Beasiswa SMA BAZNAS					280.000.000	560.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Kegiatan 3: Bantuan Langsung Pendidikan					260.000.000	225.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Kegiatan 4: Pembinaan Beasiswa BAZNAS					28.344.000	412.500.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020					2021
<b>PROGRAM: Pendidikan</b>												
Beasiswa Mahasiswa, taman baca dan festival budaya	USD				15.000				15.000	Premier Oil		Premier Oil
Peningkatan Kualitas Pendidikan Terpadu Rintis	USD				20.000				20.000	Premier Oil		Premier Oil
Peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana komunitas	USD		22.812						22.812	Premier Oil		Premier Oil
Pagelaran seni dan budaya melayu	USD		12.735						12.735	Premier Oil		Premier Oil
Perbaikan halaman dan pengadaan buku pustaka umum	USD		12.825						12.825	Premier Oil		Premier Oil
Gedung Kesenian dan Budaya	USD		40.438						40.438	Premier Oil		Premier Oil
Bantuan untuk mendukung kegiatan di Kabupaten Natuna	USD				5.049				5.049	Star Energi	Kabupaten Natuna	Star Energi
Bantuan untuk mendukung kegiatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	USD				5.049				5.049	Star Energi	Kabupaten Kepulauan Anambas	Star Energi
Bantuan mobil pustaka keliling	USD	4.277							4.277	Star Energi	Kabupaten Natuna	Star Energi
Pengembangan Taman Edukasi	USD	1.889							1.889	Star Energi	Kabupaten Natuna	Star Energi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Pengembangan Kompetensi Pendidikan di KKA	USD			3.997					3.997	Star Energi		Star Energi
Social Mapping	USD		-	25.316					25.316	Premier Oil		Premier Oil
Pendampingan desa binaan Bantuan pendidikan anak yatim				√	√	√	√	√	Dana CSR PGN : Rp.500000 0000	PGN		PGN
<b>INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</b>												
Perbaiki RTLH	USD	853							853	Star Energi	Kabupaten Natuna	Star Energi
<b>INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</b>												
<b>Program Kepri Peduli</b>												
Bantuan Tanggap Bencana						86.400.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
<b>PROGRAM: Bencana Alam</b>												
Mitigasi bencana alam	USD		3.000	15.000	15.000				33.000	Premier Oil		Premier Oil
Bantuan untuk bencana alam nasional dan lokasi	USD		5.260		1.430				6.690	Star Energi		Star Energi
<b>INDIKATOR SDGs : 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap</b>												
Kegiatan 2: Bantuan Ekonomi Terencana	Rupiah				280.000.000	802.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020					2021
<b>TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan</b>												
<b>Program sosial bank indonesia : 2018 tema</b>												
ketahanan pangan dan pertanian				√					Rp.500.000.000	Bank Indonesia	Kepri	Bank Indonesia
<b>Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b>												
Bantuan biaya berobat	Rupiah					84.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Mobil layanan kesehatan	Rupiah					192.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Layanan langsung	Rupiah					24.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Bakti sosial kesehatan	USD			3.374					3.374	Star Energi		Star Energi
Pelayanan mobil sehat				√	√	√	√	√	Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Kepri	Bank Riau Kepri
Bantuan AC RSUD tanjunguban	unit			30					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Tanjung Uban	Bank Riau Kepri



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Sarpras disabilitas dan pos yandu natuna				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Natuna	Bank Riau Kepri
Mobil jenazah Lingga				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Lingga	Bank Riau Kepri
<b>PROGRAM: Mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah Kep.Riau</b>												
Studi Kelayakan dan menghimpun data.	%		-	-	-	60	40	-	150	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Penyusunan Proposal dan dukungan dari semua stakeholder	%		-	-	-	-	-	100	300	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Rekrutmen tenaga Medis dan Paramedis serta tenaga Manajemen.	%		-	-	-	-	-	100	300	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Pengurusan Rekomendasi dari para pihak terkait.	%		-	-	-	-	-	100	100	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Pelatihan Auditor Halal LPPOM MUI	Kegiatan	-	-	-	-	1	1	-	200	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Dukungan Usaha Halal MUI		-	-	-	-	-	-	-	1.200	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
<b>TUJUAN SDGs: 4 Pendidikan Berkualitas</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 4.2.2. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>												
Pembangunan Gedung PAUD	USD			33.847					33.847	Premier Oil		Premier Oil
Pengembangan pendidikan PAUD Rintis	USD				15.000				15.000	Premier Oil		Premier Oil
Renovasi TK ANDA	USD				10.000				10.000	Premier Oil		Premier Oil
Bantuan mobil paud				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri		Bank Riau Kepri
<b>INDIKATOR SDGs: 4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)</b>												
Beasiswa Sarjana BAZNAS	Rupiah				240.000.000	480.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Beasiswa Mahasiswa dan Pelajar	USD		√	√					1.4.1	Premier Oil		Premier Oil
Beasiswa Penuh S1	USD	6.804							6.804	Star Energi		Star Energi
Lab universitas karimun				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Karimun	Bank Riau Kepri
Mahasiswa bagi universitas karimun				√								

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
<b>PROGRAM: Mendirikan ( Universitas Muhammadiyah Kepulauan Riau ) UNISMUH KEPRI</b>												
Studi kelaikan dan menghimpun data pendukung	%		100	-	-	-	-	-	300	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Penyusunan Proposal Pendirian 12 rangkap dan dukungan dari semua stakeholder	%		100	-	-	-	-	-	500	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Rekrutmen Calon Dosen	%		-	100	-	-	-	-	200	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Pengurusan Rekomendasi dari KOPERTIS X Padang	%		-	100	-	-	-	-	100	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Pengurusan Izin Operasional dari MENRISTEKDIKTI RI	%		-	-	40	60	-	-	500	Sumbangan donatur/Infak/Zakat	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Pengadaan lahan untuk Kampus UNISMUH KEPRI	%		-	-	-	-	40	60	150.000	Bantuan / Pinjaman PP Muhammadiyah /Bank	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
Pembangunan Kampus baru UNISMUH KEPRI	%		-	-	-	-	50	50	300.000	Bantuan / Pinjaman PP Muhammadiyah /Bank	Kota Tg.Pinang dan Kab.Bintan	BPH UNISMUH / PWM KEPRI
<b>INDIKATOR SDGs : 4.5.1 * Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.</b>												
Bantuan BRI mengajar, renovasi sekolah dasar,	Rp			√					Dana CSR BRI 2017 : 400.000.000	BRI	Natuna	BRI
memberikan bantuan untuk murid berprestasi	Rp			√				Lingga				
Studi banding pertukaran pelajar	Rp			√					Dana CSR Tahun 2016 : 500.000.000	BTN		
pendidikan SD dan perguruan tinggi khususnya pariwisata di kepri	Rp			√	√	√	√	√	Rp.17.500.000.000	BRC		BRC

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Beasiswa miskin batam	Rp			√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.00		Batam	Bank Riau Kepri
Beasiswa pendidikan	Rp			√					Rp. 500.000.000	Bank Bukopin		Bank Bukopin
<b>INDIKATOR SDGs: 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun</b>												
Pelatihan kualitas manajemen PKBM	USD				20.000				20.000	Premier Oil		Premier Oil
Pelatihan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	USD		11.657	9.895					21.552	Premier Oil		Premier Oil
Pelatihan pengelola PKBM	USD		11.657						11.657	Premier Oil		Premier Oil
<b>Tujuan 5 Kesetaraan Gender</b>												
Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan Ibu dan anak			√	√					2015-2017 : Rp.3.000.000.000	Pertamina		Pertamina

**Matrik Bagian 2 : Program dan Kegiatan Non-Pemerintah Pilar Ekonomi**

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020					2021
<b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran</b>												
Pembinaan ekonomi Langsung	Rupiah		348.700.000	411.786.000	280.000.000	300.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Pembinaan Ekonomi Mustahik	Rupiah				19.650.000	235.200.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Ekstensifikasi pertanian organik	USD			20.880	30.000				50.880	Premier Oil		Premier Oil
Ekstensifikasi budi daya ikan	USD		22.467	27.872	30.000				80.339	Premier Oil		Premier Oil
Pemberdayaan industri kreatif (Home Industri)	USD				12.000				12.000	Premier Oil		Premier Oil
Pemberdayaan ekonomi pertanian Pulau Pahat	USD			3.760	4.000				7.760	Premier Oil		Premier Oil
Pemberdayaan usaha mikro ekonomi - Desa Payamaram	USD			9.592					9.592	Premier Oil		Premier Oil
Pemberdayaan ekonomi usaha kecil - Kec. Jemaja	USD		2.910						2.910	Premier Oil		Premier Oil
Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro	USD			12.710					12.710	Premier Oil		Premier Oil
Pertanian Organik	USD		30.620						30.620	Premier Oil		Premier Oil

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Pendampingan usaha kecil	USD		8.500						8.500	Premier Oil		Premier Oil
Pembuatan Pelantar Rakyat	USD	3.444							3.444	Star Energi		Star Energi
Magang Bakti BCA, Permagangan bagi lulusan SLTA, D3, dan S1 atau sedrajad guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai teller dan customer servicer	orang			36	37	38	39	40	Rp.1800000000	BCA		BCA
<b>Tujuan 9 : Industri Inovasi dan Infrastruktur</b>												
Pembangunan tugu di bundaran dampak				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000		Dompok	Bank Riau Kepri
<b>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b>												
Program Al Quran	Rupiah					180.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Program Bina Muallaf	Rupiah					180.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Sekolah Dai/ Bina Dai	Rupiah					144.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Dai Hinterland	Rupiah					273.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Marbot	Rupiah					36.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Kegiatan Dakwah	Rupiah					90.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Safari Dakwah	Rupiah					144.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Qurban berdayakan kepulauan	Rupiah					132.300.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Iftar Ramadhan	Rupiah					138.600.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
zakat fitrah	Rupiah					56.800.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Rehap Mesjid/ Musallah	Rupiah					63.000.000					KEPRI	BAZNAZ KEPRI
Pembangunan/Renovasi Sarana Ibadah				√	√				Rp.300000000	Pusat	Kepri	PT. Jasaraha rja
Bantuan rehabilitasi masjid	Jumlah Mesjid				√				Dana CSR BRI 2017 : Rp.400.000.000		Kepri	BRI
Masjid				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000			Bank Riau Kepri
Sound sistem masjid karimun				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000		Karimun	Bank Riau Kepri
<b>Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan</b>												
Bantuan UKM dan internet gratis di kepulauan batam dan tanjungpinang				√	√	√	√	√			kepulauan batam dan tanjungpinang	Telkom



**Matrik Bagian 2 : Program dan Kegiatan Non-Pemerintah Pilar Lingkungan**

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020					2021
<b>Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>												
penyediaan sarana air bersih			√						Dana CSR Tahun 2016 : Rp.500.000.000	BTN		BTN
<b>Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 11.6.1(a) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan</b>												
Program bersama KKKS di Kabupaten Anambas - Program bersama dengan Medco Pembangunan area/taman hijau "Batu Lepe" di Tarempa	USD				81.000				81.000	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS di Kabupaten Anambas	USD			35.000					35.000	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS - Desa Payamaram	USD		9.328						9.328	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS - Desa Ladan	USD		9.328						9.328	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS - Desa Putik	USD		9.323						9.323	Premier Oil		Premier Oil

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Program bersama KKKS - Desa Tebang	USD		9.328						9.328	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS - Desa Candi	USD		9.329						9.329	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS - Desa Teluk Bayur	USD		9.328						9.328	Premier Oil		Premier Oil
Program bersama KKKS di Kabupaten Natuna Besar	USD			34.728	40.000				74.728	Premier Oil		Premier Oil
bedah rumah, bantuan fasilitas perpustakaan di batam, perbaikan pelantar				√					Rp.5000000 00	Taspen	Batam	Taspen
<b>Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim</b>												
Penanaman pohon 1000 batang di dompak				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Dompok	Bank Riau Kepri
Bantuan khusus lingkungan				√					2015-2017 : Rp.3.000.000.000	Pertamina	Kepri	Pertamina

Program/Kegiatan /Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
Taman median jalan di batam				√					Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Batam	Bank Riau Kepri
<b>Tujuan 14 Ekosistem Lautan</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 14.4.1 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.</b>												
Pelestarian habitat penyu Pulau Pahat	USD		13.060	14.650	16.000				43.710	Premier Oil		Premier Oil
Pemeliharaan area konservasi mangrove (bakau)	USD		4.295	5.037	7.000				16.332	Premier Oil		Premier Oil
<b>Tujuan 15 : Ekosistem Daratan</b>												
Rehab kadangbuaya bintan									Dana CSR Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000	Bank Riau Kepri	Bintan	Bank Riau Kepri
<b>Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan</b>												
Bantuan UKM dan internet gratis di kepulauan batam dan tanjungpinang				√	√	√	√	√			kepulauan batam dan tanjungpinang	Telkom

**Matrik Bagian 2 : Program dan Kegiatan Non-Pemerintah Pilar Hukum**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
<b>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b>												
<b>INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya</b>												
Bantuan PJUTS	USD	639							639	Star Energi	Kabupaten Natuna	Star Energi
<b>INDIKATOR SDGs: 16.7.2 (b) Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI)</b>												
Pembekalan & Pelepasan Mubaligh Kota Tanjungpinang	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	8	APBD PROV KEPRI	Tanjungpinang	MUI Prov. Kepri
Diskusi Panel Kemenag Tanjungpinang	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	4,4	APBD PROV KEPRI	Tanjungpinang	MUI Prov. Kepri
SOSIALISASI FATWA MUI NO.33 TAHUN 2018	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	8,226	APBD PROV KEPRI	Tanjungpinang	MUI Prov. Kepri
Pemurnian Aqidah Daerah Pulau Prov. Kepri	Kegiatan	-	-	-	-	7	7	-	420	APBD PROV KEPRI	Tanjungpinang	MUI Prov. Kepri
Muzakarah Menangkal Radikalisme & Terorisme	Kegiatan	-	-	-	-	50	50	-	50	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021				
FGD Tentang Aliran Sempalan	Kegiatan	-	-	-	-	2	2	-	60	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Mental Traning Generasi Muda	Peserta	-	-	-	-	120	120	-	240	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Pemantapan Aqidah Saudara Baru (Muallaf)	Kegiatan	-	-	-	-	7	7	-	420	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Penguatan Aqidah Melalui Pengurus BKMT	Kegiatan	-	-	-	-	7	7	-	350	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Pembinaan Qalbun Salim	Kegiatan	-	-	-	-	8	8	-	480	APBD PROV KEPRI	KEPULAUAN RIAU	MUI Prov. Kepri
Perbaikan sarana wudhu mesjid payamaram	USD				7.000				7.000	Premier Oil		Premier Oil
Pembangunan lapangan sepakbola Desa Batu Belah	USD				13.000				13.000	Premier Oil		Premier Oil

**MATRIK BAGIAN 1 : TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KABUPATEN BINTAN**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN</b>												
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.												
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim	Persentase penduduk miskin	BPS	%	6	6	5.9	5.8	5.7	5.6	5,5	DINSOS
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk miskin	BPS	%	6	6	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	DINSOS
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.												
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos	%	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	DINSOS
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan	Dinkes	Jiwa	1.140	5.000	10.000	16.000	18.000	20.000	22.000	DINKES
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disnaker	%	<b>98,4</b>	<b>100</b>	<b>90,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	PTSP NAKER
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos	%	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	DINSOS
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Dinsos	%	6,88	6,88	7,43	23,05	23,05	23,05	23,05	DINSOS

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber dayaekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.												
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	Dinkes	%	96,4	96,4	96,5	96,5	97,1	97,2	97,2	DINKES
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	91	95	95	95	95	95	95	DINKES
1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Cakupan peserta KB aktif	DP3AP2 KB	%	77,1	77,8	78.02	78.51	78.63	79,35	80	DP3AP2KB
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	PU & PR	%	63,75	73,02	78,05	83,63	90,88	98,14	98,14	PU & PR
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Dinkes	Jumlah	18	19	20	21	22	23	23	DINKES
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Diknas	%	99,67	100.78	98,24	100	100	100	100	PENDIDIKAN
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Diknas	%	101,09	106.65	99,74	100	100	100	100	PENDIDIKAN
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun	Orang	%	34.542	34.54	37.24	40.09	43.09	46.09	46.09	DISDUKCAPI L
					49.136	49.136	52.136	55.136	58.136	61.136	61.136	







KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Ketersediaan energi perkapita	DISKANTAN	Kkal/kap/hari	2.247	2.537	2.522	2.600	2.730	2.867	2.867	DISKANTAN
2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025												
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Jumlah kasus stunting	Dinkes	%	0	32	31	30	29	28	28	DINKES
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta											
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persentase balita wasting (kurus)	Dinkes	%	0,8	0,8	0,79	0,78	0,77	0,75	0,75	DINKES
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase Anemia Ibu Hamil	Dinkes	%	3,8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	DINKES
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Dinkes	%	0	29	30	31	32	33	33	DINKES
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	DISKANTAN	%	80	83	84	85	86	87	88	DISKANTAN



KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000												
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah kasus kematian anak balita	Dinkes	Kasus	6	6	6	6	6	6	6	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka kematian neonatal (AKN)	Dinkes	Jumlah		5,26						DINKES
3.2.2 (a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	Dinkes	Per 1.000 KH	12	12	12	12	12	12	12	DINKES
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinkes	%		85,7	N/A	57,1	100	85,7	85,7	DINKES
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persentase kasus HIV yang diobati	Dinkes	%	90	90	90	90	90	90	90	DINKES
3.3.2 (a)	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucess rate)	Dinkes	%	80	81	82	83	84	85	85	DINKES
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Dinkes	Jumlah	10	10	10	10	10	10	10	DINKES
3.3.4	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Dinkes	%	0	13	26	33	40	53	53	DINKES
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinkes	%	80	81	82	83	84	85	85	DINKES

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.3.5 (a)	Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinkes	%	80	81	82	83	84	85	85	DINKES
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%	Dinkes	Jumlah	0	2	2	2	2	2	2	DINKES
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan												
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun	Dinkes	%	7,2	6,9	6,4	5,9	5,6	5,4	5,4	DINKES
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Dinkes	%	0	13	26	33	40	53	53	DINKES
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional												
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Cakupan peserta KB aktif	DP3AP2 KB	%	77,1	77,8	78.02	78.51	78.63	79,35	80	DP3AP2KB
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin											

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern											
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3AP2 KB	%	3.7	3.7	3.65	3.2	3	2,8	2,8	DP3AP2KB
3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang												
3.8.2	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan	Dinkes	Jumlah	1.140	5.000	10.000	16.000	18.000	20.000	22.000	DINKES
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	Dinkes	%	50	60	70	85	100	100	100	DINKES
3.9 Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah												
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun	Dinkes	%	7,2	6,9	6,4	5,9	5,6	5,4	5,4	DINKES
3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinkes	%	67,5	70	73	75	78	80	80	DINKES
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Tersedianya Nakes yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Khusus (Dinkes)	Dinkes	Orang	19	42	5	5	5	7	10	DINKES

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA</b>												
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar												
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca		%	100	100	100	100	100	100	100	PENDIDIKAN
		(ii) matematika		%	100	100	100	100	100	100	100	PENDIDIKAN
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Diknas	%	30,10	50,48	54,29	57,00	59,85	62,84	65,98	PENDIDIKAN
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	APK SD/MI/SLB/Paket A	Diknas	%	102,75	104,79	104,25	103,69	103,11	103	102,5	PENDIDIKAN
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	APK SMP/MTs/Paket B	Diknas	%	100,5	122,7	122,2	122	121,7	121,1	120	PENDIDIKAN
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Diknas	%	8,28	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	PENDIDIKAN
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan												
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD 3-6 Tahun	Diknas	%	56,74	57,73	58,73	59,73	61,00	62,50	62,50	PENDIDIKAN



KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan												
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	%	43,42	50,1	Data BPS hanya sampai Provinsi Kepri				KOMINFO	
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan												
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	(1) APM SD/MI/SLB/Paket A	Diknas	%	94,69	95,21	95,75	96,31	96,89	97	97,5	PENDIDIKAN
		(2) APM SMP/MTs/Paket B	Diknas	%	76,95	77,3	77,8	78	78,3	78,95	80	PENDIDIKAN
		(1) Rasio APM perempuan laki-laki di SD	Diknas	%	99,67	99,7	99,78	99,83	100	100	100	PENDIDIKAN
		(2) Rasio APM perempuan laki-laki di SMP	Diknas	%	101,09	100,78	100,52	100,88	100	100	100	PENDIDIKAN
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki- laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung												
4.6.1 (a)	Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka Melek Huruf (AMH)	Diknas	%	99,63	99,63	99,72	99,81	99,91	100	100	PENDIDIKAN
4.6.1 (b)	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun											

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	Diknas	%	50	60	60,2	63	63,5	64	64,5	PENDIDIKAN
		Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	Diknas	%	50	60	60,2	63	63,5	64	64,5	PENDIDIKAN
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Persentase guru TK bersertifikat profesi	Diknas	%	13,2	17,6	19,02	20,54	22,6	24,86	27,34	PENDIDIKAN
		Persentase guru SD bersertifikat profesi	Diknas	%	44,2	49,2	53,12	57,37	63	69,41	76,35	PENDIDIKAN
		Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	Diknas	%	43,7	63,5	68,63	74,12	81,53	89,68	98,65	PENDIDIKAN
<b>TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN</b>												
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.												
5.2.1.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio KDRT	Diknas	%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	DP3AP2KB
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak	Diknas	%	26	24	20	18	15	13	8	DP3AP2KB

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio KDRT	Diknas	%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	DP3AP2KB
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Diknas	%	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indeks Pembangunan Gender	DP3AP2 KB	%	65.44	65.44	66.00	68.60	68.50	70	70	DP3AP2KB
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.												
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DP3AP2 KB	%	10.31	10.31	10.31	10.28	10.25	10.20	10.20	DP3AP2KB
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.												
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DISHUB	Persentase	95%	95%	96%	97%	98%	100%	100%	DISHUB

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN</b>												
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.												
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Dinas PERKIM	%	63,75	73,02	78,05	83,63	90,88	98,14	98,14	PU & PR
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan												
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS	Dinkes	%	76	78	80	82	84	86	86	DINKES
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Dinkes	%	60	63	66	69	72	75	75	DINKES
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Dinkes	Jumlah	18	19	20	21	22	23	23	DINKES
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS	Dinkes	%	76	78	80	82	84	86	86	DINKES
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Jumlah rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	PERKIM	SR	230	330	430	530	630	730	730	PERKIM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global												
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kualitas air danau	RISPAM	%	50	50	50	50	75	75	100	PU & PR
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	RISPAM	%	50	50	50	50	75	75	100	PU & PR
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat												
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	BWS	%	0	0	50	75	75	90	100	PU & PR
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BPPPD	Jumlah	5	1	1	2	2	2	2	BAPELITBAN GDA
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara	Jumlah panjang normalisasi saluran/sungai	PU & PR	%	14500	15	23	57	92	100	100	PU & PR
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau												
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	BWS	Lokasi	3	3	3	3	5	8	8	PU & PR
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Persentase waduk air baku dalam kondisi baik	PU & PR	%	0	0	0	65	85	100	100	PU & PR

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>												
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun dinegara kurang berkembang												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	RPJMD	%	5,16	5,94	5,01	7,5	7,5	7,5	7,5	BPS
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya												
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Disnaker	%	7,113	2,004	5,256	3,411	3,615	3,784	3,955	PTSP NAKER
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.												
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	RPJMD	%	40	45	50	55	60	65	70	DISKOPERIN DAG
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya												
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja.		rupiah/ jam	14.826/ jam	16.53 1/jam	17.89 5/jam	19.45 4/jam	21.01 6/jam	22.70 4/jam	24.52 7/jam	PTSP NAKER
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	RPJMD	%	6,74	8,06	7,44	6,91	6,4	5,89	5,39	PTSP NAKER

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.												
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	RPJMD	%	66,67	68	72	75	77	80	82	PTSP NAKER
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.												
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	RPJMD	%	818.81	957,3 5	958,3 5	959,3 5	960,3 5	965,3 5	966,3 5	DISPARBUD
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	RPJMD	Jumlah	493.595	550.0 00	600.0 00	650.0 00	700.0 00	750.0 00	750.0 00	DISPARBUD
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	RPJMD	%	0	99,3	104,9	110,1	115,6	116,5	117,1	DISPARBUD
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	RPJMD	Jumlah	20	23	25	30	32	39	39	DISPARBUD

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>												
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	DISHUB	Persentase	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	DISHUB
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	DISHUB	Jumlah	8	8	8	9	10	11	11	DISHUB
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Jumlah bandara.	DISHUB	Jumlah	0	0	0	0	2	2	2	DISHUB
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Jumlah Pembangunan terminal/Pelabuhan Sungai, danau, dan Penyebrangan	DISHUB	Jumlah	1	2	3	3	3	3	3	DISHUB
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular	DISHUB	Persentase	95%	95%	96%	97%	98%	100%	100%	DISHUB





KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>												
<b>11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia</b>												
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	DISPARBUD	Unit	14	n/a	25	25	30	40	53	DISPARBUD
<b>11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>												
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	%	n/a	70	70	73	80	75	79	DLH
<b>TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>												
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan												
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH	%	n/a	17.4	450	600	750	900	950	DLH
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali												
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan Bank Sampah	DLH	Persentase	8	8	9	10	18	20	20	DLH

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>												
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.												
13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tersusunnya Titik - Titik Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bintan		Jumlah	10	10	10	10	10	10	10	PENANGGULANGAN BENCANA
<b>TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN SAMUDRA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>												
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.												
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Produksi perikanan tangkap	PERIKANAN	Ton	50.606	48.314	53.338	54.680	55.536	56.315	56.801	PERIKANAN
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.												
14.b.1	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.			ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	PERIKANAN
14.b.1.b	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Persentase kelompok nelayan yang aktif	PERIKANAN	%	45	50	55	60	65	70	75	PERIKANAN

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 16 : TPB/ SDGS MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN</b>												
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.												
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak	DP3AP2 KB	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.												
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	DPPKAD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	ORTAL	NILAI	60.10	60.50	70.00	70.10	80.00	80.00	80.00	ORTAL/INSP EKTORAT

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	INTERPRETASI TARGET SDGs KABUPATEN BINTAN	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2015	Data Kabupaten Bintan						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	SETDA	%	80	80	85	85	90	100	100	SETDA
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	BKPSDM	%	60	62	67	75	81	85	85	BKPSDM
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	Disduk	%	n/a	n/a	n/a	n/a	60%	65%	65%	DISDUKCAPIL
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.												
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Jumlah Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak				24	20	18	15	13	8	DP3AP2KB
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Persentase Tribina, LBKB, BKR dan BKL, UPPKS dan PIK Aktif	DP3AP2 KB	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara Merupakan tugas Pemerintah Pusat, Indonesia telah memiliki Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan Kabupaten Bintan telah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dijabat oleh Kabag Kominfo.									KOMINFO



**MATRIK BAGIAN 1 : TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KABUPATEN LINGGA**

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN</b>												
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi (RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021)	BPS, Dinsos PPPA	%	14,63	14,12	13,59	13,07	12,53	12,01	11,49	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbang
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai												
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Indikator yang akan dikembangkan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPJS kesehatan	%	45							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinsos PPPA
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator kabupaten yang memiliki proksi indikator nasional	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	23	25	39,9	47	57	69	83	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi (Belum menjadi Indikator Kinerja Daerah)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jiwa	61.22		61.2	62	64	66	68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>												
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi (Belum menjadi Indikator Kinerja Daerah)	RAD AMPL Kabupaten Lingga	%	-	-	73,54	86,7	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,



Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi (ada didalam RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021)	BPS, RPJMD Kab. Lingga	%	30	40	45	60	80	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Bapelitbang
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi	RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021	Rasio	85,79	86,04	86,49	86,94	87,39	87,84	88,29	Dinas Pendidikan
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi	RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021	Rasio	57,65	57,9	58,35	58,8	59,25	59,7	60,15	Dinas Pendidikan
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.												
1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Indikator Kabupaten sesuai dengan Indikator Nasional	BPBD	Dok	-	-	-	2	-	-	-	BPBD

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN</b>												
<b>2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>												
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan indikator nasional dan Provinsi	BPS, Dinas Kesehatan	%	0,61	0,52	0,47	0,42	0,31	0,21	0,1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
<b>2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>												
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi	RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021	skor	71,1	67,31	67,45	67,9	68,2	69,5	70	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</b>												
<b>3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>												
3.1.1 *	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Provinsi (Indikator Kinerja Daerah)	BPS, RPJMD Kab. Lingga 2016-2021	Per 100.000 Kematian Hidup	142	142	140	138	136	134	132	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya												
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional dan Indikator Provinsi (Indikator Kinerja Daerah)	RPJMD Kab. Lingga 2016-2021	Per 1.000 KH	30	30	29	28	27	26	25	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
<b>TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>												
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas,												
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Indikator yang akan dikembangkan	Data tersedia di Dinas Pendidikan, tetapi belum dilakukan perhitungan dan belum menjadi Indikator Kinerja Daerah	Persentase		37,07	37,07					Dinas Pendidikan
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator yang akan dikembangkan	Data tersedia di Dinas Pendidikan, tetapi belum dilakukan perhitungan dan belum menjadi	Persentase		40	40					Dinas Pendidikan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Indikator Kinerja Daerah									
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional (Indikator Kinerja Daerah)	BPS		117.27	102.85	101.94	102.39	102.84	103.29	103.74	Dinas Pendidikan
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional (Indikator Kinerja Daerah)	BPS		73.12	83.77	79.8	80.25	80.9	81.35	81.8	Dinas Pendidikan
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator Kabupaten sesuai dengan indikator Nasional	RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021	Tahun	5,54	5,85	5,92	6,07	6,21	6,37	6,52	Dinas Pendidikan
<b>TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER</b>												
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.												
5.1.1 *	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator yang akan dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Daerah	Data tersedia di Dinsos, PPPA, tetapi belum dilakukan perhitungan	Dokumen			5	6				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>												
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (tidak ada dalam lampiran Pepres)	Indikator yang akan dikembangkan	BPS (belum dilakukan perhitungan)	Persen	2,02	3,62						
8.1.1 (a)	PDRB per kapita	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan indikator Nasional (Indikator Kinerja Daerah)	RPJMD Kab. Lingga 2016-2021, BPS	Juta	34,35	36,91	41,1	49,6 3	55,09	61,15	67,88	
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang												
8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (tidak ada di dalam Pepres)	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional	BPS	%	4,01	4,12	4,07	4,02	4	3,95	3,91	Dinas Tenaga Kerja
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya												
8.9.1 *	Kontribusi PDB terhadap pariwisata	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional (Indikator Kinerja Daerah)	RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021	Persen	1,99	2,03	3,69	4,61	5,76	7,2	9,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</b>												
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan												
9.1.2 (a)	Jumlah bandara	Indikator yang akan dikembangkan	RTRW Kabupaten Lingga	Unit	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk												
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Indikator yang akan dikembangkan	BPS	Persen	170,86	-36,84						
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Indikator yang akan dikembangkan	BPS (belum dilakukan perhitungan)	Persen	-	55,88						
9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Indikator yang akan dikembangkan	BPS (belum dilakukan perhitungan)	Persen	-	14,19						

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN</b>												
10.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi												
10.1 .1*	Koefisien Gini	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasioan	RPJMD Kab. Lingga 2016-2021, BPS	Index	0,37	0,29	0,302	0,3	0,297	0,295	0,29	Nasional, Provinsi
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan indikator Nasional dan Provinsi	BPS	%	14,63	14,12	13,59	13,07	12,53	12,01	11,49	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbang
<b>TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</b>												
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.												
16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021		WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD, Inspektorat

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						OPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.												
16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator yang akan dikembangkan	Data tersedia di BKD, tetapi belum dilakukan perhitungan dan belum menjadi Indikator Kabupaten	%	5	5	5					
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator yang akan dikembangkan	Data tersedia di BKD, tetapi belum dilakukan perhitungan dan belum menjadi Indikator Kabupaten	%	0	0	4,17					
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.												
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (tidak ada dalam Lampiran Pepres)	Indikator Kabupaten yang sesuai dengan Indikator Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	70	73	75	80	85	90	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**MATRIK BAGIAN 1 : TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KABUPATEN NATUNA**

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN</b>												
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	PBDT PMKS Kementerian Sosial	%		0,33	8	3	3	3	3	Dinas Ssial PP dan PA
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	PBDT PMKS Kementerian Sosial	Jiwa		516	516	642	642	642	642	Dinas Ssial PP dan PA
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki- laki dan perempuan, khususnya masyarakat A18miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro												
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	SDKI BKKBN dan BPS	%	81,85	76,06	79,83	90	90	90	90	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	SDKI	%	75,83	83,66	74,55	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	%	79,29	97,,27	75,99	84	86	88	90	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	%	70,94	90,46	69,21	84	86	88	90	
<b>TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN</b>												
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.												
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas BPS; Riskesdas dan PSG Kementerian Kesehatan; BKP	%	5,6	7,35	7,35	7,35	7,1	7	7,00	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.												
2.2.1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Riskesdas dan PSG Kementerian Kesehatan	%	20,2	0,91	18,50	18,00	17,5	17	16,5	
2.2.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas BPS; Riskesdas dan PSG Kementerian Kesehatan; BKP	%	14,,9	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> ( <i>berat badan/tinggi badan</i> ) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Riskesdas dan PSG Kementerian Kesehatan	%	?	7,5	7,29	7,09	6,69	6,69	6,49	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	45,88	17,96	12,32	42,65	42,60	42,55	42,5	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Risikesdas Kementerian Kesehatan; Susenas BPS	%	52,18	55,99	50,57	53,5	53,79	54	54,5	
<b>TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</b>												
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.												
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	SUPAS	kemati an per 1000 kelahir an hidup	0,63	14,05	17,88	0,54	0,49	0,45	0,40	
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	SDKI	kemati an per 1000 kelahir an hidup	12,83	11,09	12,44	12,1	12	11,5	11,5	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	SUPAS	kemati an per 1000 kelahir an hidup	16,21	13,31	14	15	14,75	14,16	13,75	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.										
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Kemenkes	%	40	43	75	129	125	120	137	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Kemenkes	API per 1000 penduduk	0,07	0	0	0	0	0	0	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan												
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%	5,28	29,67	22,43	27,05	26	25	24	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Riskesdas	%	0	0,01	0,11	0	0	0	0	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi												
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Survey Kinerja dan akuntabilitas program (SKA)	%	83,38	90,04	81,56	61,1	61,2	61	61,3	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	SDKI	%	16,82	17,94	9,39	23,50	23,50	23,50	23,50	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i> ).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	SDKI BKKBN dan BPS; SP dan SUPAS BPS	Tahun	44	42	40	38	38	38	38	
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	SDKI/SKAP	%	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28	2,28	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.												
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas	%	6,07							
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator	Susenas	per 1000 penduduk	859,64	894,03	429,47					

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).		uk								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%	23,72	26,,36	35,10	36	50	75	100	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement												
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Kemenkes	%	187	172	153					
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.												
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	10,16	10,18	10,18					

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>												
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.												
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BAN dan Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	59,26	61,25	63,50	64,0	64,50	65	65,50	Disdikpora
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BAN dan Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	45,26	44,11	48	48,5	49	49,5	50	Disdikpora
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	%	101,75	116,84	93,92	97,64	99,39	101,14	102,89	Disdikpora
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	%	104,22	103,11	99,20	121,08	120,37	119,67	118,97	Disdikpora
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	Tahun	8,08	8,52	8.90	9,15	9,41	9.70	10.00	Disdikpora



Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.												
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS	%		36,00	48,52	43	47	51	55	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.												
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.		%		36.00	40.00	43.00	47.00	51.00	55.00	Disdikpora
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.												
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Susenas Kor BPS; Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	1. 99,34 2. 110,99	1. 110,99 2. 129,36	1. 99,34 2. 110,99	1. 105 2. 115	1. 103 2. 110	1. 101 2. 105	1. 100 2. 100	



Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.c.1*	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	70,17	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	Disdikpora
<b>TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER</b>												
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.												
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	KPPPA; Kemhukham; Kemdagri; Komnas Perempuan; Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	4	4	7	34	40	40	40	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.												
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	SPHPN BPS	%	Fisik = 0,04 Seksual = 0,004 Emosional = 0,008	Fisik = 0,01 Seksual = 0,01 Emosional = 0,01	Fisik = 0,04 Seksual = 0,02 Emosional = 0,01	Fisik = 0,03 Seksual = 0,008 Emosional = 0,004	Fisik = 0,02 Seksual = 0,004 Emosional = 0,004	Fisik = 0,02 Seksual = 0,004 Emosional = 0,004	Fisik = 0,02 Seksual = 0,004 Emosional = 0,004	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	KPU; Sekretariat DPD; BKN	%	5	5	5	30	30	30	30	
<b>TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</b>												
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016	% (Persen)	66,25	66,25	68,80	71,50	74,50	77,20	80,00	

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>												
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita (Laju pertumbuhan ekonomi)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS	% (Persen)	5,88	5,88	6	6,20	6,40	6,45	6,50	
8.1.1.(a)	PDB per kapita (PDRB ADH berlaku per kapita)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS (Statistik indonesia)	Juta Rupiah	59,33	59,33	61,70	64,48	67,38	70,41	73,58	
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk												
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS (Sakernas)	% (Persen)	6,75	6,75	6,25	5,75	5,25	4,9	4,5	Disnakertrans

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.												
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS (Statistik Pariwisata)	Juta Orang	374	426	538	452	497	546	600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS (Statistik Pariwisata)	Juta Orang	10,97	9,412	18,615	11,997	12,619	13,249	13,911	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS (Sakernas)	% (Persen)	176	186	228	228	228	228	228	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</b>												
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	RKP 2017	unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	RKP 2018	unit	84	84	85	85	86	86	87	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	RPJMN 2015-2019	lokasi	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perhubungan
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).		%				54	60	60	60	Diskominfo
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Indonesian E-Commerce Association (idEA)	%				54	60	60	60	Diskominfo

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN</b>												
<b>10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah</b>												
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	RKP 2017	desa	70	5	8	10	10	10	10	DPMD
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	RKP 2018	desa	0	0				0	0	DPMD
<b>TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>												
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.												
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%		34,97	34,02	34,49	37,80	37,80	37,80	DLH



Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</b>												
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.												
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		Persentase	Laki-laki : 0,16 / Perempuan : 0,03		Laki-laki : 0,08 / Perempuan : 0,12	Laki-laki : 0,10 / Perempuan : 0,20	Laki-laki : 0,10 / Perempuan : 0,20	Laki-laki : 0,10 / Perempuan : 0,20	Laki-laki : 0,10 / Perempuan : 0,20	Dinas Sosial PP dan PM
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.		Persentase	Laki-laki : 0 / Perempuan : 0,02		Laki-laki : 0 / Perempuan : 0,04	Laki-laki : 0,01 / Perempuan : 0,08	Laki-laki : 0,01 / Perempuan : 0,08	Laki-laki : 0,01 / Perempuan : 0,08	Laki-laki : 0,01 / Perempuan : 0,08	Dinas Sosial PP dan PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).		Persentase	Laki-laki : 0 / Perempuan : 0,14		Laki-laki : 0 / Perempuan : 0,07	Laki-laki : 0,02 / Perempuan : 0,11	Laki-laki : 0,02 / Perempuan : 0,11	Laki-laki : 0,02 / Perempuan : 0,11	Laki-laki : 0,02 / Perempuan : 0,11	Dinas Sosial PP dan PM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.												
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%	75		100	WTP 100	WDP 75	TW 50	TMP 0	BPKPAD

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN